

**ANALISIS DAMPAK PASCA PENUTUPAN LOKALISASI  
DOLLY DI KOTA SURABAYA JANGKA TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Menempuh Gelar Sarjana  
Strata 1 (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Politik Dengan Minat Utama Reformasi Pemerintahan

Oleh :

**VINCENTIA RETNO PUSPITA WARDHANI**

**NIM 135120600111012**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2017**

**ANALISIS DAMPAK PASCA PENUTUPAN LOKALISASI  
DOLLY DI KOTA SURABAYA JANGKA TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**VINCENTIA RETNO PUSPITA WARDHANI**

**NIM 135120600111012**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Politik pada tanggal 19  
Oktober 2017

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji

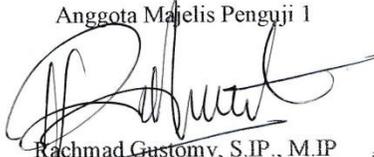
Sekretaris Majelis Penguji

  
Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev  
NIP. 2014 058609211 2001

  
Barqah Prantama, S.AP., M.AP  
NIP.

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2

  
Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP  
NIP. 1981 0825 2015 041001

  
Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., M.A  
NIP. -

**Malang, 10 November 2017**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Prof. Dr. Umi Lodgdo, SE., M.Si., Ak.  
NIP. 1969 08 14 1994 02 1001



## PERNYATAAN

Nama: Vincentia Retno Puspita Wardhani

NIM: 135120600111012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Analisis Dampak Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly di Kota Surabaya Jangka Tahun 2016** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut

Malang, 10 November 2017

Yang memberi pernyataan



**Vincentia Retno Puspita Wardhani**  
NIM. 135120600111012

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada Ibu Agnes Ana Suprpti dan Ayah Tris Waryanto. Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan*

*Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu maaf tercurah.*

*Skripsi ini kupersembahkan.*

**~ Vincentia Retno P Wardhani ~**



## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan. Rasa syukur dan bahagia penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus, karena dengan kuasa dan ijin-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **Analisis Dampak Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly di Kota Surabaya Jangka Tahun 2016**, yang disusun oleh peneliti untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Minat Utama Reformasi Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.

Pada proses pembuatan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan yang diberikan oleh orang sekitar yang begitu berarti bagi penulis. Maka dari itu, sebagai bentuk penghargaan bagi mereka, penulis juga menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

*Pertama*, Kedua orang tua yang teramat penulis cintai dan hormati. Ibu Agnes Ana Suprapti, terimakasih untuk doa yang selalu engkau hanturkan, terimakasih untuk selalu mengingatkan dan memberikan semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Bapak Tris Waryanto, terimakasih untuk doa dan untuk setiap peluh dan tetesan keringat yang kau keluarkan dalam perjuanganmu mencari nafkah untuk keluarga terkhusus untuk mendukung penulis tidak kekurangan apapun dalam menyelesaikan masa studi. Dan juga kakak penulis Elisabeth Ajeng yang selalu mengingatkan untuk cepat selesai studi serta membantu penulis dalam menyalurkan ide-ide dalam skripsi penulis dan kembali berkumpul bercanda tawa di rumah serta mas Setiadi Perwira Jati yang senantiasa membantu dan menyemangati penulis hingga bersedia membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi penulis.

*Kedua*, Rachmad Gustomy, S.IP.,M.IP. Dosen pembimbing pertama yang amat luar biasa hebat. Dosen yang selalu memberikan penulis semangat dan keberanian tidak hanya dalam menulis namun juga berinteraksi di kehidupan sosial. Dosen yang selalu mendengarkan keluh kesah serta dan memecahkan setiap kebuntuan dalam proses penulisan. Meskipun banyak mahasiswa yang mengatakan

beliau menyeramkan terutama saat menjadi dosen penguji namun di mata penulis beliau adalah dosen yang sekaligus bisa bersahabat dengan mahasiswanya. Terimakasih untuk selalu memberikan bantuan, masukan serta ilmu yang bermanfaat bagi penulisan skripsi agar lebih sempurna.

*Ketiga*, Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., M.A Dosen pembimbing kedua yang lembut namun selalu bisa memberikan masukan tegas dan cerdas sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan lebih baik. Begitu banyak saran dan masukan yang diberikan beliau demi kesempurnaan skripsi ini.

*Keempat*, terimakasih kepada penguji pertama Ratnaningsih Damayanti, S.IP.,M.Ec.Dev. dan penguji kedua Barqah Prantama S.AP., M.AP Penguji yang aktif dapat mendukung sepenuhnya penyusunan skripsi ini. Segala ide, saran dan kritikan yang membangun membuat penulis belajar untuk selalu memperbaiki tulisan agar lebih baik lagi.

*Kelima*, para narasumber yang teramat membantu penulis dalam pemenuhan data yang dapat mendukung penyusunan skripsi ini. Di antaranya, pak Lurah kecamatan Sawahan serta seluruh narasumber yang membantu penulis dalam proses pengumpulan data yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

*Keenam*, kepada Leonard Eduard Caesar Tulenan. Seseorang yang begitu spesial dan selalu menemani panas teriknya saat penelitian dan selalu memberi senyum di kala lelah menghadapi drama skripsi, terimakasih untuk kesetiaan, pengertian dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis mampu tidak terlambat dalam menyelesaikan masa studi.

*Kedelapan*, terimakasih Arlita Dian Pratiwi, Marini Elshabrina, dan Dewi Qomarina terimakasih atas dukungan dan motivasi terhadap penulis agar penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi dan juga terimakasih waktu kalian dalam menemani penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi.

*Kesembilan*, terima kasih juga sahabat terkasih Erdina Novita Sari dan Rahadiyan Kelviandi Saputra yang selalu memberi support serta selalu ada dikala sedih dan senang.

Dan yang terakhir, teman-teman terbaik di Ilmu Pemerintahan FISIP UB angkatan 2013 terimakasih untuk menjadi teman seperjuangan selama menempuh bangku perkuliahan semoga kita bisa bersama-sama menjadi orang yang membanggakan.

Walaupun penulis mendapatkan banyak dukungan namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Malang, 10 November 2017

**Penulis**

**ABSTRAK**

**Vincentia Retno Puspita Wardhani, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, 2017. Analisis Dampak Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly Di Kota Surabaya Jangka Tahun 2016. Tim pembimbing: Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP dan Ahmad Zaki Fadlur Rohman S.IP., M.A**

Kelurahan Putat Jaya merupakan bagian dari Kecamatan Sawahan di Kota Surabaya. Kelurahan Putat Jaya yang terkenal dengan lokalisasi dolly ini membuat Tri Rismaharini membuat suatu kebijakan yakni menutup lokalisasi dolly. Kebijakan yang di implementasikan oleh Pemerintah Daerah tentu menimbulkan dampak yang di rasakan oleh masyarakat terkait. Dampak yang terjadi menjadi dampak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penutupan lokalisasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi dalam jangka tahun 2016. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan pedoman wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penutupan lokalisasi dolly, kondisi sosial masyarakat mengalami perubahan dalam hal mata pencaharian. Kondisi ekonomi berdampak pada turunnya tingkat pendapatan yang dulunya bergabung dalam aktivitas bisnis prostitusi. Pendidikan yang rendah, membuat masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan yang diluar bidang bisnis prostitusi, banyak dari mantan pelaku yang beralih menjadi wirausaha dan juga banyak yang keluar dari kawasan lokalisasi dolly.

**Kata Kunci: Dampak, Kebijakan, Prostitusi**

**ABSTRACT**

**Vincentia Retno Puspita Wardhani, Governmental Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Brawijaya Malang, 2017. Analysis of Post-Closure Impact of Dolly Localization in Surabaya City in 2016. Supervisor Team: Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP and Ahmad Zaki Fadlur Rohman S.IP., MA**

Putat Jaya is part of Sawahan district in Surabaya city. Putat Jaya which is known as Dolly localization urge Tri Rismaharini makes a policy to close Dolly localization. The implemented policy of the Regional Government has an impact to the related community. The impacts occur to be desired and undesirable effects. The purpose of this study is to determine the impact of closing localization on social and economic condition in 2016. This research is qualitative research by using descriptive analysis. The data collected in this study was obtained using interview guide, documentation and observation. The results of this study indicate that the closure of dolly localization lead the social condition of the community changed in terms of livelihoods. Economic conditions have an impact on the decline income levels that formerly joined in prostitution business activities. The low of education of community contributes to find better jobs. Yet, some of the former actors turn to be entrepreneurs and some of them decide to come out from Dolly localization area.

**Keywords: Impact, Policy, Prostitution**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR TABEL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENDAHULUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Studi Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Kebijakan ( <i>Policy</i> ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Pengertian Kebijakan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 Proses Kebijakan Publik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Dampak Kebijakan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Analisis Dampak Sosial (ADS).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.1 Karakteristik Analisis Dampak Sosial (ADS).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.2 Langkah-Langkah Analisis Dampak Sosial.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.5 Alur Pikir Temuan.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III**.....**Error! Bookmark not defined.**

**METODE PENELITIAN** .....**Error! Bookmark not defined.**

3.1 Jenis Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

3.2 Fokus Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

3.3 Lokasi Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

3.4 Teknik Penentuan Informan .....**Error! Bookmark not defined.**

3.5 Teknik Pengumpulan Data .....**Error! Bookmark not defined.**

3.5.1 Observasi (Pengamatan) .....**Error! Bookmark not defined.**

3.5.2 Wawancara.....**Error! Bookmark not defined.**

3.5.3 Dokumentasi .....**Error! Bookmark not defined.**

3.6 Sumber Data .....**Error! Bookmark not defined.**

3.6.1 Data primer .....**Error! Bookmark not defined.**

3.6.2 Data Sekunder.....**Error! Bookmark not defined.**

3.7 Teknik Analisis Data .....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV** .....**Error! Bookmark not defined.**

**GAMBARAN UMUM LOKALISASI DOLLY** ....**Error! Bookmark not defined.**

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Putat Jaya .**Error! Bookmark not defined.**

4.1.1 Kondisi Geografis .....**Error! Bookmark not defined.**

4.1.2 Kondisi Ekonomi Masyarakat.....**Error! Bookmark not defined.**

4.1.3 Kondisi Sosial Masyarakat .....**Error! Bookmark not defined.**

4.2 Gambaran Sejarah dan Kebijakan Dolly .**Error! Bookmark not defined.**

4.2.1 Awal Kemunculan Lokalisasi Dolly .....**Error! Bookmark not defined.**

4.2.2 Letak dan Kondisi Geografis Kawasan Lokalisasi Dolly ..... **Error! Bookmark not defined.**

**Bookmark not defined.**

4.2.4 Dasar Hukum Penutupan Dolly ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.3 Gerakan Melukis Harapan ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V.....Error! Bookmark not defined.**

**ANALISIS DAMPAK PASCA PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY  
TERHADAP SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT TERDAMPAK**

.....**Error! Bookmark not defined.**

5.1 Dampak Individual ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.2 Dampak Operasional ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.3 Dampak pada Masyarakat ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.4 Dampak pada Lembaga dan Sistem Sosial..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB VI.....Error! Bookmark not defined.**

**PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.**

6.1 Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

6.2 Rekomendasi ..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA .....Error! Bookmark not defined.**

**LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Persebaran Lokalisasi Dolly .....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 2 Sepeda dan Kerbau Putih Bang Jarwo ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 3 Tempe Bang Jarwo dan Nugget Tempe ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 4 Kampung Samijali.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 5 Keripik Samijali .....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 6 Kampung Orumy.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 7 Minuman Orumy Rasa Leci .....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 1 Wisma yang Dibeli Pemerintah.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 2 Dolly Saiki Point .....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 3 Tampak Dalam Dolly Saiki Point .....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 4 Wisma Barbara yang di beli oleh Pemerintah. **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 5 Wisma yang dibeli oleh Pemerintah..**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 6 Salah Satu Rumah Kost sebagai Wisma ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 7 Salah Satu Rumah Kost.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 8 Makam Kembang Kuning tempat Lokalisasi Pasca Penutupan Dolly  
.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. 9 Salah Satu Tempat di Makam Kembang Kuning...**Error! Bookmark not defined.**

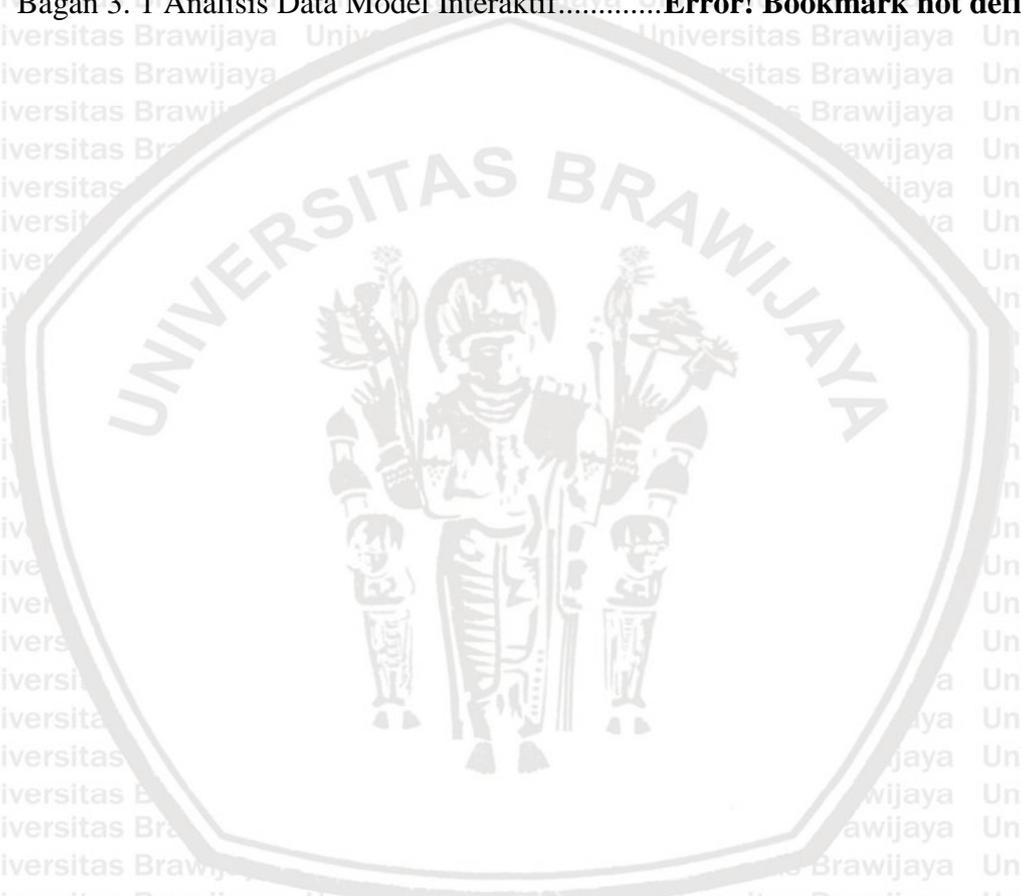
## DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Proses Kebijakan.....**Error! Bookmark not defined.**

Bagan 2. 2 Langkah-Langkah Analisis Dampak Kebijakan **Error! Bookmark not defined.**

Bagan 2. 3 Alur Pikir Temuan .....**Error! Bookmark not defined.**

Bagan 3. 1 Analisis Data Model Interaktif.....**Error! Bookmark not defined.**



## DAFTAR ISTILAH

### AIDS

: *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. *Acquired* berarti didapat, bukan keturunan. *Immune* terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. *Deficiency* berarti kekurangan. *Syndrome* atau sindrom berarti penyakit dengan kumpulan gejala, bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir.

### APBD

: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yakni rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. **APBD** ditetapkan dengan Peraturan Daerah

### BLC

: *Broadband Learning Center* merupakan program Dinas Komunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan PT. Telkom dalam penyelenggaraan bimbingan mengenai komputer dan internet secara gratis di seluruh titik-titik kota Surabaya

### BUMN

: Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

**GMH** : Gerakan Melukis Harapan yakni merupakan yayasan pemuda Surabaya yang terbentuk sebagai respon terhadap kebijakan penutupan dolly dan membina masyarakat terdampak untuk mentas dari kegiatan prostitusi.

**Government** : Pemerintah atau dimaknai sebagai institusi atau struktur dimana Badan lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu Negara

**Governance** : Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

**Lokalisasi** : Melokalisir suatu kegiatan atau mengumpulkan suatu aktivitas di suatu tempat yang di dalamnya sering terjadi pelanggaran terhadap norma sosial

**Prostitusi** : Pertukaran hubungan seksual dengan uang sebagai suatu transaksi

**PSK** : Pekerja Seks Komersial merupakan perempuan

**RT** : Rukun Tetanggabukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh [Desa](#) atau [Kelurahan](#). Rukun Tetangga dipimpin oleh



**RW** : Rukun Warga merupakan pembagian wilayah di [Indonesia](#) di bawah [Dusun](#) atau [Lingkungan](#). Rukun Warga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh [Desa](#) atau [Kelurahan](#).

**UKM** : Usaha Kecil Menengah merupakan jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk [tanah](#) dan bangunan tempat usaha.

**WTS** : Wanita Tuna Susila atau yang sering disebut PSK dimana salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dimasyarakat yaitu perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan adalah perbuatan yang mengabaikan norma, dan penyimpangan ini terjadi jika seseorang tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat.

**Mucikari** : Orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), namun selalu berhubungan dengannya.

*Human Trafficking*

: Atau yang sering disebut penjualan manusia yakni merupakan Tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau menjual manusia baik di dalam negeri ataupun antar negara melalui mekanisme paksaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya, atau menempatkan seseorang dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti prostitusi paksa, perbudakan dalam kerja domestik, belitan utang atau praktek-praktek perbudakan lainnya.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 2 Unit-Unit Sosial Terdampak ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 1 Mata Pencapaian Pokok Masyarakat Kelurahan Putat Jaya ..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel 4. 2 Jumlah WTS di Kawasan Lokalisasi Dolly ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 3 Rincian Dana Bantuan ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 4 Data eksWisma yang Sudah di Beli PEMKOT Surabaya dan Peruntukannya ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5. 1 Dampak Individual..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5. 2 Dampak Operasional..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5. 3 Dampak pada Masyarakat..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5. 4 Dampak Pada Lembaga dan Sistem Sosial ..... **Error! Bookmark not defined.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan pasca penutupan Lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam jangka waktu tahun 2014-2016.

Peneliti dalam hal ini ingin melihat bagaimana implikasi kebijakan penutupan pada lokalisasi yang sudah ada sejak tahun kurang lebih 1970 tahun dan melihat respon apa yang diberikan oleh pihak yang terlibat hingga akhirnya menuntut adanya perubahan sosial yang sangat cepat. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu aktivitas yang dijalani oleh sebagian komunitas tertentu. Dimana objeknya adalah wanita. Kegiatan ini merupakan bentuk gejala sosial yang menyimpang dari norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu, prostitusi mempunyai akibat bagi masyarakat sekitar, terutama bagi kesehatan, ekonomi, dan moral.

Prostitusi menjadi sebuah profesi utama pada komunitasnya berupa tingkah laku yang bebas tanpa kendali, karena adanya pelampiasan nafsu dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batasan kesopanan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan industri serta kebudayaan manusia, turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Kegiatan ini menjadi sebuah masalah sosial yang pasti ada pada semua negara.

Pertumbuhan sejarah pelacuran di Indonesia tidak terlepas dari peradaban bangsa Indonesia sendiri, dimana pada masa lalu bangsa Indonesia adalah bangsa

dengan berbagai kerajaan.<sup>1</sup> Kekuasaan Raja pada saat itu tidak terlepas hanya menguasai pemerintahan, tetapi semua yang ada didalamnya termasuk rakyat. Dimana pada saat itu Raja berkuasa penuh atas perempuan yang diinginkannya dan dijadikan selir. Penyebaran-penyebaran yang dilakukan di berbagai daerah pada masa penjajahan mengakibatkan para Wanita Tuna Susila (WTS) tetap melakukan aktivitas pelacuran. Tidak heran jika prostitusi menjamur di Indonesia dan bukan lagi terdapat di kota-kota besar, tetapi juga di desa dengan latar belakang dan perkembangan yang berbeda pula. Dengan demikian, Prostitusi atau pelacuran menjadi masalah yang unik dan cukup menarik untuk dibahas karena status hukumnya belum jelas hingga saat ini, namun keberadannya mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah. Tempat pelacuran pun yang terlokalisir dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan Departemen Sosial yang pengawasan keamanannya dibawah aparat pemerintahan dan diizinkan melalui prosedur yang di tentukan oleh Pemda tersebut.

Terlihat, Kota Surabaya merupakan kota besar yang menjadi salah satu wilayah tujuan urbanisasi. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk semakin meningkat. Masyarakat melakukan urbanisasi bertujuan untuk mendapat kehidupan yang layak dengan mencari pekerjaan. Namun, terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi sebuah pemicu meningkatnya angka pengangguran. Lambatnya proses pembangunan, terutama pada sektor ekonomi menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran yang semakin meningkat.

---

<sup>1</sup> Abu Al- Ghigari. 2004. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung: Muhajid Press. Hlm. 99

Pengangguran ini dikarenakan jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Dari pengangguran tersebut menjadi masalah dalam perekonomian, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga menimbulkan masalah-masalah sosial. Menurut Lislle, masalah sosial adalah suatu kondisi yang mempunyai pengaruh kepada kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, oleh karena itu dirasakan perlunya untuk diatasi atau diperbaiki.<sup>2</sup>

Kota Surabaya menjadi salah satu masalah sosial yang melenceng dari norma yang terdapat di masyarakat dan mendesak untuk segera ditangani yakni meluasnya praktik pelacuran. Tahun 1884, pelacuran di kota-kota besar muncul bersamaan dengan pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa seperti Batavia, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta, dan Surabaya. Perkembangan jalur transportasi baru, pembangunan hotel/penginapan, munculnya pemukiman baru, dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan seksual para pekerja, lambat laun menyebabkan di sepanjang lintasan jalur kereta api terutama sekitar stasiun mulai muncul wanita penghibur yang kemudian diikuti oleh tumbuhnya kompleks lokalisasi.<sup>3</sup>

Prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat. Pelacuran dengan berbagai model serta versinya merupakan bisnis yang abadi

<sup>2</sup> Solaeman Munandar, 2005. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama. Hlm. 5

<sup>3</sup> Terence dkk. 1997. *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 70

sepanjang zaman.<sup>4</sup> Hal tersebut disebabkan karena pelacuran merupakan layanan jasa seks yang tetap dan selalu dicari oleh masyarakat yang merasa kurang terpenuhi kebutuhan seksualnya. Prostitusi juga merupakan suatu komunitas dimana terdapat adanya organisasi yang terstruktur untuk menggerakkan berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Namun, pelacuran juga merupakan suatu gejala penyakit sosial yang harus terus menerus dicarikan upaya penanganannya guna mengurangnya.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, dunia pelacuran maupun prostitusi mampu memberikan jawaban dari permasalahan-permasalahan mulai dari ekonomi hingga seksual yang telah dialami banyak orang.

Fenomena prostitusi hingga kini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, baik upaya preventif maupun upaya yang bersifat represif untuk menanggulangi masalah prostitusi belum menampakkan hasil maksimal hingga kini. Belum adanya satu program terpadu dari pemerintah dalam mengatasi masalah fenomena prostitusi ini. Hal ini ditandai dengan meningkatnya bisnis prostitusi ini setiap tahunnya, begitu juga di Surabaya. Praktik prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan hingga praktik prostitusi terselubung.

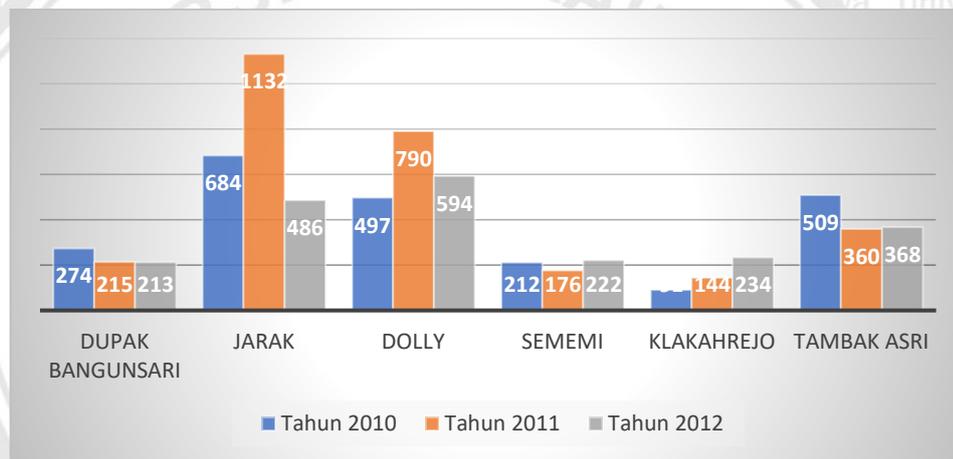
Surabaya sebagai kota metropolitan kedua yang memiliki keragaman sosial-budaya yang lahir dan hidup didalamnya, sehingga menjadi kota dengan aneka

<sup>4</sup> Hull, Terence H., Enang Sulistiyaningsih dan Gavin W. Jones. 1997. *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta : PT. Penerbit Swadaya. Hlm. IX

<sup>5</sup> Kurniawan. 2010. *Pelacuran di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosiliasi Silir Tahun 1998-2006*. Surakarta: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. Hlm. 93

wajah. Selain itu, Surabaya dikenal juga sebagai kota industri, kota seribu taman, kota pahlawan maupun kota yang memiliki 6 titik lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Adapun 6 (enam) titik tersebut diantaranya Dolly, Dupak Bangunsari, Tambak Asri, Klakah Rejo, Sememi Jaya (Moroseneng), dan Jarak. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Surabaya, lokalisasi Dolly-Jarak merupakan tempat prostitusi yang jumlah Wanita Tuna Susila (WTS) terbanyak dari 6 lokalisasi di Surabaya.

**Grafik 1. 1 Data Jumlah WTS di Kota Surabaya tahun 2010-2012**



Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, Tahun 2013

Hadirnya lokalisasi ‘Dolly’ bukan sekedar warisan sejarah sejak zaman penjajahan, melainkan menyimpan banyak sudut pandang diantaranya patologi-biologis gender, pasar seksualitas yang mengarah pada kapitalisasi prostitusi, terlebih masuk dalam persoalan ekonomi. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dan sebagai jalur perdagangan Indonesia Timur, Surabaya pada saat penjajahan Belanda berkembang sebagai kota Pelabuhan terkemuka, pangkalan laut, pangkalan para tentara garnisun dan sebagai daerah tujuan akhir lintasan kereta api. Kehadiran prostitusi di Surabaya tidak terlepas dari aktifitas sebagai jalur

perdagangan utama di Indonesia Timur. Akibat dari perkembangan kota ini, pada abad ke-19 Surabaya menjadi terkenal karena aktivitas pelacurannya.<sup>6</sup> Pada kegiatan perlintasan laut tersebut, menggambarkan banyaknya orang yang singgah dengan tujuan untuk melancarkan bisnisnya dalam berdagang. Dahulu, singgahnya para pelaut bukan hanya untuk urusan bisnis dagang saja, namun juga pengalaman seksual atas daerah yang disinggahinya. Lalu, pengalaman seksual yang didapatkan tersebut menjadi penentu banyaknya para pelaut yang singgah.<sup>7</sup>

Berdasarkan catatan resmi sejarah Kota Surabaya tahun 1864 terdapat 228 perempuan yang berprofesi sebagai pelacur dibawah pengawasan 18 pemilik rumah bordil.<sup>8</sup> Dari situlah awal perkembangan bisnis prostitusi di Surabaya. Mantan Walikota Surabaya, R. Soekotjo pada tahun 1970 melakukan kebijakan pengusuran warga kali Jagir dan direlokasi ke sebuah lokasi yang dekat dengan makam Tionghoa bernama Kembang Kuning di Kawasan Putat Jaya. Berdasarkan rencana tata kota Pemerintah setempat maka diputuskan untuk memindahkan pemukiman dan mengizinkan pembangunan perumahan di lokasi tersebut. Dan pada saat itu, seseorang yang membeli pemukiman tersebut pertama kalinya adalah Ny. Dolly dan membangun rumah untuk industri seks.<sup>9</sup> Lokalisasi Dolly merupakan salah satu tempat yang dimana menjadi lahan prostitusi yang tumbuh subur dan berkembang.

Gang Dolly juga menjadi lokalisasi tertua di Indonesia dan juga dilegalkan pula

<sup>6</sup> Op.cit. *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya* Hlm. 7

<sup>7</sup> Bachtiar dan Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*. Yogyakarta: Penerbit PINUS. Hlm. 7

<sup>8</sup> Op.cit. *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya* Hlm. 8

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm. 8

oleh Pemerintah Daerah. Masih banyak lika-liku lokalisasi Dolly, serta sejauh mana usaha Pemerintah untuk mengatasi praktik prostitusi di Gang Dolly.<sup>10</sup>

Keterbatasan kemampuan untuk dapat bekerja sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, mengharuskan para wanita yang menjajakan tubuhnya harus melakoni peran sebagai Wanita Tuna Susila (WTS). Hal ini dilakukan sebagian besar karena terdesak dengan tuntutan ekonomi agar dapat bertahan hidup dan menghidupi keluarganya. Praktik prostitusi merupakan bentuk masalah sosial yang muncul akibat adanya Wanita Tuna Susila. Secara legal, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 23/HUK/96 yang menyebut pelacur dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS).

Keberadaan lokalisasi Dolly telah memunculkan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat seperti pedagang, tukang becak, tukang ojek, pembantu atau tukang cuci pakaian, tukang pijat, dan penjual jamu. Sehingga sebagian masyarakat terutama yang mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan WTS tersebut memiliki persepsi positif terhadap WTS di lokalisasi. Adanya lokalisasi bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena rata-rata keluarga yang bekerja dilokalisasi berasal dari golongan ekonomi rendah, begitupun juga masyarakat sekitar lokalisasi.

Sebagian masyarakat memandang lokalisasi memiliki bentuk yang positif yaitu meningkatkan perekonomian atau pendapatan. Oleh sebab itu, bagi masyarakat keberadaan lokalisasi tetap dikatakan sebagai tempat yang bermakna

<sup>10</sup> Ashadi Prawancana. 2000. *Krisna Menyusuri Remang-Remang*. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 55

negatif sehingga harus ditutup. Ada satu hal yang belum pernah disadari oleh semua masyarakat yang kontra, bahwa sejarah telah membuktikan bahwa prostitusi tidak dapat diberantas dan sulit untuk ditanggulangi atau ditolerir dan akan berdampak negatif lagi jika prostitusi ditekan maka akan mengakibatkan pertumbuhan prostitusi baru.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan satu dasar Pemerintah Kota Surabaya dalam menutup lokalisasi Dolly. Pada tanggal 18 Juni 2014, lokalisasi Dolly resmi di tutup oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Keberanian Tri Rismaharini untuk mengeluarkan kebijakan penutupan lokalisasi di Surabaya dan mencabut izin resmi mengenai penggunaan bangunan untuk kegiatan praktik asusila cukup fenomenal. Sebab, lokalisasi Dolly yang sudah berusia kurang lebih 100 tahun ini bukan suatu persoalan yang mudah karena pasti akan ada reaksi sosial dari masyarakat terdampak. Dalam Perda ini Pemerintah Melarang Seluruh tempat/Bangunan yang dijadikan lokasi prostitusi. Tri Risma menyatakan bahwa lokalisasi itu sudah rata dengan tanah dan berharap sudah tidak ada lagi bisnis lendir di Kota Pahlawan. Gang Dolly telah ada sejak zaman orde lama tepatnya tahun 1967 dan tidak ada seorang walikota Surabaya sebelumnya yang berani menutup lokalisasi ini. Pemerintah Kota Surabaya berjanji untuk memberikan kompensasi pasca penutupan lokalisasi. Sebab, lokalisasi 'Dolly' merupakan tempat mereka untuk menunjang perekonomiannya. Risma mengungkapkan bahwa Alasannya, realitas sosial yang ditangkap di lokalisasi tersebut membuat anak-anak kerap

menjadi korban dan membuat anak-anak terpengaruh hingga menjadi pelanggan.

Banyak perempuan dibawah umur yang dipekerjakan, padahal masih dalam usia sekolah.

Banyak kalangan yang menilai bahwa penutupan lokalisasi hanya pencapaian program Pemkot Surabaya, tanpa mempertimbangkan permasalahan sebenarnya yakni lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan angkatan kerja, tidak akan pernah selesai hanya dengan menutup lokalisasi. Bahkan ketidakmampuan dari para Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih baik akan menyebabkan kegagalan pencapaian positif dari kebijakan dari Pemkot Surabaya ini. Terlebih juga masyarakat sekitar yang juga menggantungkan sumber pendapatannya dari lokalisasi ini. Selain menutup mata pencaharian wanita harapan, pedagang makanan dan pemilik yang berada di daerah maupun di sekitar lokalisasi juga merasakan dampak sehingga harus menutup pula usaha mereka karena sepi pembeli.

Penutupan lokalisasi Dolly menghabiskan biaya Rp. 25,5 miliar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanggung beban sebesar Rp. 1,5 miliar dan Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan dana sebesar Rp. 16 miliar ditambah dana bantuan dari Kementerian Sosial sebesar 8 miliar. Pada pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly, Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 7.317.450 untuk 1.449 penghuni lokalisasi yang terdiri dari mucikari, psk, pemilik wisma, Pekerja Seks Komersial (PSK) yang rata-rata berasal dari luar Surabaya, dipulangkan ke tempat asalnya dengan diberi bantuan individu, transport dan biaya

hidup selama 90 hari sebesar Rp. 5.050.000,- per orang.<sup>11</sup> Warga sekitar dan segala macam profesi yang ada di dalam gang Dolly merasa terancam kesejahteraan perekonomian dan sosial setelah Walikota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya menutup lokalisasi ‘Dolly’ tersebut. Pemkot juga membangun sentra perdagangan yang bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari pendapatan rumah tangga mereka dan mereka dilatih kemampuannya agar bisa berdikari sendiri. “itu adalah upaya Pemkot, sebagai solusi agar warga tetap bisa mencari rezeki meski Gang Dolly dan Jarak ditutup. Kita tidak akan membiarkan penutupan tanpa solusi. Kita juga tetap memberikan pesangon sampai mereka benar-benar bisa mandiri,” tandas Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser kepada merdeka.com<sup>12</sup>

Lokalisasi ‘Dolly’ di Kecamatan Sawahan Surabaya merupakan salah satu kawasan yang ramai oleh perantau maupun urbanisan yang mencari pekerjaan. Tidak sedikit dari mereka yang merantau dan tidak mendapat pekerjaan beralih ke lokalisasi sebagai ladang untuk memperoleh penghasilan meskipun lokalisasi jelas dipandang tidak bermartabat untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Lokalisasi ‘Dolly’ sering disebut Gang Ndolly yang merupakan lokalisasi terbesar dari 6 titik lokalisasi di Surabaya.

Kehidupan masyarakat di wilayah lokalisasi disadari atau tidak mendapat pengaruh langsung dari keberadaan lokalisasi tersebut. Misalnya saja pengaruh besar penyerapan tenaga kerja sektor, seperti pedagang makanan yang berkeliling

<sup>11</sup><http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/40225> diakses pada 16 Februari 2017 pukul 21.46 WIB

<sup>12</sup><http://www.merdeka.com/peristiwa/pasca-penutupan-gang-dolly-masih-bisakah-warga-hidup.html> (akses pada 13 Agustus 2016, 15.05)

menjajakan makanannya, pedagang makanan dan minuman yang menetap, tukang parkir, penjual minuman dan makanan, salon kecantikan, tempat-tempat spa beserta panti pijatnya, waiters yang mengantarkan minuman kepada pelanggan, bisnis laundry pakaian, toko-toko kelontong, dan lain-lain. Banyaknya aktifitas ekonomi yang ada, secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan prostitusi yang ada disana.

Pasca penutupan lokalisasi, Walikota Surabaya menginstruksikan agar dibentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bisa dilakukan oleh warga agar memiliki sumber mata pencaharian yang baru. Selain itu juga diberi pelatihan oleh BAPEMAS KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana) Kota Surabaya seperti memasak, menjahit bahkan membuat. Awalnya BAPEMAS KB Kota Surabaya merubah pola pikir warga terdampak ini yang hanya bergantung dari adanya lokalisasi Dolly menjadi mau bekerja dan berusaha untuk dapat menghidupi keluarganya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana (BAPEMAS KB) Kota Surabaya berfokus untuk bagaimana memberdayakan warga terdampak lokalisasi untuk membangun jiwa kewirausahaan dengan pemberian pelatihan dan keterampilan dan akhirnya dapat membangun lagi perekonomiannya secara mandiri. Setelah warga terdampak ini mandiri, nantinya diharapkan warga terdampak ini dapat memproduksi barang atau jasa sehingga dapat menciptakan pekerjaan yang baru.

Setelah 2 tahun, pasca penutupan lokalisasi 'Dolly' ini atau hingga 2016, segala program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, LSM maupun CSR dari BUMN atau perusahaan yang telah bekerjasama

guna memberdayakan masyarakat, nampaknya belum ada respon yang signifikan dari masyarakat terdampak Lokalisasi 'Dolly' yang terdampak penutupan.

Permasalahan-permasalahan pun muncul pasca penutupan lokalisasi tersebut.

Tidak semua warga terdampak penutupan lokalisasi ini pro dengan program-program pemberdayaan yang diberikan oleh BAPEMAS KB Kota Surabaya.

Penutupan lokalisasi 'Dolly' memunculkan dampak negatif baru yakni banyaknya pengangguran serta menurunnya pendapatan warga terdampak.

Pemberian kompensasi dan keahlian tambahan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Surabaya dinilai tidak menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga mereka. Penolakan yang dilakukan oleh warga yang kontra dengan penutupan lokalisasi tidak hanya dengan protes tetapi juga dengan memblokir atau memboikot program pelatihan yang sedang dilaksanakan oleh BAPEMAS KB Kota Surabaya. Program pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya belum mampu mengganti rugi dampak yang terjadi pasca penutupan lokalisasi. Khususnya bagi warga terdampak yang menolak program-program dari BAPEMAS KB Kota Surabaya, LSM, maupun Diskominfo Kota Surabaya yang telah melaksanakan program pemberdayaan sebagai upaya pengganti kerugian pihak terdampak dari penutupan lokalisasi Dolly dengan memberikan pelatihan dan keterampilan.

Penutupan lokalisasi Dolly oleh Pemkot Surabaya ternyata membawa konsekuensi tersendiri, yaitu praktik prostitusi 'liar'. Hingga saat ini, sudah ada beberapa program pemberdayaan dari pihak terkait yang telah dilaksanakan di lokalisasi 'Dolly' diantaranya Usaha Kecil Menengah (UMKM) dimana hingga

2016, BAPEMAS KB Kota Surabaya mengembangkan batik tulis dan sepatu.

Namun, juga banyak kendala dalam pengembangan UMKM, kurangnya minat warga terdampak terhadap pelaksanaan UMKM.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya bekerjasama dengan PT. TELKOM Divre V Regional Jawa Timur, mendirikan *Broadband Learning Center* (BLC), program pelatihan Teknologi Informasi yang terletak di ex. Wisma Barbara (salah satu wisma terbesar di lokalisasi 'Dolly'). Diskominfo beserta PT. Telkom mendirikan BLC di wisma Barbara bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan kepada warga sekitar khususnya anak-anak yang masih awam terhadap internet serta warga UMKM yang ingin belajar tentang pemasaran produk UMKM dengan menggunakan internet. Program BLC ini tidak dipungut biaya, namun meskipun gratis (tidak dipungut biaya) program BLC ini juga belum mendapatkan respon yang signifikan terhadap warga terdampak penutupan Lokalisasi 'Dolly'.

Pemerintah Kota Surabaya akan menjadikan 'Dolly' bersama Yayasan Gerakan Melukis Harapan (GMH) bekerja sama untuk menjadikan Lokalisasi 'Dolly' di kelurahan Putat Jaya sebagai kampung eduwisata yang bersifat tematik, mengandung nuansa sesuai dengan tema yang melekat. Pengunjung akan diajak melihat, merasakan dan bahkan memperoleh pengalaman menarik di setiap wahana edukasi tersebut. Kampung 'Dolly' pun sekarang diubah menjadi kampung warna-warni yang di lakukan oleh GMH sebagai bentuk komunikasi bahwa 'Dolly' tidak menyeramkan. Hal ini diharapkan untuk bisa mengubah pola pikir warga terdampak untuk tidak lagi berdiam dalam kehidupan gelap dulu. Gerakan Melukis Harapan

(GMH) merupakan sebuah yayasan yang didirikan tahun 2014 sebagai respon penutupan lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya. Gerakan ini didirikan menyadari bahwa permasalahan lokalisasi Dolly tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Selain itu, pada kenyataannya pasca penutupan lokalisasi Dolly yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, ternyata praktik bisnis prostitusi pada eks-lokalisasi Dolly masih tetap berjalan secara sembunyi hingga saat ini.<sup>13</sup> Transaksi dilakukan mulai dari melalui pintu belakang wisma Dolly yang telah ditutup, hingga memanfaatkan teknologi canggih saat ini seperti melalui smartphone. Sistem layanan yang digunakan yakni via online dengan memanfaatkan media sosial. Dengan adanya kebijakan tentang larangan praktik asusila oleh Pemerintah Surabaya, apakah penutupan lokalisasi Dolly menimbulkan dampak yang diharapkan atau tidak diharapkan. Melihat kegiatan pasca penutupan lokalisasi Dolly ini, peneliti tertarik untuk membahas Dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya mengenai penutupan lokalisasi Dolly ini.

Maka, berdasarkan alasan-alasan diatas itulah yang kemudian penulis memilih tema penelitian dengan judul: **Analisis Dampak Kebijakan Penutupan Lokalisasi Dolly di Kota Surabaya Jangka Waktu Tahun 2016.**

<sup>13</sup> Wisma New Borneo di Gang Dolly digerebek, 3 Pekerja Seks ditangkap”.  
<http://regional.kompas.com/read/2015/08/26/09401371/Wisma.New.Borneo.di.Gang.Dolly.Digerebek.3.Pekerja.Seks.Ditangkap> diakses pada 5 Maret 2017 pukul 01.22 WIB

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut :

Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan penutupan lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam jangka tahun 2016?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak individual pasca penutupan lokalisasi dolly terhadap masyarakat terdampak, dengan kriteria dampak ini digunakan untuk melihat dampak yang di rasakan secara individu/perseorangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak operasional pasca penutupan lokalisasi dolly terhadap masyarakat terdampak, dengan kriteria dampak ini digunakan untuk melihat dampak operasional yang menjadi sumber dampak bagi wilayah sekitar.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak masyarakat, dengan kriteria dampak ini digunakan untuk melihat dampak yang terjadi di dalam masyarakat terdampak pasca penutupan lokalisasi dolly.
4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial, dengan kriteria dampak ini digunakan melihat kesadaran kolektif masyarakat dan solidaritas sosial pasca penutupan lokalisasi dolly.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dibagi ke dalam dua manfaat yakni akademis dan manfaat praktis

1. Memperoleh hasil analisis dampak dari aspek dampak individual terhadap kebijakan penutupan lokalisasi dolly, dengan mengetahui dari segi biologis, psikologis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosialnya.
2. Memperoleh hasil analisis dampak dari aspek dampak operasional yakni sumber dari dampak yang terjadi, dilihat dari dampak secara langsung maupun tidak langsung.
3. Memperoleh hasil analisis dampak dari aspek dampak pada masyarakat, dilihat dari bagaimana kesejahteraan dalam masyarakat yang terjadi setelah penutupan lokalisasi dolly
4. Memperoleh hasil analisis dampak dari aspek dampak pada lembaga dan sistem sosial, dilihat dari kesadaran masyarakat dan bagaimana solidaritas sosialnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang didalamnya memuat tiga aspek penting yang berhubungan erat dengan penelitian yang dilakukan. Pertama, tentang penelitian terdahulu, penelitian terdahulu digunakan sebagai perbandingan yang relevan sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Kedua, akan membahas tentang teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mendukung penelitian yang digunakan. Ketiga, pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan tentang alur pikir yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan teori yang digunakan.

#### 2.1 Studi Terdahulu

Pada penelitian terdahulu dijelaskan mengenai penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini. Berdasarkan dari beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan evaluasi dampak kebijakan. Studi literatur yang dijadikan bahan penelitian terdahulu ini diambil dari permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Matriks penelitian terdahulu peneliti akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No.	Judul	Metode	Pembahasan
1.	Dampak Sosial Ekonomi Penutupan Lokalisasi terhadap Masyarakat Puger Tahun 2007-2014 (alex Yayan S, 2015)	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena adanya ketimpangan struktur sosial menyebabkan “pasar raya seks”</li> <li>• Mengkaji disparitas pendapatan dengan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>menggunakan analisis Marxis terhadap dampak ekonomi pasca penutupan lokalisasi</li> <li>• Terjadi penyimpangan seksual dalam masyarakat pasca penutupan</li> </ul>
2.	Perubahan Sosial Ekonomi Sekitar Lokalisasi Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Pasca Penutupan Lokalisasi (Studi Multi Kasus Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Lokalisasi Tambak Asri Surabaya) Siti Mahmudah, 2015	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi penurunan jumlah penduduk pasca penutupan.</li> <li>• Adanya perubahan struktur yang terjadi pasca penutupan lokalisasi</li> </ul>
3.	Dampak kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 terkait Penutupan Lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya Defrita Pasiska, 2016	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji dampak yang ditimbulkan menggunakan dimensi dampak menurut Thomas R Dye</li> <li>•</li> </ul>
4.	Post Dolly (Studi Dinamika Peran, Respon dan Poses Adaptasi Masyarakat Lokalisasi Setelah Kebijakan Penutupan di Surabaya) Ismiasih Ulfiani, 2015.	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi bentuk adaptasi oleh masyarakat terdampak sebagai respon kebijakan penutupan lokalisasi</li> <li>• Adanya perubahan struktur yang berimplikasi pada perubahan sistem yang ada didalamnya</li> </ul>

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2016

Penelitian terdahulu pertama yakni berasal dari Jurnal Ilmu Sejarah yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Penutupan Lokalisasi terhadap Masyarakat Puger Tahun 2007-2014”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

kuantitatif serta menggunakan analisis Marxian, dimana disparitas pendapatan yang terlalu njomplang antara golongan kaya dan golongan miskin atau antara majikan dan pekerja pada gilirannya akan melahirkan suatu situasi aliensi.

Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa struktur sosial yang timpang akan mendorong semakin banyaknya pelacur baru yang bermuculan dan bisa menyebabkan lahirnya “pasar raya seks” di kota besar terutama di negara berkembang. Dampak yang sangat besar bagi masyarakat sekitar baik itu dampak negatif maupun positif. Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah terbukanya lapangan pekerjaan sebagai tukang cuci sera pemanfaatan lahan-lahan kosong yang tidak berguna dijadikan komplek bangunan kos-kosan dan usaha dagang warung remang. Dampak negatifnya pun sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat yaitu misalnya bagi remaja, banyaknya penyimpangan perilaku seksual yang terjadi di kalangan remaja salah satu pengaruh negatif dari adanya praktek prostitusi. Penutupan lokalisasi akan membawa perubahan bagi masyarakat. Baik perubahan pada bidang sosial maupun perubahan pada bidang ekonomi. Dampak ekonomi berupa pendapatan dan pendidikan masyarakat dan dampak sosial berupa kesehatan dan keagamaan masyarakat.

*Kedua*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Mahmudah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “*Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Lokalisasi Tambak Asri Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Pasca Penutupan Lokalisasi (Studi Multi Kasus Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Lokalisasi Tambak Asri Surabaya)*”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti

perubahan sosial yang terjadi pasca penutupan lokalisasi di kelurahan Morokrembangan. Penelitian ini menggunakan konsep perubahan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian, komposisi penduduk serta mobilitas penduduk masyarakat sebelum penutupan lokalisasi dengan setelah penutupan lokalisasi Kelurahan Morokrembangan mengalami perubahan. Tahun 2012 komposisi penduduk paling tinggi adalah perempuan, namun Tahun 2013 didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jumlah mobilitas penduduk mengalami penurunan kedatangan atau perpindahan penduduk. Adanya pula perubahan struktur, dimana terdapat kelompok masyarakat yang pro dan kontra dengan adanya lokalisasi ketika lokalisasi masih ada.

*Ketiga*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Defrita Pasiska, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya dengan judul “*Dampak kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 terkait Penutupan Lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya*”. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi dampak saat penutupan lokalisasi Dolly. Peneliti menggunakan metode kualitatif

Penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan publik menurut Thomas R Dye dengan mengevaluasi menggunakan 5 indikator yaitu dampak kebijakan bagi individu yang terlibat, dampak kebijakan bagi individu yang tidak terlibat langsung, dampak jangka pendek dan jangka panjang, biaya untuk kebijakan dan biaya tidak langsung. Dampak ekonomi dan sosial menjadi fokus dalam

penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kelompok PSK dan mucikari di Gang Dolly menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari penutupan. Banyaknya pengangguran dan juga maraknya dunia prostitusi online. Dampak jangka pendek dari penutupan lokalisasi yakni menurunnya perekonomian warga terdampak. Sedangkan dampak jangka panjang yakni menurunnya angka HIV/AIDS dan berkembangnya perekonomian lokalisasi Gang Dolly. Biaya kebijakan penutupan lokalisasi ini menggunakan dana APBD Kota Surabaya yang digunakan untuk membeli rumah-rumah prostitusi dan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Dari beberapa indikator dalam teori evaluasi kebijakan menurut Thomas R Dye, menyimpulkan bahwa dampak ekonomi dari kebijakan tersebut adalah hilangnya mata pencaharian kelompok masyarakat. Sedangkan dampak sosial yaitu munculnya prostitusi terselubung.

*Keempat*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ismiasih Wahya Ulfaini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya, yang berjudul “*Post Dolly (Studi Dinamika Peran, Respon dan Proses Adaptasi Masyarakat Lokalisasi Setelah Kebijakan Penutupan di Surabaya)*”. dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi terfokus pada masyarakat lokalisasi Dolly-Jarak pasca penutupan lokalisasi Dolly. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, memberikan gambaran serta penjelasan terkait bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Dolly sebagai respon adanya kebijakan penutupan sehingga merujuk pada pola adaptasi yang terbentuk sebagai cerminan atas adanya perubahan struktur yang juga berimplikasi pada perubahan sistem didalamnya.

Peneliti menggunakan Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan Robert King Merton untuk menganalisis segala dinamika dan respon masyarakat terdampak. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ada 3 bentuk upaya yang dilakukan oleh dua kelompok penyokong industri seks sebagai implikasi atas adanya kebijakan penutupan lokalisasi. Yang pertama yakni conformity/auxiliary jobs, mengenai pemanfaatan solusi dan diberikan oleh pemerintah berupa penyediaan lapangan kerja dalam lingkup pemerintahan dan pelatihan kemampuan berwirausaha. Yang kedua, yakni inovasi/pelaku utama industri seks, mengenai sikap apatis terhadap segala macam penanganan dampak yang diberikan oleh pemerintah dan lebih memilih menggunakan caranya sendiri untuk kepentingan ekonomi. Dan yang ketiga adalah rebellion, mengenai pemberontakan yang dilakukan untuk menolak kebijakan.

Dari keempat hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, penelitian tentang analisis dampak kebijakan penutupan lokalisasi oleh Pemerintah Kota Surabaya ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Dilihat dari segi teori beberapa penelitian sebelumnya terkait evaluasi menggunakan teori perubahan sosial atau implementasi kebijakan dan berfokus pada dampak ekonomi saja.

Namun dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana dari segi teori dalam penelitian ini menggunakan teori analisis dampak kebijakan menurut Samodra Wibawa dengan menganalisis dampak yang diharapkan (intended) dan dampak yang tidak diharapkan (unintended) dan juga analisis dampak sosial. Pemilihan teori dan indikator tersebut dipilih karena peneliti

tidak hanya ingin melihat bagaimana program itu dijalankan, namun juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan penutupan lokalisasi berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 1999 mengenai larangan Praktik Asusila.

## 2.2 Kebijakan (*Policy*)

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Carl Friedrich menyatakan bahwa,

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan<sup>1</sup>

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Dari definisi-definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda. Perbedaan timbul karena masing-masing ahli mempunyai landasan latar belakang yang berbeda pula.

Pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya menentukan bagaimana kebijakan publik yang hendak didefinisikan.<sup>2</sup>

William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Solichin A.W. 2004 Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 3

<sup>2</sup> Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI) hlm. 16

<sup>3</sup> William Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 132

Sementara itu Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai “*a project programs of goals, values, practices*” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah).<sup>4</sup> Amara Raksasapaya mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen, yaitu:<sup>5</sup>

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Dapat disimpulkan dari berbagai pengertian diatas, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam prakteknya, kata kebijakan seringkali mempunyai 2 pilihan dalam penggunaannya, yaitu kebijakan negara dan kebijakan publik. Namun, tidak ada perbedaan diantara keduanya secara substantif.

Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Heinz Eulaudan dan

<sup>4</sup> Irfan Islamy. 1984. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 15

<sup>5</sup> Ibid. Hlm 17

Kenneth Prewitt mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.<sup>6</sup> Semua kebijakan pada dasarnya mengandung asumsi mengenai apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan apa akibat yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan publik umumnya memuat suatu teori atau model tertentu yang menyiratkan adanya hubungan sebab-akibat.<sup>7</sup>

“Kebijakan juga dapat dimaksudkan untuk menunjukkan adanya usulan-usulan tertentu, baik yang dilontarkan oleh mereka yang berada diluar struktur pemerintahan (kelompok-kelompok kepentingan atau partai politik) maupun yang disampaikan oleh mereka yang berada di struktur pemerintahan semisal anggota kabinet agar dilaksanakan oleh pemerintah”.<sup>8</sup>

Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan dari pemerintah yang memberikan solusi masalah-masalah publik. Sementara pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan mandat oleh seluruh sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem.

Proses dari tahapan kebijakan publik, salah satunya yakni implementasi kebijakan publik. Tahapan dari implementasi kebijakan publik sangat penting karena bila tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan dari kebijakan tidak akan sesuai dari apa yang telah direncanakan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi dari implementasi yakni untuk

<sup>6</sup> Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 6

<sup>7</sup> Solichin Abdul Wahab. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press. Hlm. 19

<sup>8</sup> *Ibid*. Hlm. 19

membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli diatas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, dimana kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat penting karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut pendapat Mazmanian dan Sabatier kebijakan publik bukan hanya keterlibatan dan perilaku badan-badan administratif yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan akhirnya berdampak pada apa yang diharapkan (*intended*) ataupun yang tidak diharapkan (*unintended*) dari suatu program.<sup>10</sup>

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah memerlukan kebijakan publik penjelas atau sebagai peraturan pelaksanaan, misalnya Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Rangkaian implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm. 159

<sup>10</sup> Joko Widodo. 2012. *Analisis Proses Implementasi Kebijakan Publik*. Malang; Bayu Media Publishing. Hlm 87

dengan jelas, yakni dimulai dari program, kemudian ke proyek dan kegiatan.<sup>11</sup>

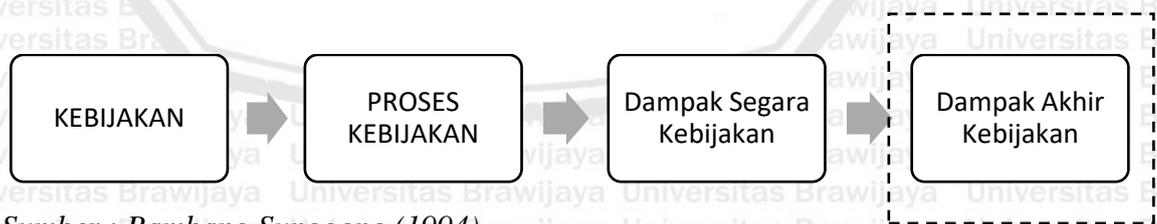
Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Implementasi kebijakan harus dilaksanakan sesuai rencana serta target yang akan dicapai oleh pembuat kebijakan.

### 2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dengan melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik dengan membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Proses implementasi kebijakan publik dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program telah dibuat dan dana juga telah dialokasikan guna pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut:

**Bagan 2. 1Proses Kebijakan**



Sumber : Bambang Sunggono (1994)

Dari skema tersebut terlihat bahwa proses implementasi dimulai dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil dari proses implementasi terdiri dari hasil

<sup>11</sup>Ibid.



kebijakan yang segera (*policy performance*). Jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, misalnya perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan (*outcome policy*). Dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan dari *policy performance*.

### 2.3 Dampak Kebijakan

Menurut Dunn, konsekuensi dibedakan menjadi 2 kebijakan yaitu *output* dan dampak (*outcome*). *Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh kelompok sasaran maupun kelompok luar sasaran.<sup>12</sup> Sedangkan dampak yakni perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan (*output policy*). Dampak kebijakan publik (*outcome policy*) merupakan bagian dari evaluasi kebijakan publik yang memiliki perbedaan dengan *policy output* atau hasil dari kebijakan publik. Dampak kebijakan terfokus untuk menentukan pengaruh dari kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya dari implementasi suatu kebijakan publik. Dalam memahami dampak kebijakan publik, maka harus diketahui apa yang ingin diselesaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan (objektivitas kebijakan) dan bagaimana usaha untuk melaksanakan program dari kebijakan publik tersebut.<sup>13</sup>

Secara teoritis, dampak kebijakan (*outcome policy*) tidak sama dengan *output policy*. hal ini dikarenakan determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan

<sup>12</sup> Op.Cit. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Hlm. 5

<sup>13</sup> Op. Cit. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Hlm. 191

sangat penting untuk diteliti, namun dalam menilai dampak kebijakan publik perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur kebijakan pemerintah. Dampak kebijakan harus dicermati bahwa dampak yang terjadi benar-benar sebagai akibat program atau kebijakan yang sedang di evaluasi atau justru dampak dari program lain. Dalam kenyataannya, seringkali kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan yang saling tumpang tindih atau sejenis.

Menurut Dye dalam Winarno (2014), terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, secara singkat dapat dipahami yaitu:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dan dampak dalam kebijakan publik yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.
2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa mendatang
4. Evaluasi juga menyangkut unsur lain, yakni bisa langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan publik.
5. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Biaya-

biaya seperti ini sering tidak dipertimbangkan dalam membuat evaluasi dampak kebijakan.

Dengan demikian, maka kita dapat menarik kesimpulan mengenai arti pentingnya evaluasi dampak kebijakan. Pengetahuan dimensi ini menyangkut sebab-sebab kegagalan atau keberhasilan dalam meraih dampak yang diinginkan dan dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbaiki suatu kebijakan.

#### 2.4 Analisis Dampak Sosial (ADS)

Analisis harus bersifat empirik dalam arti bahwa penilaian yang dilakukan tidak oleh hanya bersifat spekulatif hipotetik atau asumptif-teoritik, melainkan harus diuji dengan data atau setidaknya penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Menurut Effendi dalam Samodra Wibawa (1994):<sup>14</sup>

Sebagaimana beberapa sifat yang dituntut dalam setiap penelitian, ADS sebagai kerja intelektual harus bersifat empiris, tidak bisa rasional, handal dan sah dengan kata lain ADS harus dilakukan secara logika-empiris

Karena analisis itu dilakukan terhadap alternatif yang tersedia, yang hasilnya nanti adalah pemilihan kita terhadap alternatif yang paling tepat atau baik, maka kita harus bersikap tidak memihak atau bias terhadap salah satu alternatif. Oleh karena itu, sebelum analisis dilakukan, kita tidak menentukan atau memilih alternatif mana yang dianggap baik. Dalam analisis sebuah dampak kebijakan, tentu *policy maker* terbuka untuk dikritik.

<sup>14</sup> Op,Cit. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Hlm. 31

Sedangkan Riga A dalam bukunya Analisis Dampak Lingkungan Sosial (1987) mengklasifikasi dampak dalam tiga hal yaitu:

1. Analisis dampak sosial ekonomi

Lebih menekankan dampak ekonomi dan demografi dalam tingkat kelompok, komunitas dan daerah dimana kegiatan dilaksanakan.

2. Analisis dampak psiko-sosial

Menekankan pada dampak psikologi termasuk dampak terhadap nilai, sikap dan kepercayaan serta persepsi mengenai perubahan pada tingkatan individu maupun kelompok

3. Analisis dampak sosial budaya

Menekankan pada aspek kualitatif dan dampak terhadap individu, penduduk daerah dengan menggunakan konsep dari berbagai ilmu. termasuk di dalamnya data sosial ekonomi sehingga seringkali dianggap merupakan dampak yang paling lengkap

Dalam analisis dampak kebijakan ini, peneliti melakukan perbandingan antara dampak aktual dengan dampak yang diharapkan, baik itu dampak positif dengan dikung oleh dampak yang diharapkan (*intended*) dengan dampak yang tidak diharapkan (*unintended*). Dampak yang diharapkan yakni ketika kebijakan dibuat oleh pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan adalah dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk menjelaskan dampak yang timbul atau terjadi setelah penutupan lokalisasi, maka akan digunakan analisa dampak psiko-sosial. Dalam penelitian ini akan melihat dampak psiko-sosial yang terjadi di masyarakat maupun aparat pemerintah yang diakibatkan oleh kebijakan penutupan lokalisasi dolly ini.

#### 2.4.1 Karakteristik Analisis Dampak Sosial (ADS)

Menurut Effendi dalam buku Samodra Wibawa yang berjudul Evaluasi Kebijakan Publik,

Sebagaimana beberapa sifat yang dituntut dalam setiap penelitian, ADS sebagai kerja intelektual harus bersifat empiris, tidak bisa rasional, handal dan sah. Dengan kata lain, ADS haruslah dilakukan secara logika-empiris.

Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk memilih dampak yang dijadikan fokus analisis menurut Finser Busch and Motz (1980), adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Peluang terjadinya dampak
- 2) Jumlah orang yang akan terkena dampak
- 3) Untung-rugi yang diderita subyek dampak
- 4) Ketersediaan data untuk melakukan analisis
- 5) Relevansi terhadap kebijakan
- 6) Perhatian publik terhadap dampak tersebut

#### 2.4.2 Langkah-Langkah Analisis Dampak Sosial

Menurut Samodra Wibawa (1994):<sup>16</sup>

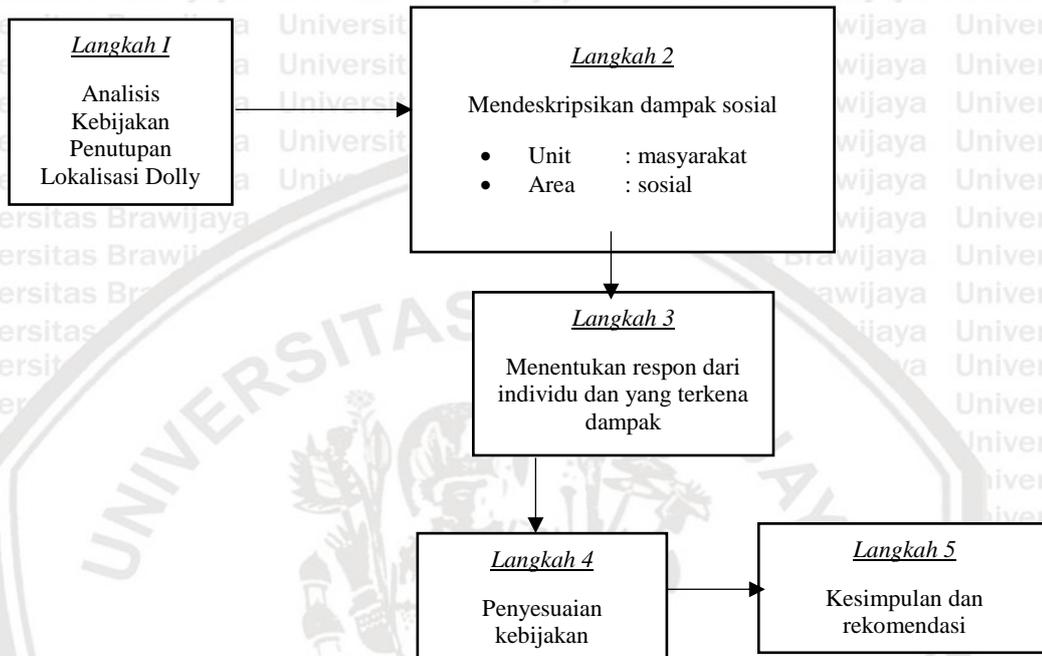
Dalam melakukan Analisis Dampak Sosial setidaknya mengerjakan tiga hal, yaitu: (1) secara vertikal memetakan jenis-jenis dampak yang mungkin terjadi, (2) secara horisontal melihat maupun memprediksi kecenderungan reaksi yang diberikan oleh subyek yang terkena dampak tersebut, dan (3) secara komprehensif merumuskan penyesuaian kebijakan yang harus dilakukan oleh *policy maker*.

<sup>15</sup>*ibid.* Hlm. 35

<sup>16</sup>*Ibid.* Hlm. 34

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi dampak kebijakan ini adalah sebagai berikut:

**Bagan 2. 2 Langkah-Langkah Analisis Dampak Kebijakan**



Sumber: Finsterbush and Motz (1980) dalam Samodra Wibawa dkk (1994)

ADS dimulai dengan menetapkan kebijakan apa yang akan dianalisis. Dalam hal ini dilihat teknologi apa yang dipakai dalam kebijakan tersebut dan bagaimana langkah implementasi kebijakan itu. Secara demikian, kajian terhadap isu kebijakan tersebut selain dilakukan pada aspek teknologi, juga pada aspek manajemen programnya. Setelah itu, analisis apa dampak fisik dan ekonomi yang terjadi. Selain dampak fisik dan ekonomi, perlu juga dianalisis dampak lingkungan.

Langkah kedua, pendeskripsian dampak sosial dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini ada 2 katagori yang harus dianalisis yaitu, unit pedampak dalam arti unit sosial dan jenis dampak. Unit-unit sosial pedampak adalah unit-unit yang terkena



dampak (*outcome*) sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan tersebut. Dampak terhadap unit-unit bisa bersifat satu kesatuan, berbalasan dan erpisah satu sama lain.

Sebuah kebijakan dapat membawa dampak pada unit sosial. Menurut Wibawa (1994) dalam Sahya Anggara menyatakan bahwa unit-unit sosial pedampak terdiri dari:<sup>17</sup>

**Tabel 2. 2 Unit-Unit Sosial Terdampak**

Jenis Dampak	Unit Sosial Terdampak
Dampak Individual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biologis (cacat fisik karena dampak dari kebijakan)</li> <li>• Psikologis (stres, depresi, emosi)</li> <li>• Lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah)</li> <li>• Ekonomi (naik-turunnya penghasilan, harga, keuntungan)</li> <li>• Sosial (personal)</li> </ul>
Dampak Organisasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langsung (terganggu atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi)</li> <li>• Tidak langsung (peningkatan semangat kerja, disiplin)</li> </ul>
Dampak pada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesejahteraan</li> </ul>
Dampak pada Lembaga dan Sistem Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat</li> <li>• Menguatnya solidaritas sosial</li> </ul>

Sumber : Sahya Anggara (2014)

Langkah *ketiga*, menentukan respon individu maupun kelompok yang menjadi unit dampak. Sikap mereka terhadap kebijakan secara keseluruhan dianalisis pada tahap ketiga ini. Selain sikap unit pedampak, juga dianalisis sikap dari masyarakat dan juga pemerintah.

<sup>17</sup> Sahya, Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm. 282

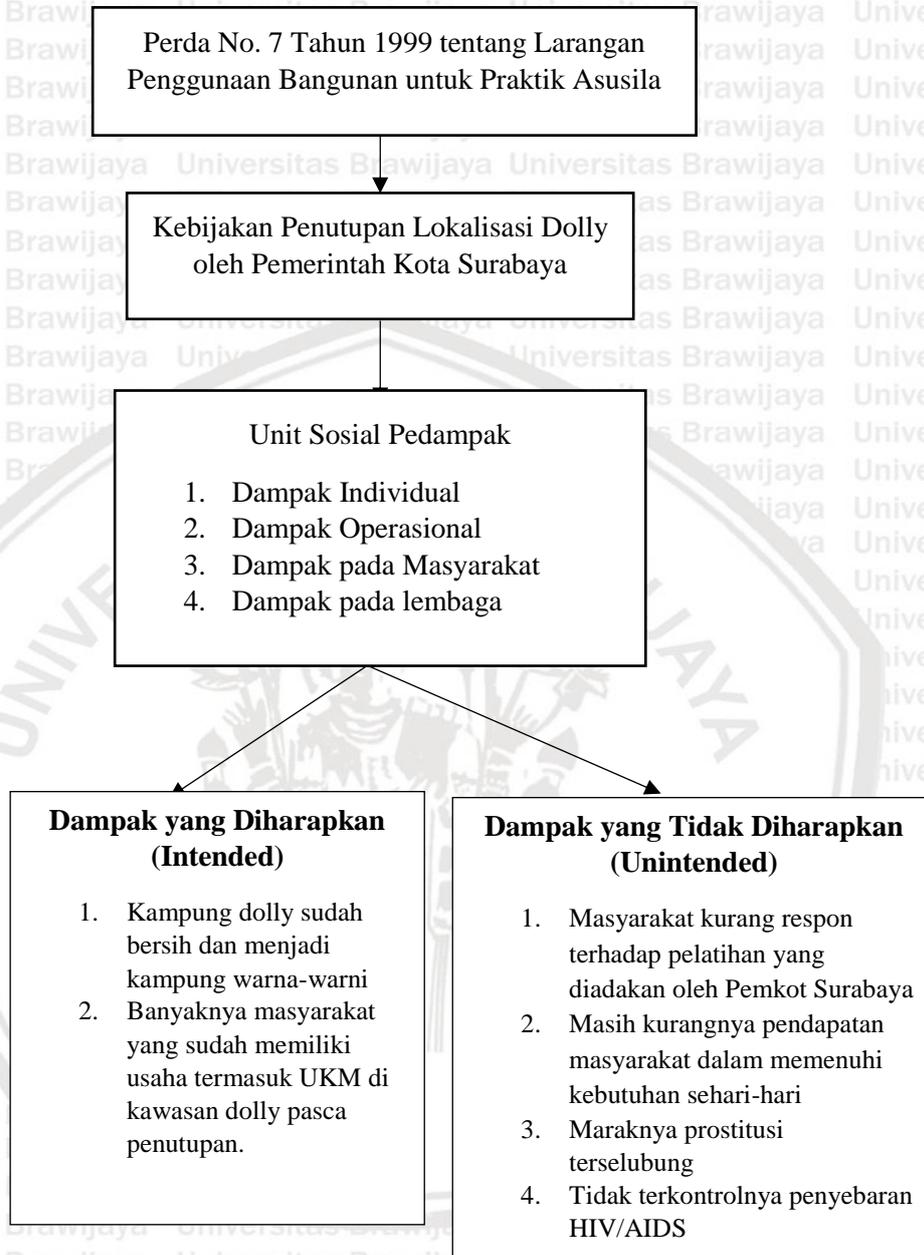


Dalam penelitian ini menitikberatkan pada dampak yang diharapkan (*intended*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended*). Kebijakan mengenai penutupan lokalisasi Dolly di Kota Surabaya ini merupakan suatu keputusan yang cukup fenomenal dan sangat berani yang di keluarkan oleh Walikota Surabaya, Tri Rismahariani. Dimana, lokalisasi Dolly ini sudah berusia 100 tahun dan menjadi *icon* Kota Surabaya sebagai tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Sementara disisi lain, berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Bangunan untuk Praktik Asusila menjadi landasan hukum kebijakan penutupan lokalisasi dolly itu dilaksanakan.

### 2.5 Alur Pikir Temuan

Alur pikir menjelaskan arah penelitian dari masalah yang peneliti angkat, sehingga memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami apa yang akan menjadi pembahasan nantinya. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana pemberlakuan kebijakan penutupan lokalisasi Dolly yang berdasarkan pada Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Bangunan untuk Praktik Asusila ini mampu memberikan dampak yang diharapkan. Untuk melihat sejauh mana dampak yang terjadi, terlebih dahulu dilihat bagaimana evaluasi dampak kebijakan dilihat dari analisis dampak sosial.

**Bagan 2. 3 Alur Pikir Temuan**



Sumber: Diolah oleh penulis, 2017





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yakni tentang jenis penelitian, fokus dan lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

#### **1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Konsep dasar penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin mengungkapkan atau menjawab tentang pertanyaan bagaimana sifat suatu hal atau objek yang sedang diamati. Penelitian kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analisis. Penelitian kualitatif memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kualifikasi atau gejala-gejala yang tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat atau kuantitatif.<sup>1</sup> Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha mendeskripsikan fakta-fakta sosial pada tahap permulaan yang tertuju pada usaha mengemukakan gejala sosial secara lengkap di dalam aspek yang sedang diteliti, agar jelas keadaan atau kondisinya. metode kualitatif dalam penelitian memilih studi kasus untuk memperoleh informasi. Menurut Stake, studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas,

---

<sup>1</sup> Abercrombie, Hill. (1984) dalam Darsono Wisadirana. 2005. *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Ilmu Sosial*. Malang: UMM Press. Hlm 11

proses atau sekelompok individu.<sup>2</sup> Hal itu kemudia dijelaskan bahwa permasalahan atau kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Penelitian kualitatif memiliki karakteristik penelitian sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, angung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*
4. Analisis data dilakukan secara induktif
5. Lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati)

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pedekatan interpretative dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Penelitian kualitatif ini digunakan karena dirasa dengan menggunakan metode ini mampu melihat fenomena yang terjadi secara lebih luas dan lebih mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang terjadi.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ini diterapkan

<sup>2</sup> John W Creswell. 2009. *Research Design Qualitative, Quantiative, and Mixed Methods Approaches*. Diterjemah Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 20.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Op.cit. *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Ilmu Sosial*. Hlm 15

<sup>5</sup> Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 81

agar dapat melihat dan memahami subjek dan objek penelitian meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil yang tampil secara apa adanya.<sup>6</sup>

Selanjutnya dijelaskan juga penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.<sup>7</sup>

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana mengkaji perspektif partisipan ini dilakukan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, metode kualitatif ini dirasa sangat tepat digunakan dalam memperoleh pemahaman mengenai perubahan sosial masyarakat terdampak pasca penutupan lokalisasi.

## 1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam hal ini sangat penting untuk digunakan oleh peneliti ketika terjun lapangan. Fokus penelitian ini bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan terperinci sehingga dapat menjawab rumusan-rumusan masalah yang dikemukakan. Sehubungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka yang akan menjadi fokus penelitian ini yakni mengenai dampak dari kebijakan penutupan lokalisasi yang menjadi respon warga terdampak ex. Lokalisasi 'Dolly' pasca penutupan. Studi kasus dilakukan pada ex. Lokalisasi 'Dolly' Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

### 1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini ditujukan pada warga terdampak pasca penutupan lokalisasi di Surabaya. pada penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Alasan mengambil lokasi tersebut karena lokalisasi Dolly-Jarak resmi ditutup pada tanggal 18 Juni 2014, dimana lokalisasi Dolly-Jarak merupakan lokalisasi di Surabaya yang terakhir resmi ditutup oleh Tri Rismaharyanti, Walikota Surabaya. Penutupan lokalisasi Dolly-Jarak menuai banyak kontroversi dari mulai Wanita Tuna Susila yang kehilangan pekerjaan hingga masyarakat yang sulit menerima kebijakan dari Walikota Surabaya tersebut.

### 1.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* atau sampling bertujuan. Teknik ini dilakukan dengan tiga tahapan penentuan informan dalam penelitian kualitatif, yaitu pertama, pemilihan informan awal, apakah informan (untuk diwawancarai) atau suatu situasi sosial (untuk observasi). Kedua, pemilihan informan lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak informasi yang mungkin ada. Ketiga, menghentikan pemilihan informan lanjutan bilamana sudah tidak ditemui lagi variasi informasi (sudah ada replika informasi).<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan yang dilakukan secara *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih merupakan

<sup>8</sup> Bungin, burhan. 2003. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.53

pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan mengenai penelitian ini. Kemudian berkembang dengan menggunakan teknik *snowball*. Dimana pemilihan informan lanjutan dalam rangka pengalihan data untuk mendapatkan variasi dan kedalaman informasi diperoleh atas dasar rujukan atau rekomendasi dari *key informan* yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling*.

Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat terdampak terhadap penutupan lokalisasi Dolly-Jarak ini akan menjadi target sampling bagi penulis. Masyarakat Dolly-Jarak yang menerima kompensasi dan menjalani profesi lain sesuai dengan yang menjadi fasilitas dari Pemerintah Kota Surabaya adalah Informan utama penulis, hal ini dikarenakan mereka yang merasakan dampak dari kebijakan Pemerintah Kota Surabaya akan diadakan pengalihan tenaga kerja di daerah Dolly-Jarak.

**Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan
1.	Aziz Muslim	Staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya
2.	Yunus S.STP	Camat Kecamatan Sawahan
3.	H. Dwi Mulyo Agustiarso. S. Sos MM	Lurah Kelurahan Putat Jaya
4.	Adam	CO Humas Gerakan Melukis Harapan
5.	Bang Jarwo	Mantan Preman Dolly
7.	Munasipah	Mantan Wanita Tuna Susila di lokalisasi Gang Dolly
8.	Fitri	PSK yang masih aktif
9.	Nurma	Mantan Wanita Tuna Susila di lokalisasi Gang Dolly
10.	Siti	Mantan Wanita Tuna Susila di lokalisasi Gang Dolly

11.	Durmajir	Mantan Wanita Tuna Susila di lokasi Gang Dolly
12.	Ratna	Mantan Wanita Tuna Susila di lokasi Gang Dolly
13.	Citra	Masyarakat Terdampak penutupan dolly
14.	Lulu	Masyarakat Terdampak penutupan dolly
15.	Mita	Masyarakat Terdampak penutupan dolly

Sumber : diolah dari berbagai sumber, 2016

## 1.5 Teknik Pengumpulan Data

Guna mengungkap kondisi perilaku masyarakat yang akan diteliti serta kondisi lingkungan masyarakat dalam penelitian kualitatif dilakukannya teknik pengumpulan data dengan menggunakan bermacam variasi data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan oleh penulis menggunakan 3 metode yakni melalui teknik observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi dimana merupakan teknik yang paling tepat dalam proses penelitian yang digunakan oleh peneliti.

### 1.5.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>9</sup> Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara mengamati langsung kondisi di lapangan untuk melihat kondisi perilaku serta kondisi lingkungan masyarakat. Pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran

<sup>9</sup> Muhammad, Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Hlm. 101

penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat di hitung, dan dapat diukur.<sup>10</sup> Melalui observasi, peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri tentang kejadian yang sebagaimana terjadi di lapangan, teknik pengamatan memungkinkan peneliti untuk mampu memahami situasi-situai rumit dan kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Metode observasi (pengamatan) juga akan lebih mampu memahami situasi rumit yang mungkin terjadi, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat.

### 1.5.2 Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) menurut Sutopo, yaitu:<sup>11</sup>

“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama”

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan data mentah yang selanjutnya diolah dan diaalisis demi mendapatkan hasil penelitian yang

<sup>10</sup> Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 131

<sup>11</sup> H.B. Sutopo. 2006. *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

akurat. Berdasarkan hasil wawancara ini diharapkan mampu mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur dimana metode semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara terbuka dan pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat dan ide-idenya. Peneliti tetap menggunakan pedoman-pedoman pertanyaan agar penelitian lebih terarah namun juga akan dikembangkan secara bebas. Teknik pengambilan sampel dengan metode *Purposive Sampling*, yang diartikan sebagai pengambilan sampel sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Sampel informan dipilih peneliti dengan menentukan dan menemukan siapa yang akan diwawancarai. Sebuah penelitian dengan menggunakan metode wawancara tidak seperti percakapan biasa dan pertanyaan informal melainkan lebih ke arah formal. Oleh sebab itu, dalam metode wawancara ini peneliti harus mempersiapkan secara cermat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan harus dirancang secermat mungkin agar memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah dalam penelitian.

### 1.5.3 Dokumentasi

Selain menggunakan metode observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yakni dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait.

Dengan menggunakan metode dokumentasi, keuntungannya yakni biaya yang dikeluarkan relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya, data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama. Data-data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara, merupakan data primer karena didapat langsung dari pihak pertama.<sup>12</sup> Adapun dokumen internal dapat berupa memo, instruksi, pengumuman, ataupun aturan suatu lembaga masyarakat. Sedangkan dokumen eksternal dapat berupa majalah, pernyataan dan berita yang disiarkan di media massa. Peneliti menggunakan metode ini agar peneliti bisa mendapatkan data resmi dari instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya, LSM, maupun Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Putat Jaya yang digunakan untuk menyusun skripsi.

### 1.6 Sumber Data

Sumber data kualitatif dalam hal ini bersifat lebih memahami bagaimana fenomena atau gejala sosial yang ditemukan peneliti. Sumber data peneliti ini merupakan subyek darimana data itu diperoleh oleh peneliti. Adapun jenis data yang akan dianalisis, yakni:

<sup>12</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 69

### 1.6.1 Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.<sup>13</sup>

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi yakni peneliti turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Hasil dari observasi ini berupa catatan atau rekaman yang dapat dijadikan data dalam pembahasan penelitian. Selain itu, data primer juga dapat dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan bersifat terbuka untuk memunculkan opini informan dengan wawancara.

### 1.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.<sup>14</sup>. Data seperti ini dapat dijadikan sebagai data pelengkap dari data primer dan diharapkan mampu menjadi pendukung data yang sudah didapatkan melalui penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan perubahan sosial masyarakat terdampak ex. Lokalisasi 'Dolly'. Adapun data sekunder yang diperoleh dari Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya, Bapemas KB Kota Surabaya dan Bapemas Prov Jatim. Selain itu data sekunder juga bisa diperoleh melalui internet, arsip, buku, ataupun media informasi lain yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

<sup>13</sup> Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 61

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 87

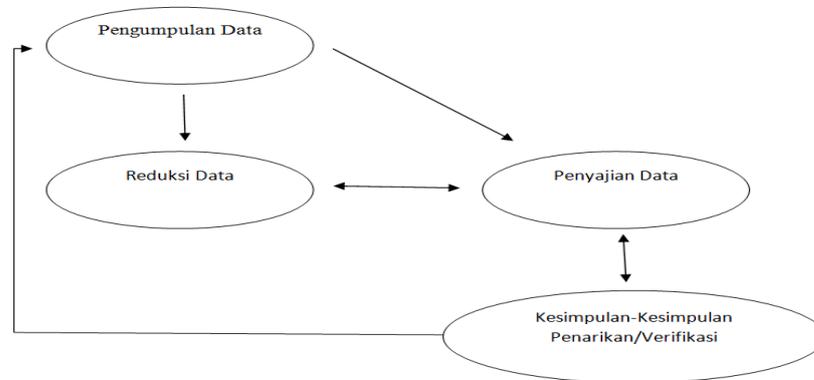
### 1.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian melibatkan pengumpulan data yang terbuka berdasarkan pada pertanyaan umum kepada informan sehingga menghasilkan sebuah opini yang kemudian sebagai analisis data dalam penelitian.

Pada hakekatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang akan dijawab.<sup>15</sup>

Salah satu bagian terpenting dalam menyusun laporan penelitian adalah analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman, dimana model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1). Reduksi data; (2). Penyajian data; dan (3). Penarikan kesimpulan/verifikasi. Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman ini adalah sebagai berikut:

<sup>15</sup> Op. Cit. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixes Methods Approaches* . hlm. 247

**Bagan 3. 1 Analisis Data Model Interaktif**

Sumber: Miles dan Huerman (1992), Dalam Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Hlm. 148

Tahap *pertama*, Analisis Data Interaktif dalam Miles dan Huberman

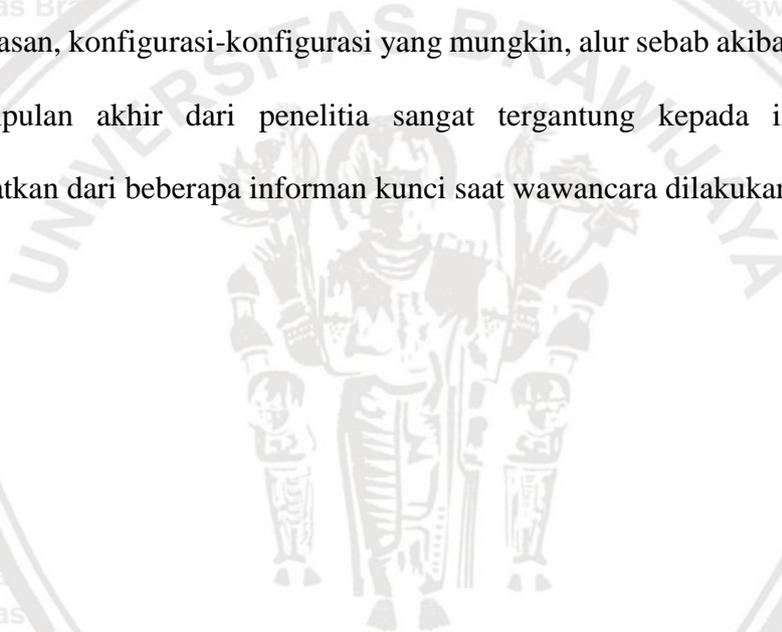
adalah Reduksi data. Pada tahap reduksi data, data dan laporan lapangan yang telah di dapatkan selama proses penelitian untuk kemudian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal pokok untuk difokuskan pada data yang terpenting kemudian dicari polanya (melalui proses penyutingan, pemberian kode dan pentabelan). Pada tahap ini, reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Setelah data dipilih kemudian disederhanakan untuk kemudahan dalam penyajian serta menarik kesimpulan sementara.

Tahap *kedua*, Analisis Data Interaktif dalam Miles dan Huberman adalah

Penyajian data (Display data). Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang haru dilakukan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktifitas-aktifitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini pun

berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburur-burur untuk menghentikan kegiatan display data ubu sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

Tahap *ketiga*, analisis Data Interaktif dalam Miles da Huberman adalah Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan sebuah verifikasi dimana permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola—pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan akhir dari penelitian sangat tergantung kepada informasi yang didapatkan dari beberapa informan kunci saat wawancara dilakukan.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKALISASI DOLLY

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan dan mendeskripsikan tentang deskripsi wilayah penelitian, yaitu Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. untuk memberikan gambaran terkait lokasi penelitian peneliti membagi dalam beberapa sub bagian. Pada sub bagian tersebut menjelaskan perihal profil umum Kelurahan Putat Jaya, kondisi ekonomi, kondisi sosial serta kondisi lingkungan masyarakat terdampak penutupan lokalisasi.

#### 4.1 Gambaran Umum Kelurahan Putat Jaya

##### 4.1.1 Kondisi Geografis

Lokalisasi dolly terletak di Kota Surabaya bagian selatan dan lebih tepatnya berada di kawasan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya.

Letaknya cukup strategis, dimana tidak jauh dari pasar Kembang Surabaya.

selain itu, Jarak lokalisasi dari pusat pemerintahan Surabaya, kantor walikota

$\pm 5$  km sedangkan jarak ke pusat pemerintahan provinsi mencapai  $\pm 9$  km.

Secara geografis, luas wilayah dari Kelurahan Putat Jaya ini sekitar  $\pm 13$  Ha

dengan jumlah penduduk sekitar 48.612 jiwa. Kelurahan Putat Jaya ini

memiliki aspek kebudayaan yang sudah ada sejak dahulu kala di masyarakat

Dolly yang dimana keadaan sosial masyarakat Putat Jaya sangat erat dengan

praktek bisnis prostitusi yang juga menjadi sumber penghasilan utama

masyarakatnya.

#### 4.1.2 Kondisi Ekonomi Masyarakat

Secara umum masyarakat di Kelurahan Putat Jaya adalah masyarakat wirausaha dengan berdagang. Sebab, Kelurahan Putat Jaya berada di pusat Kota Surabaya dimana dikelilingi oleh berbagai aktivitas perdagangan.

**Tabel 4. 1 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Kelurahan Putat Jaya**

No.	Mata Pencaharian Pokok	Jumlah
1.	TNI	257
2.	POLRI	115
3.	PNS/BUMN/BUMD	218
4.	WIRASWASTA	1457
5.	Buruh	3596
6.	Tukang	1332

*Sumber: Data dari Kelurahan Putat Jaya yang diolah Penulis, 2017.*

Dari keseluruhan data, kelompok masyarakat yang benar-benar aktif dalam kegiatan ekonomi yakni kelompok karyawan, wiraswasta dan pedagang. Tidak hanya pada sektor buruh, sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga merupakan mata pencaharian dengan jumlah masyarakat tertinggi setelah buruh.

Banyak masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan penghasilan dengan mencoba usaha kecil yang dapat dilakukan di rumah. Industri kecil yang banyak dikerjakan oleh masyarakat adalah produksi aneka macam makanan ringan dan makanan berat, penjahit rumahan, salon, serta banyak yang membuka usaha kecil yang menjual sembilan bahan pokok (sembako) dalam rumah tangga. Setelah ditutupnya lokalisasi, perekonomian masyarakat di Kelurahan Putat Jaya masih belum stabil hingga saat ini. Bahkan, banyak yang ditemukan sedang menganggur ataupun berpindah ke kota lain demi mencari pekerjaan.

Kedua sektor yang banyak dikerjakan oleh masyarakat tersebut ternyata setelah dilakukan penelitian, tidak sebanding dengan kondisi ekonomi yang di alami masyarakat Kelurahan Putat Jaya. Banyak masyarakat yang menjadi buruh pabrik, buruh harian lepas atau buruh musiman. Bahkan, hampir dari keseluruhan masyarakat yang bekerja sebagai buruh mempunyai tingkat kesejahteraan yang cukup rendah atau sederhana.

Kondisi demikian juga dialami oleh masyarakat yang bekerja pada sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Banyaknya warga yang membuka usaha kecil dengan berjualan sembako (sembilan bahan pokok) dirumahnya membuat persaingan antar tetangga yang membuka usaha kecil semakin tinggi. Hal ini terjadi pula pada masyarakat yang membuka warkop (warung kopi) yang membuat persaingan usaha sangat tinggi. Hal itu sangat berdampak pada penghasilan yang diterima. Tidak hanya itu, kondisi ekonomi masyarakat yang sering berhutang dalam belanjanya. Dan juga rumah yang sebagian besar masyarakat masih mengontrak dengan rata-rata per tahun 15 juta. Kebiasaan masyarakat yang sering berhutang juga menyebabkan tingkat perekonomian masyarakat rendah. Tidak hanya permasalahan pada kedua sektor itu saja, kesejahteraan hidup keluarga semakin diperparah dengan tingginya angka pengangguran. Angka pengangguran banyak ditemukan pada usia 18-55 tahun yang menjadi ibu rumah tangga. Meliha kenyataan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Putat Jaya hampir sama yakni masih rendah.

#### 4.1.3 Kondisi Sosial Masyarakat

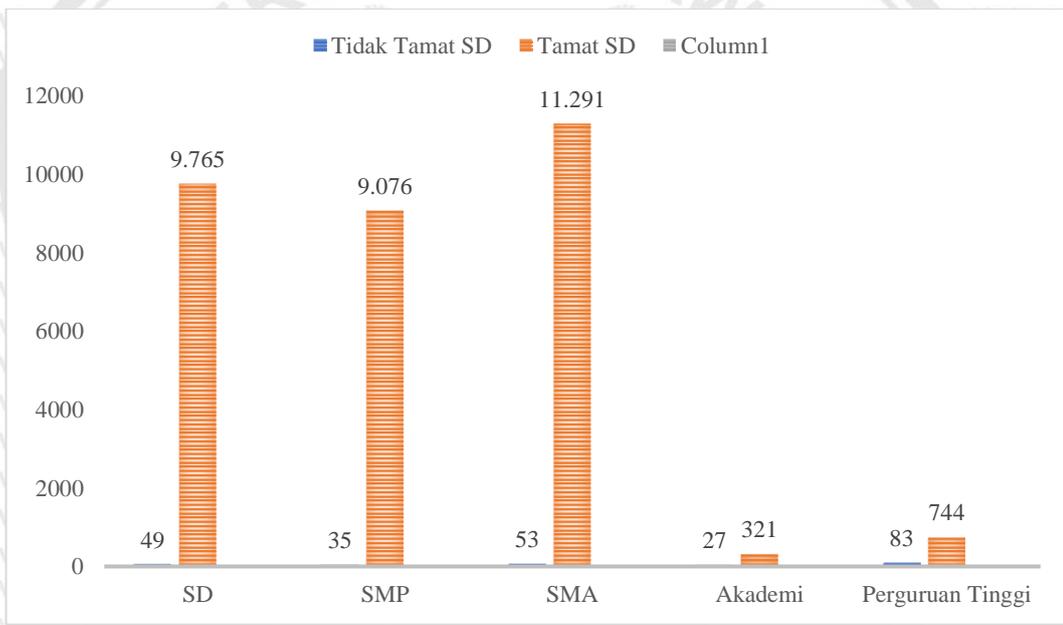
Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain, dimana tidak bisa hidup sendiri. Begitupula yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Putat Jaya. Pada umumnya masyarakat di Kelurahan Putat Jaya sebagian besar merupakan pekerja rumahan. Dimana dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka bekerja tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Masyarakat di Kelurahan Putat Jaya dalam aktivitasnya sudah sangat terbiasa berhubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Kegiatan lain selain bekerja yang dapat dilakukan yakni melakukan kunjungan dari tetangga yang ingin melihat aktivitas yang sedang dilakukannya. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan sosial masyarakat mereka sering melakukan saling membantu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Putat Jaya sangat tinggi ketika terdapat seorang tetangga mengalami kesulitan. Selain itu sebagian besar masyarakat di Kelurahan Putat Jaya bersanak-saudara di wilayah tersebut juga.

Kerukunan masyarakat di Kelurahan Putat Jaya juga dapat terjadi ketika adanya kegiatan yang melibatkan golongan masyarakat. Kegiatan yang rutin dilakukan Kelurahan yakni menggerakkan aparat kelurahan untuk mendatangi dan melihat kondisi masyarakat di tempat tinggalnya untuk sekedar bertanya bagaimana keadaan pada saat itu. Selain dari berbagai golongan masyarakat, hubungan sosial juga dapat dibangun ketika terdapat kegiatan dari kecamatan seperti pengajian rutin, PKK, bersih kampung, pelatihan UKM, dan lain-lain. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama satu bulan, menemukan

fakta bahwa hampir keseluruhan masyarakat di Kelurahan Putat Jaya mengenali dan mengetahui masyarakat lainnya.

Tidak sedikit warga yang memiliki anggota keluarga yang berjumlah besar dan tinggal satu atap atau beda. Rata-rata pendidikan penduduk di Kelurahan Putat Jaya terbilang rendah. Hal itu kemudian menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di kelurahan tersebut. Berikut data pendidikan masyarakat di Kelurahan Putat Jaya.

**Grafik 4. 1 Pendidikan Terakhir Masyarakat Kelurahan Putat Jaya**



Sumber : Data dari Kelurahan Putat Jaya diolah penulis, 2017

Jumlah keseluruhan penduduk tetap di Kelurahan Putat Jaya yakni 48.612 jiwa yang terbagi menjadi 2 jenis kelamin yakni Laki-laki berjumlah 24.405 dan perempuan 24.197 dan jumlah penduduk musiman yakni 4.915 jiwa. Pada tabel tersebut menjelaskan pendidikan terakhir yang ditempuh masyarakat dan elum termasuk penduduk yang belum bersekolah dan sedang

sekolah. Jika dilihat dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kelurahan Putat Jaya mengenyam pendidikan terakhir yakni pada jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA.

## **4.2 Gambaran Sejarah dan Kebijakan Dolly**

### **4.2.1 Awal Kemunculan Lokalisasi Dolly**

Siapapun tidak tahu persis bagaimana lokalisasi dolly berdiri untuk pertama kali. Namun, nama 'Gang Dolly' sudah terkenal sejak lama, bahkan pada abad 19 yakni pada masa kolonial Belanda, Dolly sudah ada. Dolly berada di tempat yang strategis, di perkotaan Kota Surabaya, Kelurahan Putat Jaya, Kematan Sawahan. Dolly merupakan kawasan bisnis prostitusi terbesar di Asia Tenggara hingga keberadaan Dolly lebih terkenal dibanding Kota Surabaya.

Ada beragam kisah terkait awal berdirinya Dolly. Dimana nama Dolly diambil dari nama salah satu perintis usaha prostitusi, seorang perempuan keturunan Belanda bernama Dolly Van De Mart. Ia membuka sebuah wisma dengan perempuan-perempuan cantik untuk melayani para tentara Belanda saat itu. Bahkan sejumlah masyarakat pribumi juga penasaran dengan pelayanan para perempuan di rumah bordil tersebut hingga rumah bordil itu menjadi sangat ramai. Kisah lain juga menyebutkan, kompleks dolly aawalnya merupakan pemakaman Tionghoa meliputi wilayah Girilaya, berbatasan dengan makam Islam di Putat Gede.

Pada tahun 1906, makam tersebut dibongkar dan sebagian dijadikan pemukiman warga. Sekitar tahun 1966, datang seorang mantan pelacur

berdarah Jawa-Filipina yang bernama Dolly Khavit atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tante Dolly. Kemudian Dolly Khavit menikah dengan pelaut Belanda dan mendirikan rumah bordil pertama kali di jalan Kupang Gunung Timur I. Sejak saat itu, kawasan rumah bordil tersebut dikenal dengan sebutan Gang Dolly yang juga bersebelahan dengan kawasan lokalisasi Jarak yang berada di jalan Jarak. Puluhan wisma bermunculan mulai dari sisi jalan sebelah barat, lalu meluas ke timur hingga mencapai jalan Jarak. Selain lokasi yang strategis, cara menjajakan pelacur di tempat ini juga cukup dramatis sehingga menjadikan Dolly sangat terkenal. Perempuan-perempuan itu dipajang di ruangan kaca layaknya *etalase*. Dengan begitu, lelaki yang datang akan bebas memilih dengan siapa ia mau ditemani.

Kawasan lokalisasi Jarak merupakan limpahan dari lokalisasi yang ada di Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya.

“Konon, Tante Dolly itu pernah ngontrak rumah di Ronggo Warsito, Kecamatan Wonokromo dan kebetulan yang dikontrak itu rumah teman ibu saya yang saat ini umurnya sudah 70 tahun lebih. Sampai suatu ketika, di wismanya itu ada seorang turis India meninggal dan wismanya di kasih police line. Pemerintahan waktu itu presiden masih Pak Karno (Soekarno), meloalisir di kawasan Jarak itu. Kejadiannya tahun 60-an”.<sup>1</sup>

Namun, Tante Dolly menolak dipindahkannya wisma yang berada di Jarak dan membuat wisma di tempat terpisah. Dan ternyata, bisnis prostitusi yang di kelola Tante Dolly ini terbiang sukses di banding wisma-wisma yang berada di Jarak. Perempuan-perempuan penghibur (WTS) yang berada

<sup>1</sup> Wawancara dengan R. Wahyu Iswara selaku Sekretariat Kelurahan Putat Jaya pada 11 Juli 2017, pukul 14.11 WIB

di kawasan Dolly terbilang cukup berkelas dan biaya sewanya pun mahal di banding wisma lainnya.

#### 4.2.2 Letak dan Kondisi Geografis Kawasan Lokalisasi Dolly

Kawasan bisnis prostitusi atau yang dikenal dengan kawasan gang Dolly, berada di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Kelurahan Putat Jaya terdapat 2 kawasan bisnis prostitusi yakni Dolly dan Jarak. Lokasinya hanya bersebelahan saja. Tak sedikit masyarakat lokal maupun mancanegara yang tahu letak dimana kawasan lokalisasi yang terbesar se-Asia Tenggara tersebut bahkan sudah menjadi kawasan wisata seks yang terkenal. Di kiri kanan jalanan sepanjang kurang dari 150 meter dengan lebar sekitar 5 meter ini banyak berdiri wisma-wisma, klub malam dan tempat karaoke.

**Gambar 4. 1 Peta Persebaran Lokalisasi Dolly**



Sumber : Data Yayasan Mitra Satya Program Pemberdayaan Sosial dan Kesehatan, 2014

Gambar 4.1 Merupakan peta penyebaran kawasan lokalisasi dolly dan jarak yang berada di kelurahan Putat Jaya dan mencakup 5 RW dari 15 RW

yakni RW 3, RW 6, RW 10, RW 11, dan RW 12. Wilayah bisnis prostitusi dari kelima RW tersebut, yang paling banyak yakni RW 12 hingga mencakup seluruh warga menjadi pelaku usaha dalam bisnis tersebut. Dapat kita ketahui bahwa RW 3 merupakan Gang Dolly itu berasal. Saat bisnis prostitusi itu masih ada, RW 3 merupakan lokalisasi dengan tarif WTS dan wisma paling tinggi diantara seluruh tempat lokalisasi di wilayah dolly. Dimana, terdapat salah satu wisma bernama wisma barbara yang berlantai 6 dan menjadi wisma paling mewah diantara semua wisma. Berikut jumlah WTS yang berada di Kawasan Lokalisasi Dolly, yaitu :

**Tabel 4. 2 Jumlah WTS di Kawasan Lokalisasi Dolly**

No.	RW	Jumlah WTS
1.	RW 3	335 Jiwa
2.	RW 6	104 Jiwa
3.	RW 10	172 Jiwa
4.	RW 11	340 Jiwa
5.	RW 12	492 Jiwa
	<b>Total</b>	<b>1.449 Jiwa</b>

*Sumber : Data Rekapitulasi Dinas Sosial Kota Surabaya, 2014*

#### 4.2.3 Sejarah Penutupan Lokalisasi Dolly

Sejak awal berdirinya bisnis prostitusi tersebut, kawasan dolly tidak pernah terlepas dari pengaruh politik yang juga menyokong keberlanjutan aktivitasnya. Begitu memprihatinkan ketika Kota Surabaya dikenal dengan Kota bisnis protitusi. Beberapa walikota sebelumnya, hanya mengeluarkan rencana penutupan saja. Namun tak ada yang mampu merealisasikan. Entah

karena Cuma rencana demikepentingan tertentu atau karena faktor lain. Sejak terpilihnya Tri Rismahrini sebagai Walikota Surabaya, melihat lokalisasi dolly lebih utuh, mulai dari masalah ekonomi, pengaruh sosial, hingga eksploitasi perempuan.

Ada alasan-alasan Tri Rismaharini untuk menutup bisnis prostitusi, yakni *Pertama*, merealisasikan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan bangunan dijadikan tempat asusila. *Kedua*, Bu Risma ingin mengajak warga penguni kawasan dolly untuk mencari rejeki dengan halal tanpa harus menjual tubuhnya pada laki-laki yang haus akan napsu, maka dari itu Bu Risma berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dengan memberdayakan sesuai potensi diri mereka masing-masing. *Ketiga*, menyangkut masalah pendidikan moral anak-anak hingga usia remaja yang berada di sekitar lokalisasi. Karena yang dapat kita lihat bahwa bisnis prostitusi ini berdampak langsung pada psikologis anak-anak di sekitar lokalisasi.

"Ini yang menjadi alasan utama Ibu Wali menutup semua lokalisasi di Surabaya. Rencana ini sudah lama. Sebelum penutupan, beliau sudah sering turun bertemu dengan warga sekitar lokalisasi. Pendekatan-pendekatan terus dilakukan. Bahkan, Polrestabes Surabaya pernah memfasilitasi pertemuan antara Ibu Wali dengan pihak warga.."<sup>2</sup>

Maka dari itu, Tri Rismaharini mantap untuk menutup kawasan lokalisasi dolly. Sejak tahun 2009, sosialisasi rencana penutupan dilakukan jauh-jauh hari. Hingga 2 tahun berlalu hanya siraman rohani yang terus menerus dilakukan terhadap pelaku WTS serta mucikari. Melihat belum

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim, Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 16.34 WIB.

adanya respon positif dari berbagai aktor pelaku usaha bisnis prostitusi, tahun 2012 Tri Rismaharini menggerakkan seluruh SKPD Kota Surabaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang terkait sesuai bidangnya dan bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya untuk ikut andil dalam proses pelaksanaan pelatihan.

“...Bu wali mengarahkan untuk mengarahkan semua SKPD untuk menggerakkan pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya, misalnya dinas pertanian memberikan pelatihan bagaimana membudidayakan tani dan seterusnya. Lalu, Pemkot juga bekerja sama dengan UNESA untuk mengajarkan tata boga dll. Pelatihan-pelatihan ini yang diharuskan masyarakat sekitar dolly untuk diikuti. Pelatihan-pelatihan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh masyarakat dolly termasuk PSK dan mucikari oleh dinas sosial. Hal ini dilakukan untuk membekali mereka agar terlatih dalam bekerja yang layak”.<sup>3</sup>

Pada saat itu, Bu Risma mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kompensasi sebesar Rp. 3.000.000 /orang, bagi WTS yang mengajukan permintaan untuk kembali ke daerah asalnya. Sumber dana tersebut berasal dari dana APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah) tingkat 1. Namun, pada saat itu tidak banyak yang merespon dengan kebijakan tersebut. Hingga tahun 2014, Kemensos mengadakan pendataan besar-besaran seluruh masyarakat pelaku usaha dalam bisnis prostitusi yakni PSK dan Mucikari.

Tepatnya tanggal 18 Juni 2014, Walikota Surabaya menggelar deklarasi penutupan lokalisasi Dolly-Jarak di Gedung Islamic Center yang tak jauh dari Kantor Kelurahan Putat Jaya. Hampir seribu anggota Brimob dan Sabhara menjaga lokasi deklarasi dengan 3 unit mobil water canon yang

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak H. Dwi Mulyo Agustiarso. S. Sos MM selaku Lurah Kelurahan Putat Jaya, pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 14:32 WIB.

disiagakan di depan pintu masuk Islamic Center. Massa pro Dolly bergejolak, dengan mengatasnamakan Front Pekerja Lokalisasi (FPL) berunjuk rasa dan memblokir gang-gang lokalisasi. Pada saat bersamaan, 91 WTS dan mucikari bersama Bu Risma membaca deklarasi dengan lantang, menyatakan:

*Kami warga masyarakat Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Surabaya, berkeinginan agar:*

- 1. Wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan menjadi wilayah yang bersih, aman, tertib, dan bebas dari lokalisasi prostitusi.*
- 2. Wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, menjadi wilayah yang bermartabat dengan membangun usaha perekonomian yang sesuai dengan tuntutan agaman dan peraturan yang berlaku.*
- 3. Kami memohon kepada aparat berwenang untuk menindak secara tegas para pelaku kejahatan perdagangan orang, perbuatan asusila dan penggunaan bangunan untuk perbuatan maksiat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- 4. Wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, menjadi wilayah yang maju, aman, dan tertib dengan bimbingan dan perhatian aparat keamanan dan Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, dan Pemerintahan Pusat.*

Sejak naskah itu selesai dibacakan, lokalisasi Dolly-Jarak resmi ditutup.

Orang yang berbuat asusila di kawasan tersebut akan diproses secara hukum.

“..Proses untuk membebaskan Dolly dari prostitusi menjadi sejarah bangsa ini. Ini tanggung jawab kita bersama”.<sup>4</sup> (Wawancara dengan Bapak Aziz

<sup>4</sup> Op.cit. wawancara dengan Bapak Aziz Muslim.

Muslim, Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 16.34 WIB.)

Pemerintah Kota Surabaya menggunakan dana APBD dan bantuan dari Kementerian Sosial guna memberikan kompensasi kepada WTS dan Mucikari. Setiap WTS dan Mucikari mendapat bantuan dana sejumlah Rp. 5.050.000, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4. 3 Rincian Dana Bantuan**

No.	Jenis Dana	Jumlah
1.	Bantuan UEP	Rp. 3.000.000
2.	Bantuan Pemulangan	Rp. 250.000
3.	Bantuan Jaminan Hidup	Rp. 1.800.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 5.050.000</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2017*

Dana yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan salahsatu bagian dari program untuk membantu mengentaskan masyarakat lokalisasi dolly, selain itu Kementerian Sosial juga memberikanbantuan dana tambahan untuk Bantuan Bimbingan Sosial Keterampilan sebesar Rp. 1.000.000 kepada setiap WTS.<sup>5</sup>

Daerah lokalisasi dolly memiliki 312 wisma yang tersebar di wilayah Dolly-Jarak sebelum penutupan berlangsung. Dengan adanya penutupan lokalisasi ini, Pemerintah Kota Surabaya ingin mengubah citra Kelurahan Putat Jaya yang dahulu menjadi daerah prostitusi menjadi daerah edukasi. Dengan demikian, Pemerintah Kota Surabaya berinisiatif untuk membeli seluruh eks

<sup>5</sup> Data dari Dinas Sosial Kota Surabaya, *Program Penanganan Lokalisasi di Kota Surabaya*, 2014.

wisma menjadi tempat atau wadah bagi masyarakat. Sudah ada 10 wisma yang di beli oleh Pemerintah, yakni sebagai berikut :

**Tabel 4. 4 Data eksWisma yang Sudah di Beli PEMKOT Surabaya dan Peruntukannya**

No.	Nama Wisma	Peruntukan	Alamat
1.	New Barbara	Pembuatan Sepatu & Sandal	Kupang Gunung Timur I No. 20-22
2.	Gaza	Taman Bermain	Kupang Gunung Timur I No. 30
3.	Madona Indah 32	Taman Bermain	Kupang Gunung Timur I No. 32
4.	Rilex II	Futsal Mini	Kupang Gunung Timur I No. 15
5.	Anak Bangsa	Tempat Belajar Anak Berkebutuhan Khusus	Kupang Gunung Timur I No. 35
6.	Madinem	Jogging Track	Jarak 88
7.	AJT	Rumah Kreatif	Putat Jaya Lebar B No. 27
8.	Rumilah	Produksi Olahan Ternak	Putat Jaya 2A No. 19
9.	Sofiatin	Futsal Mini	Putat Jay Barat 6b No. 4
10.	Yuyun Sugiarti	Rumah Batik	Putat Jaya Barat 8B No.31

Sumber : Data Dinas Sosial Kota Surabaya, 2016

Hanya ada 10 wisma dari 312 wisma yang ada di eks lokalisasi dolly yang sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Surabaya. dengan harapan kedepannya agar seluruh eks wisma bisa dijadikan tempat yang lebih bermanfaat. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengambil alih wisma-wisma eks dolly yakni pemilik wisma sengaja untuk

menjual dengan harga yang tinggi hingga akhirnya Pemkot masih mencari cara untuk mengambil alih.

“...mereka (pemilik wisma) itu malah matok harga lumayan tinggi mbak untuk 1 rumah. Bisa mencapai 500 juta dengan luas tanah yang tidak sebanding. Maka dari itu kami kewalahan untuk mengabdulka. Tapi kalau tidak ambil tindakan, eks wisma itu akan menjadi tempat yang tidak terawat dan tidak berpenghuni. Alhasil ya, malah dijadikan kesempatan untuk dijadikan tempat napsu”<sup>6</sup>(Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim, Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 16.34 WIB)

Ibu Risma melihat di daerah Putat Jaya belum ada tempat untuk anak-anak dapat bermain dengan leluas, hingga pada akhirnya membangun tempat area bermain dan rencananya akan diperbanyak lagi. Dengan begitu, respon masyarakat sudah membaik dengan adanya sejumlah tempat bermain tersebut. Dengan ditutupnya kawasan Dolly ini, Pemerintah akan membersihkan nama Kota Surabaya bebas dari Prostitusi.

#### 4.2.4 Dasar Hukum Penutupan Dolly

Kebijakan penutupan lokalisasi dolly oleh Walikota Surabaya ini merealisasikan dan didasari oleh dasar hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 1999 yang membahas tentang penggunaan bangunan untuk perbuatan asusila. Dalam kebijakan penutupan lokalisasi ini, sasaran utamanya yakni WTS (Wanita Tuna Susila) dan mucikari. Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap WTS dan mucikari dengan memberikan siraman rohani dan pelatihan agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya.

<sup>6</sup> Op.cit. Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim.

### 4.3 Gerakan Melukis Harapan

Gerakan Melukis Harapan (GMH) merupakan yayasan yang yang dibentuk sebagai respon para pemuda-pemuda Kota Surabaya yang peduli dan berpartisipasi dalam kebijakan penutupan lokalisasi dolly oleh Walikota Surabaya. Yayasan GMH dibentuk pada tanggal 14 Juni 2014 saat adanya deklarasi penutupan lokalisasi dolly oleh Ibu Risma sebagai walikota Surabaya. Pelopor utama terbentuknya yayasan GMH ini mahasiswa ITS bernama Dalul Nizmi yang merespon adanya kebijakan walikota tersebut. Awal mula GMH bernama Pemuda Surabaya, kemudian di ubah menjadi Gerakan Melukis Harapan. Penutupan lokalisasi dolly memunculkan dampak negatif baru yakni banyaknya pengangguran serta penurunan pendapatan warga, dimana selain aktivitas bisnis prostitusi ada sektor ekonomi lain yang hidup dari keramaian dolly yakni salon, parkir, pedagang asongan, warung kopi, pedagang keliling, pedagang makanan, dan lain-lain. GMH menyadari bahwa kerumitan masyarakat terdampak pasca penutupan lokalisasi dolly tidak hanya bisa diatasi oleh Pemerintah Kota Surabaya saja, namun GMH hadir untuk membantu dalam mengatasi dampak yang terjadi dan memahami masyarakat dan menerima keluhan-keluhan masyarakat pasca penutupan lokalisasi dolly.

“... awal mengubah *mindset* orang itu susah, tapi kita laksanakan serentak *door to door*. Masalah diterima atau tidak niat kami dan pemerintah, itu tidak menjadi masalah besar, yang terpenting hanya memperkenalkan dulu bagaimana kawasan yang mempunyai citra negatif akan dirubah menjadi citra yang positif. Dengan begitu masyarakat akan menerima.”<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Wawancara dengan Adam selaku Humas Gerakan Melukis Harapan, tanggal 24 Juli 2017 pukul 14.57 WIB

GMH menghidupkan dolly kembali dengan wajah yang berbeda dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun dolly dengan citra yang positif. Dolly diubah menjadi kampung eduwisata dimana berisi tentang kawasan tematik mulai dari tema sejarah perubahan dolly, lingkungan, kesenian dan rumah anak di kawasan yang hampir 1 kelurahan tersebut.

Gerakan Melukis Harapan ini terus akan membenahi kawasan eks lokalisasi pasca penutupan dengan mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terdampak. Dalam hal ini, GMH berusaha untuk terus mendampingi masyarakat terdampak sehingga dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kayak gini ini mbak, kudu di dampingi. Nggak Cuma diberi pelatihan hanya beberapa hari, terus dilepas gitu aja. Jelas mereka bosan jadi monoton. Itu yang membuat masyarakat kurang tertarik untuk ikut pelatihan”.<sup>8</sup>

Yayasan Melukis Harapan menjadi tempat pelindung bagi masyarakat terdampak yang mengalami kesusahan pasca penutupan lokalisasi dolly. Hingga tahun 2017 ini, GMH memiliki 6 UKM yang di bina melalui GMH dan didukung oleh Pemerintah Kota Surabaya dan masih berkembang hingga saat ini, beberapa diantaranya :

### **1. Tempe Bang Jarwo**

Tempe Bang Jarwo merupakan usaha produk makanan yang di bina oleh yayasan GMH. Awal mula usaha Tempe Bang Jarwo ini sebenarnya bukan dari

<sup>8</sup> Ibid. Wawancara dengan Adam.

GMH sendiri, melainkan dari mantan seorang pedagang kopi keliling di Gang dolly dan mantan preman bernama Jarwo Susanto dengan sapaan Bang Jarwo.

Jarwo Susanto adalah salah satu orang yang paling memberontak adanya penutupan lokalisasi.

“Dulu jualan kopi pake rombongan ngunu mbak, dari jam 6 malem sampe jam 4 pagi. Entuk duit uakeh mbak. Aku menantang untuk PKL-PKL gak dapet kompesasi mbak, ya gak setuju aku.”<sup>9</sup>

Sebelum penutupan lokalisasi dolly, Jarwo Susanto berjualan kopi dengan menggunakan rombongan didepan wisma barbara. Pendapatan yang diterima pun cukup banyak, Rp. 600.000 – Rp. 1.000.000,- / malam. Biasanya mulai berjualan dari pukul 18.00 hingga pukul 04.00 pagi dengan menghasbiskan 5 – 7 kg gula per hari. Jarwo tinggal bersama keluarganya di RW 10 dengan sebagian besar juga pedagang dan tukang masak di wisma. Hal ini yang membuat Jarwo menentang kebijakan Bu Risma dalam penutupan lokalisasi karena para PKL yang tidak mendapatkan kompensasi maupun bantuan apapun kecuali PSK dan mucikari.

Hampir seluruh foto dan artikel mengenai penutupan lokalisasi dolly yang di terbitkan oleh berbagai media, selalu ada wajah Jarwo Susanto dalam pemberontakan melawan Pemerintah Kota Surabaya. Bang Jarwo saat itu sempat menjadi buronan polisi karena menjadi pelopor tindak anarkis terhadap penolakan penutupan dolly. Saat menjadi buronan dan wilayah kawasan dolly dijaga ketat oleh pihak kepolisian, Bang Jarwo mengamankan diri di Keboan

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bang Jarwo selaku Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 15:01 WIB

Anom, Sidoarjo tempat tinggal saudaranya. Sebelumnya, saudara Bang Jarwo merupakan wirausaha tempe. Saat itu Bang Jarwo mulai belajar cara untuk memproduksi tempe dan segala makanan yang berbahan dasar tempe.

**Gambar 4. 2 Sepeda dan Kerbau Putih Bang Jarwo**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis, 2017*

Dengan menggunakan Kerbau putih miliknya hasil urunan bersama teman-temannya, Bang Jarwo gunakan untuk keliling seluruh kawasan lokalisasi dolly untuk menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Bu Risma dan juga sepeda kunonya. Hal itu menjadi hal yang menarik perhatian karena tujuan Bang Jarwo menggunakan atribut seperti itu guna mencari perhatian pihak Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan orasi-orasi penentang penutupan lokalisasi dolly.

“dulu itu pas lagi demo-demo gara-gara bu Risma mau nutup, kan ada aktivis pemuda buruh, jadi disuruh *wes pake kebo ae cek mantep* (pakai kerbau saja biar mantap). Sampe ada pelatihan buat demo juga kok, *saking* (sampe begitu) niatnya.<sup>10</sup> (Wawancara dengan Bang Jarwo selaku Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 15:01 WIB)

<sup>10</sup> Ibid.

Bang Jarwo memberanikan diri untuk kembali ke tempat tinggalnya di daerah Kupang Gunung Tembusan, Kelurahan Putat Jaya. Dengan modal Rp. 70.000 dan 3kg kedelai pemberian saudaranya, Bang Jarwo memulai usahanya dengan memproduksi tempe.

*“aku isok ngene iki yo karna sodaraku yng di darjo iku mbak. De e sing ngajari aku gawe tempe, ngek i aku modal, ngek i aku bahan produksi pisan. Terus aku dodolan, keliling nganggo sepeda. (saya bisa begini ini ya karena saudara saya mbak. Dia yang mengajariku membuat tempe, memberikan saya modal, memberikan bahan produksi juga. Terus saya jualan, keliling menggunakan sepeda)”*.<sup>11</sup>

Awal usaha tempe, Bang Jarwo mengalami kesusahan dalam penjualannya.

Hanya dengan berkeliling menjajakan tempe hasil produksinya, tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adanya GMH membantu Bang Jarwo untuk memasarkan hasil produksinya dan mulai mengajari pembukuan agar mudah untuk manajemen pemasukan dan pengeluaran tiap hari. Dengan kegigihannya, hingga saat ini sudah mencapai 20kg kedelai / hari dan terjual 400 bungkus tempe/hari. Oleh adanya GMH yang membina usaha Tempe Bang Jarwo ini, masyarakat Kota Surabaya mulai mengenal Tempe Bang Jarwo hasil masyarakat terdampak penutupan dolly. GMH membantu memasarkan hasil produksinya melalui Media Sosial dan mengikuti segala pameran-pameran.

<sup>11</sup> Ibid.

**Gambar 4. 3 Tempe Bang Jarwo dan Nugget Tempe**



*Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017*

Ada 3 produk yang di produksi oleh Bang Jarwo yakni :

1. Tempe @ Rp. 1000,-/bungkus
2. Nugget @ Rp. 15.000,-/bungkus
3. Kripik tempe @ Rp. 10.000,-/bungkus

“Mbiyen tempe bang jarwo iku mek tempe tok mbak, saiki macem-macem. Mulai dari jualan keliling sampe banyak yang jadi reseller nugget tempe. Anak-anak GMH itu pengaruh banget mbak bagi usaha-usaha masyarakat dolly untuk dipasarkan”.<sup>12</sup> (Wawancara dengan Bang Jarwo selaku Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 15:01 WIB)

GMH menjadi peran penting bagi usaha-usaha masyarakat dolly.

Terutama tempe bang jarwo ini. melalui media sosial, kini Tempe Bang Jarwo mulai dikenal khalayak umum. Hingga kini, usaha Tempe Bang Jarwo ini berkembang pesat hingga memperoleh omzet hampir Rp. 400.000,- /hari.

Selain itu juga Jarwo Susanto, sang pemilik usaha tersebut bersama istrinya,

<sup>12</sup> Ibid.

Munasifah yang seorang mantan PSK ini sering di menjadi motivator dalam seminar yang diselenggarakan oleh Universitas-Universitas serta masyarakat terdampak penutupan lokalisasi di daerah lain.

Usaha tempe Bang Jarwo merupakan usaha produksi rumahan yang Ia geluti bersama istrinya, Munasipah. Proses yang panjang mereka lalui hingga dapat mencapai tahap seperti ini. Sebelum lokalisasi Dolly ditutup, Pemerintah Kota Surabaya berjanji untuk memberikan bantuan sosial berupa modal dana usaha bagi masyarakat terdampak. Namun, tidak bagi Jarwo yang tidak mendapat bantuan modal dari Pemerintah Kota Surabaya. Kekecewaan Jarwo terhadap janji Pemerintah Kota Surabaya tidak menghentikan niatnya untuk mencari modal untuk membeli alat produksi tempe.

“Dulu disuruh ikut pelatihan sepatu sama lurah. Tapi aku bilang minta *mesin giling tempunya po o, karena capek injak-injak. Tapi yo suwe entuk e mbak* (meminta mesin giling tempe karena capek menginjak-injak. Tetapi ya lama dapatnya mbak). Terus pas ada kemensos dateng, aku langsung kirim proposal minta modal. Akhirnya dapet”.<sup>13</sup>

Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan kompensasi bagi masyarakat terdampak sehingga masyarakat menuntut untuk diberi kompensasi. Begitu pula usaha-usaha yang di jalankan masyarakat terdampak, tidak mendapatkan modal. Pemerintah hanya mengembangkan UKM sepatu dan batik sehingga diberikan tempat usaha dan modal yang besar bagi UKM

<sup>13</sup> Ibid.

tersebut. Namun UKM perorangan, tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

## 2. Samijali

Samijali merupakan UKM dari kelompok ibu-ibu PKK RT 11 RW 3, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Sebelum kawasan lokalisasi Dolly ditutup, mereka memiliki aneka usaha seperti laundry, berjualan makanan, baju dan jasa sewa kamar kost.

“..Setelah Dolly ditutup, kami ajak mereka untuk memproduksi kripik samijali karena usaha mereka sebelumnya mati.”<sup>14</sup>  
(Wawancara dengan Adam selaku Humas Gerakan Melukis Harapan, tanggal 24 Juli 2017 pukul 14.57 WIB)

Kampung yang ditunjuk sebagai pusat produksi Samijali adalah Putat Jaya Gang 4A. Pengrajin Samijali mendapat pasokan Samiler mentah dari Sidoarjo dibantu oleh GMH.

<sup>14</sup>Op.cit.. Wawancara dengan Adam.

**Gambar 4. 4 Kampung Samijali**

*Sumber : Dokumentasi penulis, 2017.*

RT 11 RW 3 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan pun kini dikenal sebagai Kampung Samijali dan sepanjang gang tersebut terlihat apik dengan adanya mural art dan diberi nama Kampung Samijali. Hal ini juga atas ide dari GMH untuk mengubah lokasi yang dulu bekas bisnis prostitusi hingga menjadi lokasi kampung wisata tematik. Dengan mengajak ibu-ibu PKK dalam usaha UKM ini, Tugas ibu-ibu tersebut adalah menggoreng, menambah rasa dan mengemas produk. Kripik samijali tersedia dalam berbagai pilihan rasa, mulai dari keju, sapi panggang, original dan juga balado.

**Gambar 4. 5 Keripik Samijali**

*Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis, 2017.*

Ada 2 packing kripik Samijali dan harganya pun berbeda, yakni:

1. Isi 100 gram @ Rp. 15.000,-
2. Isi 70 gram @ Rp. 10.000,-

Pemesanan minimal Samijali biasanya sekitar 50-350 pack, jika sedang ramai bisa meroket hingga 1000-1500 pack. Usaha ini tidak akan berjalan jika tidak adanya proses pemasaran. Oleh karena itu pula, GMH mempermudah pemasaran melalui media online. Pemesananpun juga bisa melalui media online. Omset yang dihasilkan pun mencakup Rp. 300.000,-/hari jika pada hari biasa. Pendapatan yang diperoleh mungkin tidak sebanding, dibanding pendapatan yang dulu di dapatkan saat sebelum Dolly ditutup. Namun, ada manfaat lain yang bisa di rasakan pasca penutupan dolly yakni kebahagiaan anak-anak yang dahulu minder karena tinggal di Gang Dolly, kini menjadi kampung wisata.

### 3. Orumy

Orumy merupakan minuman olahan dengan bahan dasar rumput laut. Warga RT 3 RW 3 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan ini termasuk warga terdampak kebijakan penutupan lokalisasi. Namun, dengan adanya pemberdayaan masyarakat dikawasan bekas lokalisasi dolly ini mengembangkan usaha dalam bidang UKM.

Gambar 4. 6 Kampung Orumy



Sumber : Dokumentas Penulis, 2017.

Warga RT 3 RW 3 mengolah rumput laut menjadi minuman olahan berbagai macam rasa. Sebelumnya, warga Putat Jaya ini tidak memiliki keahlian untuk membuat sebuah olahan yang dapat menghasilkan uang. Dipertengahan tahun 2016, warga diberikan *workshop* oleh mahasiswa membuat olahan minum berbahan dasar rumput laut. Proses produksi olahan ini cukup mudah dengan dibantu warga sekitar dimana setiap ada pesanan atau kegiatan di Surabaya, mereka membuat stok minuman dengan 2 adonan resep. Ada 4 rasa yang ditawarkan yakni rasa Leci,

Strawberry, lemon dan green tea. Minuman orummy ini di banderol dengan harga Rp. 10.000,-/botol.

**Gambar 4. 7 Minuman Orummy Rasa Leci**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis, 2017*

## BAB V

# ANALISIS DAMPAK PASCA PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY TERHADAP SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT TERDAMPAK

Salah satu penyakit sosial dalam masyarakat yakni kegiatan prostitusi adalah gejala permasalahan sosial yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah saja, melainkan tugas dari semua elemen masyarakat. Adanya tujuan bersama, koordinasi dan implementasi aktor sangatlah diperlukan. Penanganan kegiatan prostitusi merupakan penanganan bersama. Penanganan permasalahan-permasalahan sosial melibatkan berbagai aktor dengan memaksimalkan penanganan. Dalam sebuah penanganan dan implementasi, akan mengakibatkan dampak langsung pada masyarakat terdampak. Dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan juga harus bertanggung jawab untuk meminimalisir dampak yang dirasakan oleh masyarakat terdampak. Seperti yang diungkapkan oleh Finsterbusch and Motz dalam konsep analisis dampak sosial nya dalam menentukan dampak apa yang terjadi dalam sebuah kebijakan.

### 1.1 Dampak Individual

Dampak kebijakan tidak terlepas dari masyarakat dan juga individu itu sendiri. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa lokalisasi dolly sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu bahkan sebelum masyarakat sekitar berada di kawasan tersebut. Jadi, bisnis prostitusi sudah melekat dalam kehidupan mereka. Tak jarang pula rumah warga bercampur juga dengan wisma. Begitu juga anak-anak yang

seharusnya bermain bebas dengan teman lainnya, namun di kawasan dolly tidak begitu. Anak-anak bermain dan bergabung dengan para WTS yang sedang menunggu pelanggannya. Keadaan tersebut sudah terbiasa dan menjadi kegiatan sehari-hari.

Ketika kebijakan Bu Risma dengan menutup lokasi dolly, banyak warga yang menentang dengan penutupan tersebut. Permasalahan ekonomi menjadi aspek yang paling ditekankan dalam penerapan kebijakan penutupan lokasi dolly. Selain WTS dan mucikari, masyarakat sekitar juga menggantungkan hidupnya dalam aktivitas prostitusi itu. Tidaklah mudah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan langkah yang dimulai dari nol, selain terbatasnya biaya dan fasilitas, *mind-set* yang mereka miliki juga perlu di ubah agar bisa menegas dari aktivitas bisnis prostitusi.

*“lah piye mbak, uripku i susah saiki tapi pemerintah i ra peduli. Aku mek dodol kletik-kletik iki ae mbak saiki. Niat e pemerintah i apik tapi luwih apik maneh yen dibarengi peduli karo rakyat kecil. Pelatihan kui nggak jamin nek awak dewe isok duwe luwih apik daripada biyen...”* (Gimana mbak, hidup saya susah sekarang tetapi pemerintah tidak peduli. Saya Cuma jualan jajanan saja mbak sekrang. Niat pemerintah itu sudah bagus tetapi lebih bagus jika sejajar dengan juga peduli terhadap rakyat kecil. Pelatihan itu tidak menjamin jika saya bisa mendapat lebih bagus daripada dulu)<sup>1</sup> (Wawancara dengan Ibu Siti selaku masyarakat terdampak penutupan lokasi dolly)

Dari pernyataan yang dilontarkan dengan Ibu Siti tersebut, bahwa Pemerintah tidak peduli dengan masyarakat terdampak sebab Pemerintah Kota Surabaya hanya memberi kompensasi terhadap PSK dan mucikari saja, namun masyarakat

<sup>1</sup>Op.cit. Wawancara dengan Ibu Siti.

terdampak tidak. Namun, disini lain kebijakan penutupan dolly ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi semua pihak.

Perbedaan pendapatan dari sebelum bisnis prostitusi ini ditutup yang dirasakan oleh WTS sangat besar. Sebelum ditutup, pendapatan WTS per-bulan mencapai Rp. 10.0000.000 – Rp. 15.000.000. pendapatan tersebut dibagi antara WTS dengan mucikari dari tarif per- satu kali *service* sekitar Rp. 200.000. sedangkan sekarang, para WTS yang masih beroperasi mendapatkan Rp. 1.000.000 per minggu dengan tarif 100.000 per- satu kali *service*. Bukan hanya WTS dan mucikari saja, melainkan masyarakat terdampak yang juga merasakan hal tersebut. Sebelum ditutup, masyarakat memanfaatkan aktivitas bisnis prostitusi dengan berjalan kopi, makanan, rokok maupun sembako.

“Dulu itu aku dapet bisa sampe delapan ratus ribe per malemnya mbak, *soal e ruame dodolanku. Tapi ya gitu, gak nyantol blas mbak, tak gae mabuk-mabukan. Saiki entuk mek empat ratus ribuan per hari. Tapi ya disyukuri ae mbak.* (dulu saya bisa mendapat empat ratus ribu rupiah per malam mbak, karena jualan saya ramai sekali. Tapi ya begitu, tidak bisa masuk dalam pendapatan saya karena saya pakai untuk mabuk)”.<sup>2</sup> (Wawancara dengan Jarwo Susanto selaku mantan Preman pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 15.01 WIB)

Dalam sebuah kebijakan yang dilaksanakan, ada untung dan rugi didalamnya.

Keberadaan lokalisasi dolly yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, mengundang banyak orang untuk mencari untung dari keberadaannya. Selain WTS yang diperjual-belikan tubuhnya, banyak pelaku usaha sektor informal yang berusaha mencari nafkah dari sana. Lokalisasi dolly berada di tengah-tengah pemukiman warga di tengah Kota Surabaya. lokasi yang strategis itu pula,

<sup>2</sup>Op.cit. wawancara dengan Jarwo Susanto

masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya di tempat bisnis prostitusi tersebut.

Perputaran uang di wilayah dolly bisa mencapai 2 Milyar/ hari.

Secara resmi lokalisasi Dolly udah ditutup namun bukan berarti Pemerintah berhasil mematikan bisnis prostitusi. Biaya kompensasi yang di berikan kepada WTS sebesar Rp. 5.050.000 dan untuk mucikari sebesar Rp. 5.000.000 tidak disetujui oleh sasaran.

“Mereka (WTS) yang menerima kompensasi itu biasanya mereka yang tidak bisa berbisnis pelacuran lagi mbak. Biasanya ya alasan usia sih”.<sup>3</sup> (Wawancara dengan Nurma selaku masyarakat terdampak pada tanggal 15/07/17 pukul. 13.11 WIB)

Eksistensi bisnis prostitusi terbangun karena logis bisnis yaitu adanya *supply and demand*, dimana para WTS membutuhkan uang dan pelanggannya membutuhkan kepuasan seksual. Hal ini yang sudah mendarah daging hingga saat ini pun, bisnis prostitusi itu masih ada. Kebijakan penutupan lokalisasi dolly memang pasti mendapatkan perlawanan dari beberapa pihak, terutama pihak yang diuntungkan dengan bisnis prostitusi.

Keadaan sosial saat lokalisasi Dolly masih aktif dengan bisnis prostitusinya, terdapat suatu realitas mengenai anak di bawah umur yang seolah juga bertindak sebagai makelar disana. Namun, pasca penutupan ini, psikologis individu yang berpengaruh mengenai anjloknya pendapatan yang diterima dan pengangguran semakin tinggi

<sup>3</sup> Op. cit. Wawancara dengan Nurma

**Gambar 5. 1 Wisma yang Dibeli Pemerintah**

*Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis, 2017*

Nurma, penduduk sekitar lokasi menyatakan bahwa adanya lokasi prostitusi di lingkungan pemukiman menimbulkan banyak keresahan bagi masyarakat sekitar, terutama keamanan. Masyarakat sekitar lokasi dolly merasakan dampak adanya bisnis prostitusi tersebut. Hadirnya prostitusi di kawasan tempat tinggal mereka, bukan hanya memberi dampak mental bagi anak-anak, namun juga dampak langsung seperti kekerasan juga. Hubungan antara mucikari dengan PSK kini tidak ada lagi, sekarang pemilik “kos-kosan” menjadi mucikari secara tidak langsung namun mereka hanya menyediakan fasilitas saja bukan mencari pelanggan.

Tujuan penutupan memang telah tercapai yaitu untuk melindungi anak-anak dari lingkungan yang tidak kondusif akibat seks bebas yang beroperasi dan menyatu dengan pemukimannya, namun kenyataannya hingga kini penutupan yang dilakukan semakin menimbulkan persoalan baru mengenai pendapatan individu yang terpangkas sehingga tidak mampu lagi memperoleh hasil yang

melimpah seperti saat lokalisasi masih beroperasi. Juga banyak masyarakat luar Surabaya pun berdatangan karena rasa penasarannya untuk melihat kawasan dolly sekarang.

Kebijakan penutupan lokalisasi tersebut menimbulkan bisnis prostitusi terselubung dengan menyebabkan penyebaran HIV AIDS yang tidak terkontrol.

Memang benar, bahwa penyebaran HIV AIDS ini tidak menyebar di dalam kawasan eks dolly saat ini namun penyebaran ini berada pada pihak luar yakni pelanggan PSK yang masih aktif itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena pada saat lokalisasi dolly masih ada, Dinas Kesehatan sering melakukan vaksinasi pada PSK yang terdata di kawasan dolly per 3 bulan hingga minimnya penyebaran HIV AIDS pada saat itu. Namun, kini sejak ditutupnya lokalisasi dolly, sudah tidak ada lagi vaksinasi yang di adakan oleh Dinas Kesehatan tersebut.

Untuk memudahkan pembaca maka dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dampak pada masyarakat tersebut penulis sederhanakan dalam tabel berikut :

**Tabel 5. 1 Dampak Individual**

<b>Dampak Individual</b>	<b>Unit Sosial Terdampak</b>
Biologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpengaruh terhadap biologis individu yakni menularkan HIV AIDS kepada pelanggan namun pada pihak luar bukan pada masyarakat setempat.</li> </ul>
Psikologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpengaruh terhadap psikologis individu terutama anak-anak</li> </ul>
Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumah tidak tergesur akibat penutupan dolly</li> <li>Kampung dolly menjadi lebih berwarna dengan adanya <i>mural act</i> dan warna-warni</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampung dolly menjadi kampung edukasi</li> <li>• Dolly sekarang menjadi tempat wisatawan berkunjung</li> </ul>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan turun drastis namun, saat ini sudah membaik meskipun tidak mencapai jumlah pendapatan pada saat lokalisasi masih ada.</li> <li>• Keuntungannya, ada pendapatan ketika wisatawan berkunjung ke kampung dolly</li> </ul>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih menjadi acuh terhadap satu sama lain, sebab ada rasa takut terhadap resiko.</li> </ul>

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017.

### 1.2 Dampak Operasional

Dalam kebijakan penutupan lokalisasi bertujuan selain untuk mengentaskan angka Wanita Tuna Susila yang tinggi di Kota Surabaya, juga membersihkan nama Kota Surabaya bukan lagi Kota Dolly dimana lokalisasi tersebut merupakan lokalisasi yang udah dikenal oleh manca negara. Dalam mengukur berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan, tidaklah dengan waktu yang singkat. Dengan melalui berbagai proses yang alot hingga dapat menjadikan kawasan eks dolly menjadi Kampung edukasi yang dapat menjadi salah satu kampung wisata di Kota Surabaya.

Nama Dolly memang belum bisa hilang dalam sejarah. Namun, dengan adanya kebijakan ini telah menjadikan lokalisasi di gang dolly itu mati. Tri Rismaharini menggerakkan seluruh SKPD yang terkait dalam melaksanakan pelatihan keterampilan untuk para mantan WTS, mucikari serta masyarakat terdampak yang ingin belajar terampil. Selain itu pula, hingga tahun 2016

kawasan eks dolly mampu membentuk UKM-UKM yang pada awalnya berasal dari berbagai pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Kelurahan Putat Jaya kini sudah memiliki kurang lebih 41 UKM yang tersebar di beberapa RW. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan yang dilaksanakan Pemerintah Kota sebelum kebijakan penutupan lokalisasi dolly direalisasikan, dapat membuahkan hasil. Namun, dari beberapa UKM tersebut memiliki kendala dalam pemasaran produk mereka sehingga produk yang dihasilkan belum mendapat keuntungan yang signifikan.

**Gambar 5. 2 Dolly Saiki Point**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis, 2017*

Pada tanggal 13 Mei 2017, Tri Rismaharini meresmikan Dolly Saiki Point, ruang pameran baru untuk UKM warga terdampak. Dolly Saiki Point terletak di Putat Jaya Gang Lebar, dan setidaknya ada 14 UKM masyarakat terdampak yang memamerkan hasil karyanya di bangunan wisma yang sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Surabaya.

“sekarang kan sudah banyak warga yang membuat usaha sendiri, sebelumnya masih mencar-mencar tempatnya, sekarang jadi satu tempat begitu.”<sup>4</sup> (Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim, Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 16.34 WIB.)

Beberapa UKM yang dipamerkan di Dolly Saiki Point (D.S.P) yakni samiler, batik tulis, batik jumput, aneka makanan dan juga minuman. Namun selama ini tempat produksi masih di rumah masing-masing. Hal ini menjadi inovasi bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan ruang pameran.

**Gambar 5. 3 Tampak Dalam Dolly Saiki Point**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis, 2017*

Selain UKM yang telah dirasakan sebagai dampak positif yang ditimbulkan, begitu pula eks wisma yang sudah dibeli pemerintah Kota Surabaya menjadi tempat yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar Kelurahan Putat Jaya.

Tidak lagi terlihat para wanita yang sedang duduk dengan menggunakan pakaian super mini dan make-up. Tidak lagi pula terdengar musik-musik yang biasanya

<sup>4</sup>Op.cit. Wawancara dengan Aziz Muslim

bergema pada wisma-wisma. Tidak ada lagi keramaian di malam hari dengan aktivitas bisnis prostitusi. Demikian bahwasannya beberapa wisma kini tampak papan milik pemerintah sebagai simbol bahwa wisma tersebut telah di beli oleh pemerintah.

**Gambar 5. 4 Wisma Barbara yang di beli oleh Pemerintah**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis, 2017*

Beberapa wisma yang telah dibeli Pemerintah telah dialih fungsikan menjadi tempat pelatihan maupun taman bermain. Sebab, di Kelurahan Putat Jaya sebelumnya tidak ada satupun taman yang menjadi fasilitas bagi anak-anak yang ingin bermain ataupun masyarakat yang hendak berolahraga.

**Gambar 5. 5Wisma yang dibeli oleh Pemerintah**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis, 2017*

Pembelian wisma oleh Pemerintah dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya kontrol atau bentuk pencegahan atas beroperasinya kembali aktivitas bisnis prostitusi. Namun, upaya tersebut tidak juga berjalan lancar, sebab beberapa dari pemilik wisma yang menolak untuk menjual wismanya.

“Dulu kan mau dibeli Ibu (bu risma) tapi ndak mau. Wong-wong kan mikir wes ndak mungkin iso ditutup iki wes pirang-pirang taun. (dulu wisma itu mau di beli oleh Bu Risma tetapi tidak mau. Pikirnya orang-orang tidak mungkin karena sudah bertahun-tahun)”<sup>5</sup> (wawancara dengan ibu Siti selaku masyarakat terdampak penutupan lokalisasi dolly 15/07/17 pukul 15.11 WIB)

Untuk memudahkan pembaca maka dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dampak pada masyarakat tersebut penulis sederhanakan dalam tabel berikut :

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Siti selaku masyarakat terdampak penutupan lokalisasi dolly pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 15.11 WIB

**Tabel 5. 2 Dampak Operasional**

Dampak Operasional	Unit Sosial Terdampak
Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya pendapatan dalam kawasan dolly terlebih bagi masyarakat yang menggantungkan perekonomian mereka terhadap aktivitas prostitusi</li> <li>• Masih adanya bentrok antar warga terhadap penolakan penutupan</li> <li>• Adanya perdagangan perempuan (human trafficking) hingga saat ini</li> <li>• Masih banyak orang asing yang berkunjung ke kawasan dolly dimana anggaan dolly masih ada, anak-anak yang tidak terjaring PSK pun menjadi korban.</li> </ul>
Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah dolly yang dulu penuh germelap, sekarang sepi</li> <li>• Tidak ada lagi pemabuk yang membahayakan</li> <li>• Tidak ada lagi preman yang membahayakan</li> <li>• Anak-anak menjadi bebas bermain tanpa diganggu oleh preman</li> <li>• Rasa khawatir orang tua yang tidak lagi terhadap anaknya yang keluar rumah</li> <li>• Kawasan dolly menjadi pusat perhatian khalayak umum karena sudah menjadi kampung edukasi</li> <li>• Sering diliput oleh berbagai media karena kebijakan bu Risma yang kontroversi terhadap penutupan dolly</li> </ul>

Sumber : Olahan Penulis, 2017

### 1.3 Dampak pada Masyarakat

Kebijakan penutupan lokalisasi dolly ini membawa konsekuensi atas terjadinya perubahan. WTS yang menjadi daya tarik utama bagi pelanggan maupun ekonomi orang-orang yang ikut menjalankan usaha pada bisnis prostitusi yang beroperasi, kini tidak lagi dapat ditemui dan disewa dengan bebas. Keadaan sosial yang menjadi sepi dan pendapatan ekonomi yang menurun, hal ini menjadi faktor utama dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Menghilangnya WTS akibat penutupan lokalisasi, nyata dirasakan oleh masyarakat sebagai pemicu persoalan yang baru. Disisi lain, penutupan lokalisasi bertujuan untuk menekan angka penjualan manusia atau human trafficking serta kekerasan gender. Namun, pada kenyataannya hingga kini angka pengangguran serta menambah angka kemiskinan terjadi . hal ini dikarenakan kebijakan yang diberlakukan kurang menimbang perihal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dimana kesehariannya hanya mengandalkan rutinitasnya pada aktivitas bisnis prostitusi. Alhasil kurangnya pertimbangan akan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan berdampak pada masyarakat yang telah terbiasa mendapat pendapatan dengan mudah dan cepat.

Pemerintah gencar melaksanakan pelatihan dan sosialisasi untuk merubah cara pandang masyarakat soal upah yang mudah dan cepat didapatkan.

“Pelatihan kayak menjahit kan ya harus juga dikasih mesin juga. Misal ada 30 orang yang minat ikut tapi mesin yang dikasih pemerintah Cuma 3 mesin, gitu gantian lak gak masuk akal. Minta tapi gak di pedulino yo males wes. (mau minta mesin lagi tetapi tidak di pedulikan yasudah, malas)”<sup>6</sup>(wawancara dengan ibu Siti

<sup>6</sup> Ibid. Wawancara dengan Ibu Siti.

selaku masyarakat terdampak penutupan lokalisasi dolly 15/07/17 pukul 15.11 WIB)

Pada kenyataannya di lapangan memang kendala demikian diluar prediksi pihak pemerintah beserta dinas sosial yang terkait. Memberikan pelatihan hanya semata bertujuan untuk mengasah keahlian dan mengubah cara pandang masyarakat sekitar soal upah yang didapat dengan cepat. Namun, kenyataannya yang dirasakan masyarakat berbanding dengan yang diharapkan oleh Pemerintah karena pengasahan keahlian tidak diimbangi dengan pemberian sarana yang mendukung. Hal ini menyebabkan pelatihan tidak menjadi upaya Pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat terdampak.

Tanggapan dari masyarakat terdampak mengenai pemberdayaan masyarakat terdampak oleh Pemerintah Kota Surabaya guna mengentaskan dampak yang terjadi di dalam masyarakat yakni masyarakat terdampak tidak membenarkan adanya pemberdayaan dari Pemerintah Kota Surabaya. Karena mereka tidak merasa diberdayakan dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah hanya dianggap selintas berlalu saja. Oleh karena itu, dampak dari pelatihan tersebut diserahkan kembali pada warga, tentang bagaimana mengembangkan usaha dan juga berwirausaha tersebut bergantung pada kemauan dari warga.

“Pekot hanya melakukan pelatihan-pelatihan hanya dalam hitungan hari saja, namun tidak untuk mendampingi kami hingga kami mentas. Istilahnya Pekot hanya ingin liat kami mentas tanpa liat prosesnya itu sama saja hanya menuntut saja mbak.”<sup>7</sup> (wawancara dengan Nurma selaku masyarakat terdampak pada tanggal 15/07/17pukul. 13.11 WIB)

<sup>7</sup> Op.cit. Wawancara dengan Nurma

Disisi lain, banyak juga warga yang merasa di kembangkan, namun hal ini kurang tepat sasaran karena tidak semua masyarakat yang terdampak itu mau berpartisipasi untuk ikut dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut. Menurut Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial mengatakan bahwa mereka selalu kesulitan untuk mencari massa dalam memenuhi kuota pelatihan yang akan di adakan. Padahal dalam pelatihan tersebut, tidak hanya sekedar mengikuti pelatihan saja, namun juga diberi uang transport dan uang makan, selain itu ada kompensasi berupa modal untuk membuka usaha sendiri, mengembangkan hasil dari pelatihan yang didapat jika mereka mendapat nilai yang baik selama mengikuti pelatihan.

Bahkan banyak warga yang seharusnya tidak berhak mengikuti pelatihan pun banyak dijumpai, namun alasan mereka mengikuti pelatihan karena ingin berkembang maka mereka mengajukan diri sendiri untuk mengikuti dan memenuhi kuota pelatihan yang seharusnya untuk masyarakat terdampak. Oleh karena itu, modal yang seharusnya untuk masyarakat terdampak, menjadi kepemilikan masyarakat dari luar sasaran tersebut.

Pemberian pelatihan kepada WTS ini tidak memberikan dampak positif bagi pesertanya, yang disebabkan oleh sedikitnya waktu untuk pelatihan dan jumlah pertemuan yang sedikit pula. Sulit bagi masyarakat untuk mempelajari hal baru dalam waktu yang singkat terlebih para WTS yang selama ini bekerja tanpa adanya keahlian. Dan juga banyaknya jumlah peserta yang ikut serta menambah kesulitan bagi WTS agar lebih dapat cepat menyerap pembelajaran keterampilan yang diberikan. Pemerintah Kota Surabaya berusaha membantu

masyarakat lokalisasi dolly untuk segera keluar dari masalah ekonomi dan prostitusi, namun usaha ini tidak akan berhasil hanya dengan usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, butuh kerjasama dengan masyarakat terdampak lokalisasi dolly untuk ikut juga dalam berpartisipasi.

Demikian juga, kenyataan dilapangan pula menegaskan bahwa aktivitas bisnis prostitusi yang diharapkan oleh Pemerintah untuk di berantas. Namun, hingga saat ini aktivitas bisnis prostitusi masih ada dan masih tetap berjalan dengan lancar.

**Gambar 5. 6 Salah Satu Rumah Kost sebagai Wisma**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis, 2017*

Aktivitas prostitusi memang masih ada di kawasan dolly dan masyarakat sekitar pun mengiyakan bahwa bisnis tersebut masih berjalan dengan biasanya. Namu dalam konteks yang tidak blak-blakan. Rumah warga yang bertuliskan kos-kosan yakni adalah wisma. Mereka memberi nama kos-kosan hanya karena agar tidak ketahuan.

“Masih ada mbak. Jelas masih ada. Tapi nggak se-fulgar dulu. Jam 21.30 sudah mulai banyak yang dateng kesini mbak. Apalagi di makam kembang kuning, banyak sekali orang yang menjajakan dirinya mbak..”<sup>8</sup> (wawancara dengan Nurma selaku masyarakat terdampak 15/07/17 pukul. 13.11 WIB)

Seperti yang dijelaskan oleh Nurma, Meski Pemerintah Kota Surabaya sudah menggerakkan Satpol PP untuk terus melakukan razia pada hari jum’at hingga minggu. Namun, upaya tersebut tidak menjadi persoalan yang berat bagi mereka yang masih menjalankan bisnisnya.

### Gambar 5. 7 Salah Satu Rumah Kost



Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis, 2017

Bukan hanya wisma yang berkedok rumah kost, tempat lain yang dijadikan lokalisasi saat ini yakni Makam Kembang Kuning merupakan makam umum yang terletak di Kecamatan Sawahan yang kini dialih fungsikan sebagai tempat lokalisasi setelah lokalisasi dolly ditutup.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Nurma selaku masyarakat terdampak pada tanggal 15 Juli 2017 pukul. 13.11 WIB

**Gambar 5. 8 Makam Kembang Kuning tempat Lokalisasi Pasca Penutupan Dolly**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis*

Bukan hanya Fitri yang masih menjadi WTS hingga kini, namun masih ada puluhan temannya yang juga masih beroperasi. Hal ini menjadi salah satu kegagalan Pemerintah yang belum tuntas dalam mengentaskan masalah Tuna Susila di Kota Surabaya. Dan bahkan, keika dilaksanakannya raziaupun ada salah satu pihak dari Satpol PP yang bekerjasama untuk memberitahukan jadwal razia kepada salah seorang mucikari yang masih beroperasi. Persoalan-persoalan baru kini muncul setelah pelaksanaan kebijakan penutupan lokalisasi dolly.

“ya masih mbak. Itu kerjaanku kok, lah enak gini aja. Nyari kerjaan di salon-salon atau warung toko gitu gak betah aku mbak. Ya gimana lagi, adanya di kuburan kalo lagi ngelayani. Mainnya gak di kuburan mbak, tapi pelangganku yang dateng ke sini (makam)”<sup>9</sup> (wawancara dengan Fitri selaku WTS pada tanggal 17/07/2017 pukul 20.47 WI

<sup>9</sup>Wawancara dengan Fitri selaku Pekerja Seks Komersial (PSK) pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 20.47 WIB

**Gambar 5. 9** Salah Satu Tempat di Makam Kembang Kuning



*Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017*

Persoalan baru kini makin meluasnya bisnis prostitusi yang tidak hanya wanita berpakaian mini dan make-up yang apik yang sedang berdiri di pinggir jalan namun juga melalui media online juga yang makin susah untuk melakukan pekerjaan. Bahkan, penyebaran penyakit HIV pun kini makin merebak. Salah seorang penuturan dari Fitri yang masih menjadi WTS mengungkapkan bahwa dirinya sudah teridentifikasi positif HIV AIDS dari 2 tahun yang lalu atau tahun 2015. Namun, dirinya pun masih tetap menjalankan aktivitas tersebut bahkan penularan penyakit HIV AIDS pun makin tidak terkontrol.

Untuk menemukan PSK (Pekerja Seks Komersial) yang masih aktif saat ini pun terbilang sulit. Sebab mereka ada rasa ketakutan terhadap tindak razia dari Pemerintah Kota yang masih gencar dilakukannya. Hal ini penulis alami pada saat berusaha menemukan PSK yang masih aktif. Sekarang, sudah tidak lagi ditemui perempuan yang menjajakan dirinya di pinggir jalan ataupun

terbuka. Namun, dengan melalui pihak orang dalam (masyarakat sekitar) kita dapat mengetahui PSK yang masih aktif. Saat menemukan PSK yang masih aktif, penulis mengalami kesulitan dan pada saat ingin wawancara pun juga diminta *fee* (uang) untuk mau melakukan wawancara.

Istilah mucikari kini sudah bukan lagi hubungan mucikari dengan PSK namun, pemilik kos-kosan yang menjadi wisma sekarang hanya penyedia fasilitas bagi PSK yang masih aktif namun tidak menantik kemungkinan bahwa pemilik kos-kosan (wisma) tersebut masih mencari pelanggan dengan menjual perempuan yang mereka punya terhadap pria hidung belang.

Berikut adalah dampak yang tidak dikehendaki (*unintended*) yang muncul setelah ditutupnya lokalisasi dolly hingga tahun 2016 :

1. Munculnya masalah ekonomi masyarakat terdampak yang hingga kini belum pulih.
2. Munculnya pengangguran
3. Penyebaran prostitusi yang terselubung
4. Meningkatnya penularan HIV AIDS yang tidak terkontrol

Tidak terkontrolnya penyebaran HIV sekarang karena tidak teridentifikasi lagi PSK yang masih tetap beroperasi. Hal ini yang menjadikan tidak tampaknya permasalahan kesehatan yang terjadi pasca penutupan lokalisasi. Bahkan, mantan PSK yang diberi kompensasi oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak kembali ke daerah asalnya melainkan berpindah tempat atau lokasi baru untuk menjadi lokalisasi terselubung.

“Sekarang jarang nongol di dolly mbak, pelacur yang dulu kebanyakan lari ke Malang, Jogja, Kalimantan. Itu setauku. Bukan mereka tobat atau pulang, tapi Cuma pindah.”<sup>10</sup>

Menyebarnya WTS ke daerah lain, menjadi permasalahan baru dan menjadi kompleks bagi Pemerintah. Kompensasi yang diberikan dirasa kurang cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, beberapa WTS dolly juga banyak yang tidak mau menerima kompensasi. Hal ini dikarenakan bahwa mereka ingin tetap menjadi PSK. Apabila kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya diambil oleh PSK atau mucikari, resiko sangat besar didapatkan jika mereka terjaring dalam razia saat masih beroperasi. Hal ini yang menjadikan banyak para PSK dan mucikari tidak mau menerima kompensasi. Mereka jugalah yang saat ini masih beroperasi.

Fitri merupakan salah satu PSK dari wisma barbara yang masih beroperasi hingga saat ini. Namun, pendapatan yang Ia terima tidak sebanyak dulu ketika dolly masih aktif. Fitri menjajakan dirinya dengan menunggu pelanggan di makam Kembang Kuning Surabaya setiap hari. Tidak hanya Fitri, namun masih ada puluhan PSK yang masih aktif dalam bisnis prostitusi tersebut.

Untuk memudahkan pembaca maka dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dampak pada masyarakat tersebut penulis sederhanakan dalam tabel berikut :

<sup>10</sup> Wawancara dengan Munasipah selaku mantan PSK di lokalisasi dolly pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 16:36 WIB

**Tabel 5. 3 Dampak pada Masyarakat**

Dampak pada Masyarakat	Unit Sosial Terdampak
Dampak yang di kehendaki ( <i>intended</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya masyarakat yang sudah memiliki usaha termasuk UKM di kawasan dolly pasca penutupan.</li> <li>• Masyarakat sudah tenang karena tidak ada lagi yang mengkhawatirkan ketika anak-anaknya sedang bermain</li> </ul>
Dampak yang Tidak di kehendaki ( <i>Unintended</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyaknya masyarakat yang kurang responnya terhadap keikut sertaannya pada pelatihan yang diadakan oleh Pemkot Surabaya</li> <li>• Masih kurangnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari</li> <li>• Munculnya bisnis prostitusi terselubung</li> <li>• Tidak terkontrolnya penyebaran HIV/AIDS</li> </ul>

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2017

#### 1.4 Dampak pada Lembaga dan Sistem Sosial

Bisnis prostitusi merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap daerah manapun karena sudah menjadi penyakit sosial. Hal ini karena prositusi merupakan suatu aktivitas dan menjadi sektor bisnis yang dari segi norma dan nilai sosial sangat bertentangan. Banyak hal yang menjadi landasan bagi para WTS untuk melakukan bisnis prosituti tersebut. Tingginya standar yang dicantumkan oleh satu penyedia lapangan kerja menyebabkan tidak semua orang mampu untuk mengakses lapangan pekerjaan tersebut. Tingginya katagori atau kriteria yang di tentukan oleh

suatu badan penyedia jasa pada akhirnya orang-orang yang tidak terpilih memilih jalan pintas untuk memiliki pekerjaan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Kebijakan penutupan lokalisasi dolly direalisasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Sosial Kota Surabaya melalui landasan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila. Kebijakan Penutupan lokalisasi dolly merupakan penutupan lokalisasi terakhir di Surabaya. lokalisasi dolly resmi ditutup tanggal 18 Juni 2014.

“Dolly ini lokalisasi terakhir yang ditutup mbak, sebelumnya ada 5 tempat lokalisasi yang sudah ditutup. Awalnya ya Dupak Bangunsari, Tambak Sari, terus Klakahrejo, Sememi. Nah terus semuanya baru se-jawa timur yang di data”.<sup>11</sup> (Wawancara dengan Aziz Muslim selaku staff Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 09:35 WIB

Seorang aparatur kelurahan yang menyatakan bahwasannya ketika lokalisasi dolly ditutup, semua komunitas dan ormas yang berkuat pada lokalisasi di Surabaya berkumpul di Putat Jaya.

“Yang paling parah itu bukan bagaimana menutupnya. Tapi bagaimana memberantasnya. Masalah demi masalah muncul pasca penutupan. Tanggal 27 Juli 2017, tepat sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri, terjadi pemberontakan besar-besaran. Bukan dari PSK atau mucikarinya mbak, melainkan masyarakat asli yang berontak. Sebenarnya, PSK itu hanya diperalat oleh masyarakat aslinya. Terlebih lagi dorongan dan intervensi dari berbagai LSM atau pihak luar”.<sup>12</sup>

Dari pernyataan tersebut terjelaskan bahwasannya kebijakan penutupan lokalisasi dolly merupakan serangkaian program kerja pemerintah Kota Surabaya

<sup>11</sup>Op.cit. Wawancara dengan Aziz Muslim.

<sup>12</sup>Op.cit. wawancara dengan Bapak Dwi Mulyo.

yang telah direncanakan sejak lama, namun Kepala Pemerintahan sejak saat itu belum berhasil untuk merealisasikannya.

“..Sebenarnya kebijakan penutupan lokalisasi dolly itu sudah ada tahun 1970-an. Kan ada yang pro dan kontra. Cuma pas itu fasilitasnya masih kurang, ya gak siap gitu sama apa yang dilakukan..”<sup>13</sup>

Lambat laun, rencana penutupan dianggap wacana saja karena tidak kunjung terlaksana. Kepemimpinan berganti, maka pola pimpinannya pun juga berganti.

Begitu pula kebijakan-kebijakannya. Tidak hanya menyangkut periode kepemimpinan yang terus berganti sehingga kebijakan lokalisasi yang telah disepakati oleh masyarakat yang berada pada wilayah lokalisasi saat itu seolah tidak pernah terjadi. Maka, keberadaan lokalisasi yang ada di Surabaya menjadi legal seiring berjalannya waktu.

Peraturan daerah yang sudah ada sejak tahun 1999 dijadikan senjata untuk memberantas lokalisasi. Namun, pada kenyataannya lokalisasi dolly ditutup bukan atas dasar adanya perda.

“Kalo mbak bilang berdasarkan perda itu salah mbak. Jika dilihat lagi ya mbak, perda itu tahun 1999. Namun lokalisasi di Surabaya itu sudah ratusan tahun. jika dari awal adanya perda itu dibuat, maka saat itu juga lokalisasi sudah ditutup dan surabaya sudah bersih dari prostitusi mbak. Pencetus adanya kebijakan penutupan lokalisasi ini, berawal dari Bu wali menjabat sebagai Walikota Surabaya mbak. Bu wali melihat karena citra beliau sebagai perempuan juga yang tidak ingin untuk adanya lokalisasi yang menjual belikan perempuan. Terlebih lagi visi misi dari Pak Karwo untuk membersihkan Surabaya dari lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Lalu juga, Bu wali ingin membersihkan *image* Surabaya sebagai Kota Kotor (prostitusi). Perda itu kalah mbak dengan adanya lokalisasi ini. Bisa dibilang, Bu Wali yang menjadi pencetus pembasmi lokalisasi.”<sup>14</sup>

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Ibid.

Jika dilihat, Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pun kalah dengan adanya lokalisasi yang tersebar di Surabaya. alasan penempatan lokasi bisnis prostitusi yang menyatu dengan rumah warga menjadikan Ibu Risma menuntut untuk menutup lokalisasi yang ada di Surabaya termasuk Dolly yang merupakan lokalisasi terbesar.

“Ibu (bu Risma) dulu sering ikut pengajian disini dan beliau selalu ikut. Pas awal-awal gitu, kan saya sering kalo pengajian ikut”<sup>15</sup> (Wawancara dengan Munasipah selaku mantan PSK pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 16.38 WIB)

Pada sebuah acara rutin yang diadakan oleh masyarakat Kelurahan Putat Jaya, seperti halnya pengajian Bu Risma sempat dan berulang kali menyatakan tidak akan menutup dolly. Keputusan Tri Rismaharini menutup lokalisasi tidaklah mudah, melainkan beberapa kali mengadakan sidak dan pemantauan langsung.

Keputusan untuk tidak menutup lokalisasi yang tersbar di Surabaya, terutama lokalisasi dolly karena lapangan kerja dirasa kurang memadai sehingga jika lokalisasi ditutup maka tidak ada jaminan serta tidak ada yang mampu memberikan jaminan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak. Sebab, selain PSK dan mucikari, masyarakat sekitar pun hidup atas aktivitas tersebut.

“Akhirnya Ibu (Bu Risma) terjun sendiri lihat anak-anak. Banyak anak-anak lihat mbak-mbak (PSK). Akhirnya ya itu Ibu nutup karna lihat anak kecil campur sama orang PSK-PSK. Dulu itu disini sering bilang saya ndak mau nutup akhirnya barang itu de’e terjun (ketika memantau) sendiri.”<sup>16</sup> (wawancara dengan Ibu Siti selaku masyarakat terdampak 15/07/17 pukul. 15.11 WIB)

<sup>15</sup>Op.cit. wawancara dengan Munasipah.

<sup>16</sup>Op.cit. Wawancara dengan Ibu Siti.

Dengan begitu, keputusan Bu Risma untuk tidak mengotak-atik tatanan lokalisasi hanya berlaku sementara saja. Hingga pada akhirnya, memutuskan untuk menutup karena saat sedang melakukan pemantauan langsung olehnya, didapati realitas lain yang menyangkut sekelompok individu yang masih dalam katagori anak di bawah umur.

Untuk memudahkan pembaca maka dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dampak pada masyarakat tersebut penulis sederhanakan dalam tabel berikut :

**Tabel 5. 4 Dampak Pada Lembaga dan Sistem Sosial**

<b>Dampak pada Lembaga dan Sistem Sosial</b>	<b>Unit Sosial Terdampak</b>
Meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada</li> </ul>
Menguatnya solidaritas sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada</li> </ul>

*Sumber : Olahan Penulis, 2017*

## BAB VI

### PENUTUP

Peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai penyempurna penelitian ini yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang di paparkan pada BAB I. Selain kesimpulan, pada bab VI juga memaparkan rekomendasi untuk pihak terkait seperti Pemerintah Kota Surabaya, Yayasan Gerakan Melukis Harapan dan Masyarakat. Rekomendasi ini merupakan solusi yang peneliti tawarkan kepada pihak terkait mengenai penanganan dampak kebijakan penutupan lokalisasi di Kota Surabaya. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pada pihak terkait untuk mengatasi dampak penutupan lokalisasi dolly di Kota Surabaya.

#### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan ini diajukan untuk menjawab rumusan permasalahan mengenai pertanyaan analisis dampak penutupan lokalisasi dolly dalam jangka tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

- a. Kebijakan penutupan lokalisasi dolly merupakan tujuan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengentasan Wanita Tuna Susila namun dalam upaya tersebut, berakibat pada maraknya prostitusi terselubung hingga prostitusi online.
- b. Kebijakan Pemerintah pasti akan menuai sebuah dampak yang dirasakan oleh masyarakat terdampak, begitu pula kebijakan penutupan lokalisasi dolly. Dimana, kebijakan ini telah di implementasikan pada tahun 2014,

namun hingga saat ini, dampak yang dirasakan masih saja belum dapat diatasi oleh Pemerintah Kota Surabaya. hasil analisis dengan menggunakan konsep Analisis Dampak Sosial (ADS) dapat menarik kesimpulan yang terdapat pada kriteria Dampak Individual yakni dalam kebijakan penutupan lokalisasi dolly berpengaruh terhadap biologis namun dampak biologis yang ditimbulkan yakni penyebaran HIV AIDS yang semakin tidk terkontrol pada pihak pengguna PSK yang masih aktif saat ini. selain itu, penutupan dolly ini sangat berpengaruh terhadap psikologis individu. Pendapatan yang dirasakan sangat turun drastis namun, saat ini sudah membaik meskipun tidak mencapai jumlah pendapatan pada saat lokalisasi dolly masih aktif.

- c. Jika dilihat dari dampak operasionalnya, saat masih aktivitas bisnis prostitusi masih berjalan, perputaran pendapatan yang dihasilkan dari kawasan dolly tersebut mencapai 2 Milyar / malam. Sedangkan pasca penutupan, pendapatan sudah tidak lagi dapat mencapai saat masih aktif. Pelaku usaha di kawasan dolly pun kini lebih banyak beralih pada sektor wirausaha. Pasca penutupan dolly, kawasan dolly yang dulu penuh remang-remang dan suara musik yang kejang, kini hanya lampu kuning dan sepi. Dengan begitu, anak-anak kecil pun bebas bermain tanpa ada rasa takut untuk di ganggu oleh preman-preman lagi.
- d. Dampak pada masyarakat yang kini terjadi yakni banyaknya masyarakat yang mandiri dengan memiliki usaha UKM, namun kurang responnya

masyarakat terhadap pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh Pemkot Surabaya.

- e. Dampak yang terjadi pada lembaga dimana gang dolly ini sudah mandiri dengan melepas kehidupan yang lengket dengan bisnis prostitusi. Namun, perlu adanya tindakan dari Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih tegas dan peka terhadap lingkungan kawasasn dolly sebab masih adanya bisnis prostitusi yang terselubung.

## 6.2 Rekomendasi

Rekomendasi ini ditujukan untuk memberi saran dan solusi mengenai analisis dampak pasca penutupan lokalisasi dolly di Kota Surabaya, sebagai berikut :

- a. Pengentasan Wanita Tuna Susila di Kota Surabaya tidak hanya dengan menutup titik lokalisasi yang ada namun juga melakukan pendampingan kepada para WTS hingga dapat mandiri sehingga tidak lagi terjadi prostitusi terselubung.
- b. Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengawasi dinas-dinas terkait dalam menjalankan tugasnya terutama dalam menjalankan program pengentasan Tuna Susila. Sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak terdapat kecurangan maupun penyelewengan dalam mendampingi masyarakat terdampak eks lokalisasi.
- c. Pemerintah Kota Surabaya harus lebih bertindak tegas dalam melakukan penertiban atau mengatasi masalah prostitusi liar yang terjadi di sekitar

dolly, yang dimana masih banyak ditemui rumah-rumah yang masih menjadi wisma dan masih beroperasi hingga saat ini.

- d. Bagi masyarakat terdampak penutupan lokalisasi dolly dan masih memiliki anak yang masih bersekolah, Pemerintah Kota Surabaya harus memberikan beasiswa agar anak-anak bisa melanjutkan sekolahnya.

Pemerintah Kota Surabaya seharusnya juga perlu memberikan penyuluhan bagi orang tua dan masyarakat sekitar tentang pembelajaran membuat jati diri anak yang menyimpang karena lingkungan sekitar sebelumnya sangat berpengaruh besar dalam kehidupan anak-anak.

- e. Keberhasilan penyelesaian permasalahan sosial, khususnya dalam hal ini yakni mengentaskan Tuna Susila dalam aktivitas bisnis prostitusi yang terjadi tidak dapat hanya terfokus dan menyerahkan semua penyelesaian maupun solusi kepada Pemerintah maupun aparat penegak hukum negara semata, melainkan keberhasilan dari setiap penyelesaian permasalahan sosial atau keijakan pemerintah juga tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri, begitu pula dengan masyarakat. Kesadaran serta dukungan dari berbagai pihak sangat berarti demi terwujudnya Kota Surabaya yang aman dan terhindar dari bisnis prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Abu Al- Ghigari. 2004. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*. Bandung:

Muhajid Press.

Ashadi Prawancana. 2000. *Krisna Menyusuri Remang-Remang*. Jakarta: Sinar

Harapan

Bachtiar dan Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*.

Yogyakarta: Penerbit PINUS

Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press

(Anggota IKAPI)

Budi Winarno. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*.

Yogyakarta: CAPS.

Bungin, burhan. 2003. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hull, Terence H., Enang Sulistiyandingsih dan Gavin W. Jones. 1997. *Pelacuran di*

*Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta : PT. Penerbit Swadaya

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*

*edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara

Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT.

Bumi Aksara.

Irfan Islamy. 1984. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi

Aksara

John W Creswell. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed*

*Methods Approaches*. Diterjemah Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Joko Widodo. 2012. *Analisis Proses Implementasi Kebijakan Publik*. Malang; Bayu

Media Publishing

Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.

Muhammad, Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora

Aksara Pratama.

Sahya, Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia

Samodra, Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Solaeman Munandar, 2005. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*.

Bandung: PT. Rafika Aditama.

Solichin A.W. 2004 *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*

Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Solichin Abdul Wahab. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang:

UMM Press

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Terence dkk. 1997. *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Wayne Persons. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

William Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

#### **SKRIPSI DAN TESIS**

H.B. Sutopo. 2006. *Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Kurniawan. 2010. *Pelacuran di Surakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan Resosiliasi Silir Tahun 1998-2006*. Surakarta: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret

#### **WEBSITE**

Andiono Hermawan. "Mucikari dan Pemilik Wisma Dolly bakal Dipidanakan bila Tetap Buka". <http://www.lensaindonesia.com/2014/06/26/mucikari-dan-pemilik-wisma-dolly-bakal-dipidanakan-bila-tetap-buka.html>  
<http://kominform.jatimprov.go.id/watch/40225>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/pasca-penutupan-gang-dolly-masih-bisakah-warga-hidup.html>

## DOKUMEN

Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim selaku staff bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya pada Senin 3 Juli 2017

Wawancara dengan Bapak H. Dwi Mulyo Agustiarso. S. Sos MM selaku Lurah di Kelurahan Putat Jaya pada Selasa 11 Juli 2017

Wawancara dengan Adam selaku CO Humas, Gerakan Melukis Harapan, pada Senin 24 Juli 2017

Wawancara dengan Ibu Siti selaku masyarakat terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly pada Sabtu 15 Juli 2017

Wawancara dengan Nurma selaku Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly pada Sabtu 15 Juli 2017

Wawancara dengan Fitri selaku Pekerja Seks Komersial (PSK) pada Minggu 16 Juli 2017

Wawancara dengan Jarwo Susanto selaku Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly pada Kamis 27 Juli 2017

Wawancara dengan Munasipah selaku Mantan PSK Dolly pada Kamis 27 Juli 2017

Wawancara dengan Darmuji selaku Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly pada Kamis 27 Juli 2017

Wawancara dengan Ratna selaku Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Dolly pada 29 Juli 2017

## DOKUMENTASI

### 1. Foto Wawancara

**Gambar 1. Bersama Bapak Dwi Mulyo, Lurah Kelurahan Putat Jaya dan Bapak Wahyu Iswara, Perangkat Desa**



**Gambar 2. Bersama Adam, CO Humas Gerakan Melukis Harapan**



**Gambar 3. Bersama Bang Jarwo, Mantan Preman dan Munasipah, Mantan PSK**



**Gambar 4. Bersama Nurma, Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi**



## 2. Foto Observasi

**Gambar 1. Eks Wisma Barbara yang menjadi tempat Pelatihan Ketrampilan**



**Gambar 2. Eks Wisma**



**Gambar 3. Wisma Sofiatin yang dibeli Pemkot dijadikan Lapangan Bola**



**Gambar 4. Putat Jaya gg Lebar (eks Lokalisasi Dolly)**



Gambar 5. Putat Jaya C Barat gg. XI (eks. Lokalisasi Dolly)



Gambar 6. Putat Jaya C Barat RT 04. RW. 13 (eks lokalisasi dolly)



Gambar 7. Tempat Parkir yang digunakan Pelanggan



Gambar 8. Hasil UKM Sepatu Dolly



Gambar 9. Hasil UKM Dolly



Gambar 10. Hasil UKM Dolly





**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

.op

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA,  
NOMOR 7 TAHUN 1999**

**T E N T A N G  
LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN/TEMPAT  
UNTUK PERBUATAN ASUSILA SERTA  
PEMIKATAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan di Surabaya dewasa ini sudah sangat memperhatikan dan perlu segera diatasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik khususnya warga masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai maksud tersebut dalam konsideran huruf a, maka Peraturan Daerah Kota besar Surabaya Nomor 92/DPRDS Tahun 1953 tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran dalam Kota Besar Surabaya dan Nomor 17/DPRDS Tahun 1954 tentang Pencegahan Pemikatan untuk melakukan Perbuatan Cabul perlu disempurnakan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam konsideran menimbang huruf a dan b, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk melakukan Perbuatan Asusila dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban di Wilayah ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti dilingkungan Departemen Sosial ;
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial ;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Sosial Tuna Susila ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN/TEMPAT UNTUK PERBUATAN ASUSILA SERTA PEMIKATAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pejabat, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikotamdy Kepala Daerah;
- d. Bangunan/tempat, adalah bangunan permanen, semi permanen maupun tidak permanen serta tempat lain baik terbuka maupun tertutup ;
- e. Perbuatan Asusila, adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, moral dan norma-norma agama khususnya perbuatan seperti hubungan suami istri untuk memuaskan nafsu sahwatnya tetapi tidak terikat dalam status perkawinan ;
- f. Pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila, adalah segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang dilakukan ditempat umum dengan maksud menyuruh/mempengaruhi/mengajak atau menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila dengan yang bersangkutan baik yang secara langsung maupun terselubung ;

- g. Wanita Tuna Susila, adalah wanita yang melayani laki-laki yang bukan suaminya untuk memuaskan nafsu sahwatnya dengan memperoleh imbalan/pembayaran;
- h. Mucikari, adalah setiap orang yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya, menyediakan dan atau mengelola tempat untuk praktek wanita-wanita tuna susila;
- i. Tempat umum, adalah jalan, dan tempat-tempat lain yang dapat secara bebas dikunjungi oleh setiap orang.

**BAB II  
LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN/TEMPAT  
UNTUK PERBUATAN ASUSILA**

**Pasal 2**

Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
setiap orang dilarang :

- a. menggunakan bangunan/tempat untuk melakukan perbuatan asusila ;
- b. melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.

**BAB III  
TINDAKAN/PEMBINAAN**

**Pasal 3**

(1) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat, berwenang secara bertahap melakukan tindakan :

- a. pendataan, penelitian dan menetapkan bahwa suatu bangunan/tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila;
- b. menyatakan suatu bangunan/tempat tidak digunakan untuk melakukan perbuatan asusila;
- c. teguran dan atau peringatan kepada penghuni/pemilik/yang bertanggung jawab atas bangunan/tempat untuk menghentikan penggunaan bangunan untuk melaksanakan perbuatan asusila ;
- d. penutupan/penyegelan terhadap bangunan/tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila setelah diberikan teguran dan atau peringatan secara wajar dan ternyata masih tetap menggunakan bangunan/tempat dimaksud untuk melakukan perbuatan asusila.

- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat atau Tim yang terdiri atas pejabat instansi terkait untuk melaksanakan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Penutupan/penyegelan dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakhiri oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat atau Tim apabila penghuni/pemilik/yang bertanggung jawab atas bangunan/tempat tersebut sanggup mematuhi ketentuan tersebut pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat, berwenang melakukan pembinaan terhadap setiap orang yang terlibat dalam perbuatan asusila baik mucikari, wanita tuna susila maupun orang lain yang terlibat baik dalam hubungan usaha/komersial maupun tidak ;
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tindak lanjut dari tindakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c atau d dan atau tindak lanjut dari pengenaan sanksi pidana tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa :
  - a. pembinaan bidang mental/rohani/keagamaan ;
  - b. pembinaan bidang olah raga dan kesehatan ;
  - c. pembinaan bidang pendidikan/keterampilan/wirusaha ;
  - d. pembinaan bidang sosial dan budaya;
- (4) Ketentuan dan tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (2) di tetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

### BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 6**

- (1) Selain sanksi administratif tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 7**

Selain oleh pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. melakukan sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut :

- a. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 92/DPRDS Tahun 1953 tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran dalam Kota Besar Surabaya ;
- b. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 17/DPRDS Tahun 1954 tentang Pencegahan Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Cabul.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal 11 MEI 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a,

ttd

H. HARJOSO SUPENO  
Kolonel CHB. Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1999 Nomor 264/P Tahun 1999.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Tatapraja

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Madya  
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999, Seri C pada tanggal 7 Desember 1999 Nomor 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI  
Pembina Tk.I  
Nip. 010 056 836

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kptamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

HAASISWANTO ANWAR, SH  
Penata Tk.I  
Nip. 510 100 822

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 1999

T E N T A N G  
LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN/TEMPAT  
UNTUK PERBUATAN ASUSILA SERTA  
PEMIKATAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**I. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk Surabaya, akan semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri berkaitan dengan semakin maraknya praktek-praktek prostitusi di Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 92/DPRDS Tahun 1953 tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran dalam Kota Besar Surabaya dan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 17/DPRDS Tahun 1954 tentang Pencegahan Pemikatan untuk melakukan Perbuatan Cabul.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek-praktek prostitusi maupun kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama maupun kesusilaan yng pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1 s/d Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai tindakan dalam rangka penertiban oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai lingkup pembinaan yang dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Daerah yang mengatur penggunaan/fungsi bangunan.
- Pasal 6 s/d 12 : Cukup jelas.
-



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755.551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038  
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : 1746 /UN10.F11.14.12/PP/ 2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ini sebagai Dosen Penguji Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan nama terlampir. Surat perihal Dosen Pembimbing Skripsi disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan Rapat Ploting yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 11 Oktober 2017  
Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Program Studi Ilmu Pemerintahan

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Malang, 25 OCT 2017

a.n. Dekan:  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si, Ph.D  
NIP. 197509182005012001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
2. Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.



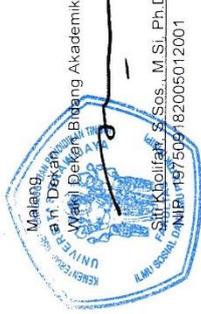
Lampiran Nomor : /UN10.F11.14.12/PP/2017

No	Nama	NIM	Judul	Ketua Majelis Penguji	Sekretaris Majelis Penguji	Anggota Penguji 1	Anggota Penguji 2
1	Oni Arizal B	125120607111018	Wacana Politik Renegosiasi Kontrak Freeport Tahun 2009-2015 (Analisis Pada Media Kompas.com Periode Tahun 2011-2015)	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP.	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si.	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Laode Machdani Afala, S.IP., MA
2	Anita mauludiyah	135120607111047	analisis pengaruh kualitas pelayanan samsat kota batu terhadap kepuasan wajib pajak	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Si	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Tia Subekti, S.IP., MA
3	Malik Triaji	135120600111034	Analisis New Public Management pada Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Studi pada aplikasi Qlue DKI Jakarta)	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev.	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA
4	Priyo Handoko	135120601111019	Kesiapan Pembentukan Daerah Otonom (Studi Kasus Kesiapan Pemekaran Kab. Lampung Tenggara)	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Dr.Dra. Alifihlathin Utaminingsih, M.Si	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Tia Subekti, S.IP., MA
5	Taufik chaerul imam	135120601111052	Manajemen Jaringan Pemerintah Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pariwisata	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Fathur Rahman, S.IP., MA	Barqah Prantama, S.AP., M.AP
6	Vincentia Retno Puspita Wardhani	135120600111042	Analisis Dampak Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly di Kota Surabaya Jangka Tahun 2016	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Si	Barqah Prantama, S.AP., M.AP
7	Subhan Hanif Rohandi	125120600111026	Implementasi Program Bunga Bangsa Sebagai Upaya Pembangunan Daerah Tertinggal	Dr. Dra. Alifihlathin Utaminingsih, M.Si	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA
8	Endi Septianda Putra	125120607111014	Pengaruh Penilaian Kinerja Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Terhadap Motivasi Kerja Pegawai	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Fathur Rahman, S.IP., MA	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Tia Subekti, S.IP., MA
9	Bayu Irawan Sasongko	135120601111031	Jejaring Komoditas Petis Dalam Community Entreprenership di Desa Gumeng	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Fathur Rahman, S.IP., MA	Barqah Prantama, S.AP., M.AP
10	Ilmiana Zakiatud Darojah	135120607111020	Analisis Tata Kelola Kebijakan Parkir di Kabupaten Tuban (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban)	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Si	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Dr. Dra. Alifihlathin Utaminingsih, M.Si	Barqah Prantama, S.AP., M.AP
11	Arkan Daiffa	135120600111011	Upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Fathur Rahman, S.IP., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Tia Subekti, S.IP., MA
12	Febryana Dyah Dwi Saputri	135120607111049	Inovasi Pelayanan Campus Social Responsibility oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Dr. Dra. Alifihlathin Utaminingsih, M.Si	Fathur Rahman, S.IP., MA	Tia Subekti, S.IP., MA
13	Muhammad Fairuz Akbar	135120607111002	Partai Perindo Sebagai Partai Firma Bisnis di Indonesia	Fathur Rahman, S.IP., MA	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA
14	Tasroni	135120600111004	Analisis Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua (Studi Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan)	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev.	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA
15	Syihab Azzuhri	135120607111055	Politik Tata Ruang: Dinamika Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta (Studi Kasus: Proses Pembangunan Hotel Amaris)	Fathur Rahman, S.IP., MA	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Dr. Dra. Alifihlathin Utaminingsih, M.Si	Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA
16	Abdurrahim Nur Salim	135120607111009	Analisis Pemekaran Wilayah Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Laode Machdani Afala, S.IP., MA
17	Abd Ro'uf	135120601111001	Perubahan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Enclave Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Study Desa)	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Dr. Dra. Alifihlathin Utaminingsih, M.Si	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Barqah Prantama, S.AP., M.AP
18	Lovita Cahya Kurnia	135120607111022	Tata Kelola Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dr. Dra. Alifihlathin Utaminingsih, M.Si	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Si	Tia Subekti, S.IP., MA
19	Fahrul Indriawan	135120600111003	Politisasi Birokrasi di Boyolali (Studi Kasus Masa Pemerintahan Bupati Seno Samudro Periode I-Periode II	Fathur Rahman, S.IP., MA	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Laode Machdani Afala, S.IP., MA

6



0	Naufal Leksamana Aditya	135120601111037	Tata Kelola Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., M.A Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Rathaningstih Damayanti, S.IP. Irfma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Laode Machdani Afala, S.IP., MA Laode Machdani Afala, S.IP., MA
1	Faizal Akbar Maulana	135120601111004	Analisis Dampak Kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Sumenep				





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038  
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : 805 /UN10.F11.05.01/PP/ 2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ini sebagai Majelis Penguji Seminar Proposal mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan nama terlampir. Surat perihal Majelis Penguji Seminar Proposal disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan Rapat Ploting yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 10 April 2017  
Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Program Studi Ilmu Pemerintahan

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Malang, 12 APR 2017  
a.n. Dekan:  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si  
NIP. 197509182005012001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
2. Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038  
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

Lampiran Surat No : 865 /UN10.F11.05.01/PP/ 2017

No	Nama	NIM	Penguji 1	Penguji 2
1	Fahrul Indriawan	135120600111003	Fathur Rahman, S.IP., M.A	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
2	Arkan Daffa	135120600111011	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Fathur Rahman, S.IP., M.A
3	Ekyn Prananta Ginting	135120600111018	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Andi Setiawan, S.IP., M.Si
4	Dyah Yuriasti Arsanto	135120601111055	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Andi Setiawan, S.IP., M.Si
5	Dhafir Jati Dzulfiqar	135120607111004	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
6	Bayu Irawan Sasongko	135120601111031	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
7	Fathony Air Lambang	135120607111031	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Fathur Rahman, S.IP., M.A
8	Anggraini Dwi Jayanti	135120601111029	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si
9	Rhomaida Ambarwati	115120613111002	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si
10	Jarot Maha Bintang	135120607111005	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si
11	Fatmala Nur Aini	135120607111042	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
12	Faizal Akbar Maulana	135120601111004	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
13	Juniansyah Magesta Putra	125120601111015	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
14	Naufal Laksamana Aditya	135120601111037	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
15	Mochamad Ibnu Abdhiki	115120607111009	Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	Fathur Rahman, S.IP., M.A
16	Frezza Ayu Suryaningtyas	135120601111024	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
17	Febryana Dyah Dwi Saputri	135120607111049	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si
18	Thahirah Sakinah	135120600111010	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
19	Tasroni	135120600111004	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

 Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755, 551611 Psw. 250, Fax (0341) 570038  
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

20	Muhamad Yuhda Irawan	135120607111033	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
21	Muhammad Fairuz Akbar	135120607111002	Fathur Rahman, S.IP., M.A	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
22	Arlita Dian Pratiwi	135120600111014	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Fathur Rahman, S.IP., M.A
23	Deni Prasetyo	135120607111012	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
24	Malik Triaji	135120600111034	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
25	Abdurrahim Nur Salim	135120607111009	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
26	Dina Dwi Rahayu	135120600111036	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
27	Husnul Akhyarul Fata	135120607111044	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
28	R. Toto Dwi Setyo Laksono	135120601111038	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Fathur Rahman, S.IP., M.A
29	Rifqi Abdul Hafidh	135120600111035	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
30	Satria Atma Prayoga	135120607111019	Fathur Rahman, S.IP., M.A	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
31	Syihab Azzuhri	135120607111055	Fathur Rahman, S.IP., M.A	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
32	Jody El Firyly	125120600111042	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
33	Khairun Nisa	135120601111027	Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
34	Rengga Pratama	115120607111053	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Fathur Rahman, S.IP., M.A
35	Garbella Dewi Aswina M.	135120607111008	Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev
36	Vincentia Retno P Wardhani	135120600111012	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
37	Yoga Bagus Januar	135120600111028	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Fathur Rahman, S.IP., M.A
38	Febri Nuansa Siallagan	135120600111002	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP
39	Yofi Wahyu Dwi Antono	135120601111030	Fathur Rahman, S.IP., M.A	Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA
40	Abd Ro'Uf	135120601111001	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si







**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755,551611 Psw. 250. Fax (0341) 570038  
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

41	Linda Kusuma Wardani	125120601111005	Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP	Andi Setiawan, S.IP., M.Si
42	Ilmiana Zakiatud Darojah	135120607111020	Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
43	Leni Tiara Sandy	135120600111008	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si
44	Ariska Ayu Citra	135120601111033	Andi Setiawan, S.IP., M.Si	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si
45	Octyan Danes Siregar	135120607111037	Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si	Andi Setiawan, S.IP., M.Si
46	Faizuddaroin	135120600111032	Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si	Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si
47	Subhan Hanif Rohandi	125120600111026	Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	Andi Setiawan, S.IP., M.Si
48	Tika Rizky Aryanti	135120601111053	Dr. Dra. Alifulahtin Utaminingsih, M.Si	Andi Setiawan, S.IP., M.Si





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Surabaya, 2 Juni 2017

Nomor : 070/S452/1436.8.5/2017  
 Lampiran : -  
 Hal : Penelitian

Kepada

- Yth 1. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya  
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya  
 3. Camat Sawahan Kota Surabaya

di - SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;  
 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 070/7538/209.4/2017 hal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Vincentia Retno Puspita wardhani  
 b. Alamat : Perum. GTCK C - 118 RT. 17 RW. 09 Kel. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo  
 c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
 d. Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang  
 e. Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul / Thema : Analisis Dampak Kebijakan Penutupan Lokalisasi Dolly Di Kota Surabaya Jangka Waktu Tahun 2014 - 2016 (Studi Tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Asusila)  
 b. Tujuan : Penelitian  
 c. Bidang Penelitian : Sosial - Politik  
 d. Penanggung Jawab : Siti Kholifah, S.Sos., M.Si  
 e. Anggota Peserta : -  
 f. Waktu : 3 (Tiga) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan  
 g. Lokasi : Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

- Dengan persyaratan : 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan;  
 2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya;  
 3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI ;  
 4. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

04 JUL 2017  
 Surabaya, .....

Mengetahui  
 Plt. Sekretaris

Dengan ini atas bantuannya disampaikan terima kasih



Dr. ERIKOESDARJONO, MM,  
 Pembina Tk. I

NIP 19671201 199201 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang  
 2. Saudara yang bersangkutan.



Penata TK. I  
 NIP 19590831 198603 1 017



a.n. Plt. KEPALA BADAN  
 Plt. Sekretaris,

Dr. Rr. Laksita Rini Sevriani, M.Si  
 Pembina  
 NIP 19680918 199403 2 007





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**  
**Nomor : 070/ 7537 /209.4/2017**

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 2001/UN10.F11.14.12/PP/2017 perihal Permohonan pengumpulan data dan wawancara atas nama Vincentia Retno Puspita Wardhani

**Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :**

- a. Nama : Vincentia Retno Puspita Wardhani  
b. Alamat : Perum GTCK C-118 Taman Sidoarjo  
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
d. Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya  
e. Kebangsaan : Indonesia

**Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :**

- a. Judul Proposal : "Analisis Dampak Kebijakan Penutupan Lokalisasi Dolly di Kota Surabaya Jangka waktu 2014-2016 (Studi tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Asusila)"  
b. Tujuan : Penelitian/skripsi  
c. Bidang Penelitian : Sosial & Politik  
d. Dosen Pembimbing : Rachmad Gustomy  
e. Anggota/Pengikut : -  
f. Waktu Penelitian : 3 bulan  
g. Lokasi Penelitian : Kota Surabaya

**Dengan ketentuan**

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 31 Mei 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Budaya Politik



NIP. 19590803 198504 1 012

**Tembusan :**

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Brawijaya di Malang;  
2. Yang bersangkutan;





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Veteran Malang (65145) Telp. (0341) 575755-551611 Psw. 250. Fax (0341) 570038  
<http://www.fisip.ub.ac.id> E-Mail: [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 674/UN10.F11.05.01/PP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang memperhatikan Surat Usulan perihal Pembimbing Skripsi oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, dengan ini menugaskan kepada Saudara:

1. Nama : Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP  
NIP : 1981 0825 2015 041001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA  
NIP : -  
Tugas : Pembimbing II

**Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1):**

Nama Mahasiswa : Vincentia Retno P. Wardhani  
NIM : 135120600111012  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Bidang Peminatan : Reformasi Pemerintahan

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Ketentuan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 20 Maret 2017.**

Malang, 24 MAR 2017

a.n. Dekan:

Wakil Dekan Bidang Akademik.



Siti Kholifah, S.Sos., M.Si

NIP. 197509182005012001

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UB;
2. Bagian Keuangan FISIP UB;
3. Mahasiswa yang Bersangkutan;
4. Arsip.





**KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Nama Mahasiswa : Vincentia Petno Puspita Wardhani  
 NIM : 135120600111012  
 Peminatan : Reformasi Pemerintahan  
 Dosen Pembimbing I : Rachmad Justomy S.IP., M.Si  
 NIP :  
 Dosen Pembimbing II : Ahmad Zaki Fadlur Rohman S.IP., M.A  
 NIP :

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Keterangan	Paraf Dosen
1.	7 Februari 2017	Konsultasi Judul & Bab I		
2.	24 Februari 2017	Konsultasi Bab II		
3.	10 Maret 2017	Konsultasi Bab II (teori)		
4.	15 Maret 2017	Konsultasi Bab II (teori) dan Bab III		
5.	17 Maret 2017	ACC Sempro		
6.	13 September 17	Revisi bab 4 - 5		
7.	18 Sept' 2017	Revisi bab 1 - 6 + ACC kompre		
8.	25 Sept' 2017	ACC Kompre		



**TRANSKIP HASIL WAWANCARA  
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH**

<b>Informan</b>	
Biodata Singkat Informan	
Nama	: H. Dwi Mulyo Agustiarso. S. Sos MM
Status Jabatan	: Kepala Kelurahan Putat Jaya
SKPD	: Kelurahan Putat Jaya
Tanggal	: 11 Juli 2017
Waktu	: 14:32:05

P : Peneliti/ Penulis Skripsi

N : Narasumber

<b>Nama</b>	<b>Transkrip</b>
P	: Bagaimana pendapat Bapak mengenai lokalisasi dan angka WTS di Kota Surabaya?
N	: Sebenarnya, WTS itu adalah sebagai ahli profesi dan mucikari adalah ahli Usaha. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang hingga menjadi PSK. Sangat memprihatinkan bagi kita sebagai masyarakat sipil yang melihat fenomena tersebut. Begitu banyak orang khususnya perempuan yang menggantungkan hidupnya dengan pekerjaan seperti itu. Namun, keprihatinan kita kepada mereka itu tidak bisa di dapat oleh akal pikir mereka karena mereka sudah membuat image bahwa pekerjaan mereka itu 'enak'.
P	: Dengan begitu, apa tinjauan dari kelurahan sendiri menanggapi begitu banyaknya orang menggantungkan hidupnya dengan pekerjaan sebagai PSK dan terlebih lagi, seperti yang kita tahu bahwa dolly saat itu merupakan ladang pekerjaan yng besar bagi mereka.
N	: Gimana ya mbak, istilahnya begini. Dari saya baru tinggal di daerah sini (Putat Jaya) dengan dolly, lebih lama dolly <i>ketimbang</i> saya dan yang lainnya. <i>Ya to?</i> Segala apapun tindakan dari kelurahan untuk memberantas itu mungkin tidak begitu dirasakan. Namun, yng kita lakukan disini perihal rohaninya, keagamaannya saja. Untuk memberantas, dari kelurahan pun mengakui tidak mampu, namun harus <i>dicekoki</i> dulu lah untuk masalah kerohaniannya.

P	:	Pada saat sebelum adanya kebijakan, apa kegiatan rohani tersebut ada kerjasama dengan pihak luar selain kelurahan dan kecamatan pak?
N	:	Hmmm, tidak ada. Hanya yayasan dari Islamic centre
P	:	Apakah sebelum adanya kebijakan penutupan dolly ini, ada program-program yang di laksanakan oleh Pemkot Surabaya untuk mengentaskan WTS di Surabaya?
N	:	Sebetulnya sudah mbak, namun kendala yang kita alami dalam menutup dolly ini karena tanah atau daerah yang menjadi daerah dolly ini merupakan tanah warga dan pemukiman warga, jadi disitu kendala kami untuk menggusur atau menutup. Jadi begitu banyak program atau kebijakan pun tidak dalam terlaksana dengan baik. Kami sebelumnya melakukan banding di Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Disana juga merupakan daerah lokalisasi. Kamu melihat bagaimana pemkot Jakarta mengatasi lokalisasi di Kramat Tunggak, lalu kami pelajari step by step nya. Masalahnya disini, tanah yang mereka gunakan untuk bisnis prostitusi (Kramat Tunggak) itu merupakan tanah milik Pemkot Jakarta. Jadi, begitu mudahnya untuk menutup lokalisasi tersebut. Nah, kalo dolly? Ini tanah pemukiman. Jadi perlu waktu yang tidak sebentar untuk menutup dolly.
P	:	Lalu, bagaimana proses penutupan dolly pada tahun 2014 pak?
N	:	Untuk penutupan dolly ini tidak langsung ditutup begitu saja mbak. Prosesnya sangat panjang. Karena, mengubah image seseorang itu sangat susah. Dimulai dari tahun 2009, bu Risma berinisiatif untuk menutup lokalisasi di seluruh surabaya termasuk dolly. Tahun 2009 hingga tahun 2011, Pemkot Surabaya pelan-pelan melakukan siraman rohani kepada seluruh PSK dan juga mucikari, hingga memberikan kompensasi Rp. 3.000.000/orang, jika ada salah seorang PSK atau mucikari yang ingin keluar dari dolly dan kembali ke daerah asalnya. Bu wali (Bu Risma) tidak terlalu menggebu untuk harus ditutup saat itu juga mbak. Karena beliau mengerti, untuk meninggalkan dunia gelap begitu tidaklah mudah. Siraman rohani ini dilakukan dengan mengumpulkan semuanya di balai RW atau di islamic centre. Lalu, tahun 2012 hingga tahun 2013, Bu wali mengarahkan untuk mengarahkan semua SKPD untuk menggerakkan pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya, misalnya dinas pertanian memberikan pelatihan bagaimana membudidayakan tani dan seterusnya. Lalu, pemkot juga bekerja sama dengan UNESA untuk mengajarkan tata boga dll. Pelatihan-pelatihan ini yang diharuskan masyarakat sekitar dolly untuk diikuti. Pelatihan-pelatihan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh masyarakat dolly termasuk PSK dan mucikari oleh dinas sosial. Hal ini dilakukan untuk membekali mereka agar terlatih dalam bekerja yang layak. Selanjutnya tahun 2014, kemensos melakukan pendataan besar-besaran seluruh masyarakat, PSK,

		maupun mucikari di daerah dolly dan sekiranya mereka sudah <i>wareg</i> (kenyang) dicekoki dengan pelatihan-pelatihan, Bu wali mengeluarkan kebijakan untuk segera mendeklarasikan penutupan dolly. Tanggal 18 juni 2014, bu Wali mendeklarasikan penutupan dolly dan mencabut seluruh perijinan hiburan malam di <i>islamic centre</i> . Dengan kompensasi Rp. 5.000.000 orang yang diterima PSK dan Rp. 5.050.000/orang yang diterima mucikari. Untuk pembagian kompensasi ini mbak, PSK di bagikan di koramil sedangkan mucikari melalui bank Jatim. Sebelumnya, memang Pemkot bekerjasama dengan Bank Jatim.
P	:	Bagaimana alokasi anggaran dan darimana sumber anggaran untuk kompensasi sebelum dan sesudah penutupan dolly pak?
N	:	Ya itu tadi mbak, dari pemkot memberikan Rp. 3.000.000,- per orang, PSK maupun mucikari sebelum deklarasi penutupan. Dana anggaran ini diambil dari APBD Tingkat 1 dan sesudah deklarasi penutupan, kompensasi yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk PSK dan Rp. 5.050.000,- untuk mucikari, dana anggaran dari Kemensos.
P	:	Adakah koordinasi dengan SKPD /lembaga sosial maupun swasta dalam penutupan dolly?
N	:	Ada. Yaa seluruh SKPD itu diarahkan, bekerjasama dengan UNESA, bank jatim, PT. Telkom Indonesia serta komunitas-komunitas lainnya yang peduli terhadap penutupan dolly.
P	:	Apa kendala yang dirasakan dalam upaya pengentasan WTS di Dolly?
N	:	Sebenarnya, segala upaya-upaya yang dilakukan itu banyak kendalanya.ya tapi bagaimana lagi, itu sudah resiko. Yang paling parah itu bukan bagaimana menutupnya. Tapi bagaimana memberantasnya. Masalah demi masalah muncul pasca penutupan. Tanggal 27 Juli 2017, tepat sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri, terjadi pemberontakan besar-besaran. Bukan dari PSK atau mucikarinya mbak, melainkan masyarakat asli yang berontak. Sebenarnya, PSK itu hanya diperalat oleh masyarakat aslinya. Terlebih lagi dorongan dan intervensi dari berbagai LSM atau pihak luar. Kantor kelurahan di teror. Kecamatan pun juga. Untung saja, tidak sampai membakar kantor mbak. Namun, itu menjadi acuan bagi kami untuk bagaimana mengatasi ancaman-ancaman pasca penutupan dolly.
P	:	Itu dari masyarakat asli yang terdampak atau siapa ya pak?
N	:	Masyarakat asli mbak, dimana hampir semua masyarakat asli itu merupakan pedampak dari kebijakn bu wali.
P	:	Lalu, apakah penutupan lokalisasi di Kota Surabaya ini berdasarkan adanya Perda Nomor 7 Tahun 1999?
N	:	Kalo mbak bilang berdasarkan perda itu salah mbak. Jika dilihat lagi ya mbak, perda itu tahun 1999. Namun lokalisasi di Surabaya itu sudah ratusan tahun.jika dari awal adanya perda itu dibuat,

		<p>maka saat itu juga lokalisasi sudah ditutup dan surabaya sudah bersih dari prostitusi mbak. Pencetus adanya kebijakan penutupan lokalisasi ini, berawal dari Bu wali menjabat sebagai Walikota Surabaya mbak. Bu wali melihat karena citra beliau sebagai perempuan juga yang tidak ingin untuk adanya lokalisasi yang menjual belikan perempuan. Terlebih lagi visi misi dari Pak Karwo untuk membersihkan Surabaya dari lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Lalu juga, Bu wali ingin membersihkan image Surabaya sebagai Kota Kotor (prostitusi). Perda itu kalah mbak dengan adanya lokalisasi ini. Bisa dibilang, Bu Wali yang menjadi pencetus pembasmi lokalisasi.</p>
P	:	<p>Oh begitu pak, lalu menurut Bapak bagaimana respon masyarakat terdampak kini pasca penutupan yang kurang lebih sudah 3 tahun ?</p>
N	:	<p>Menurut saya, sekarang mereka bisa survival sih mbak. Sudah tidak ada lagi ancaman atau juga pemberontakan. Justru mereka mulai mendukung dengan adanya kebijakan ini mbak.</p>
P	:	<p>Hingga saat ini, bagaimana hasil dari kebijakan penutupan lokalisasi di Kota Surabaya, sudahkan sesuai tujuan?</p>
N	:	<p>Kalau di bilang sudah sesuai, ya. Sudah sesuai tujuan penutupannya. Namun, untuk pasca penutupan sendiri masih perlu banyak tugas kami guna menunjang kehidupan mereka. Kelemahan dari Pemkot itu, dari pelaksanaan pelatihan maupun program-program lainnya itu hanya top down, tidak bottom up. Jadi, banyak masyarakat yang kurang merespon.</p>

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Informan	
Biodata Singkat Informan	
Nama	: Fitri
Alamat	: -
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 19 tahun
Pekerjaan	: PSK Aktif
Tanggal	: 26 Juli 2017
Waktu	: 22.15 WIB

P : Penulis  
 N : Narasumber

Nama		Transkrip
P	:	Asli Surabaya?
N	:	Bukan, saya jombang
P	:	Sudah lama tinggal di surabaya?
N	:	Sudah sekitar 4 tahun mbak
P	:	Kalau boleh tahu, mbak masih sekolah?
N	:	Enggak mbak, aku tamatan SMP tapi ga nerusno SMA. Pegel otakku mikir mbak. (tidak mbak, saya lulusan SMP, tetapi tidak meneruskan SMA. Lelah otak saya untuk berpikir mbak.)
P	:	Lantas, apa tujuan mbak tinggal di surabaya?
N	:	Kerja mbak aku
P	:	Melakukan pekerjaan malam saja mbak?
N	:	Nggak juga mbak, pagi sampe sore aku kerja ndek salon mbak. Malem e nyambi kerjo bengi mbak. Yo koyok ngene iki. (tidak mbak, pagi sampai sore saya kerja di salon dan malam kerja juga seperti begini)
P	:	Apa kerja di salon tidak cukup mbak?
N	:	Enggak.
P	:	Apa jika gaji mbak di salon di tambah, apa masih jadi PSK?
N	:	ya masih mbak. Itu kerjaanku kok, lah enak gini aja. Nyari kerjaan di salon-salon atau warung toko gitu gak betah aku mbak. Ya gimana lagi, adanya di kuburan kalo lagi ngelayani.



		Mainnya gak di kuburan mbak, tapi pelangganku yang datang ke sini (makam)
<b>P</b>	:	Apa orang tua tahu?
<b>N</b>	:	Eenggak mbak. Cuma tau aku kerja di salon dan sekolah saja
<b>P</b>	:	Lalu, bagaimana kalau mereka tahu pekerjaan mbak?
<b>N</b>	:	Nggapapa mbak, mau gimana lagi. Semua ini juga demi mereka dan juga nyekolahkan adek-adekku. Jangan sampe adek-adek ku kayak aku mbak
<b>P</b>	:	Sudah berapa lama mbak menjadi pekerja malam? Dan dari kapan?
<b>N</b>	:	Dari aku SMP mbak, tapi di dolly aku umur 16 tahun
<b>P</b>	:	Gimana ceritanya mbak sampai bisa ada ditempat ini?
<b>N</b>	:	Gimana ya mbak, awalnya Cuma seneng-seneng aja sama temen, terus tuntutan kebutuhan. Bapak sakit dan ibu kerja sendirian. Kepepet akhirnya aku jadi pekerja gini.
<b>P</b>	:	Awalnya bagaimana bisa di dolly?
<b>N</b>	:	Awalnya bukan di dolly, tapi lewat temen. Kita jualnya di taman terus ditawarkan lewat telfon. Lama kelamaan aku ga ikut dia karena mucikarinya kan seumuran sama aku jadi potongannya besar. Akhirnya aku pindah ke dolly atas keinginanku sendiri.
<b>P</b>	:	Apa mbak terima kompensasi 5 juta dari pemkot?
<b>N</b>	:	Terima sih, tapi bukan 5 juta. 3 juta. Tapi ya gimana, gak cukup kalau Cuma mengandalkan kompensasi pemerintah.
<b>P</b>	:	Lalu, setelah penutupan berapa lama kembali menerima tamu?
<b>N</b>	:	Langsung sih, sebulan
<b>P</b>	:	Apa selalu di makam?
<b>N</b>	:	Eenggak sih, freelance lewat teepon atau sosmed terus janji di hotel. Kalo lagi sepi ya nunggu di makam.
<b>P</b>	:	Berapa tamu dalam sehari?
<b>N</b>	:	Sekarang? Kalo sekarang ya seminggu itu 3-5 orang
<b>P</b>	:	Mbak berapa bersaudara?
<b>N</b>	:	Aku anak pertama, adekku ada 4. 5 bersaudara. Dan adekku semua masih sekolah.
<b>P</b>	:	Setelah penutupan, apa rutin periksa kesehatan?
<b>N</b>	:	Rutin sih, dulu sebelum penutupan ya 3 bulan sekali ada pemeriksaan rutin. Tapi sekarang kan udah gaada, ya aku periksain ya Cuma 6 bulan sekali.
<b>P</b>	:	Terus bagaimana?
<b>N</b>	:	Awalnya ya negatif, lama kelamaan ada keputihan semakinaneh akhirnya positif penyakit kelamin dari tahun 2015
<b>P</b>	:	Stadium berapa?
<b>N</b>	:	Aku gatau. Aku nggak tanya dan gamau tanya. Kalau aku tanya, aku ketakutan.
<b>P</b>	:	Setelah tahu jika positif, masih menerima tamu?

<b>N</b>	:	masih
<b>P</b>	:	Tanpa pengaman?
<b>N</b>	:	Ya kalau pelanggan mau pake pengaman ya pake. Tapi kalau enggak ya enggak. Yang penting aku sudah menyarankan, kalau gamau ya gimana lagi?
<b>P</b>	:	Apa mbak nggak pernah cerita dengan orang lain terhadap masalah yang mbak hadapi?
<b>N</b>	:	Enggak mbak. Aku nggak mau ngerepotin orang, selagi aku masih bisa ya aku lakukan sendiri.
<b>P</b>	:	Sampai kapan mbak melakukan rutinitas seperti ini?
<b>N</b>	:	Sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain, sampai kondisi kesehatanku tidak memungkinkan.
<b>P</b>	:	Jika tanpa pengaman, apa mbak pernah hamil?
<b>N</b>	:	Sudah mbak. 3 kali aku hamil. Pertama aku umur 14 tahun. Kedua saat aku umur 16 tahun dn yang terakhir sekitar 4 bulan lalu.
<b>P</b>	:	Lalu?
<b>N</b>	:	Aku gugurin.
<b>P</b>	:	Dengan cara?
<b>N</b>	:	Ya minum obat-obatan, minum alkohol. Aku konsumsi berlebih sampai keguguran.
<b>P</b>	:	Dan 3 kali itu digugurkan semua?
<b>N</b>	:	Iya.
<b>P</b>	:	Jika mbak ingin berbicara dengan pemerintah, apa yang ingin mbak katakan?
<b>N</b>	:	Aku Cuma mau ngomong, pengen di bantu. Pengidap HIV itu nggak Cuma aku.masih banyak diluar sana yang kena HIV. Apalagi semenjak dolly tutup. Seharusnya pemkot bantu untuk membiayai keluarga si pengidap.
<b>P</b>	:	Saat ini, mbak tahu berapa orang PSK yang masih beroperasi?
<b>N</b>	:	Banyak mbak. Masih 70% yang masih aktif. Jangan kira dolly itu udah tutup mbak. Yang ditutup Cuma tempatnya tapi bukan orangnya mbak. Malah semakin bahaya. Sekarang jarang nongol di dolly mbak, pelacur yang dulu kebanyakan lari ke Malang, Jogja, Kalimantan. Itu setauku. Bukan mereka tobat atau pulang, tapi Cuma pindah

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA MASYARAKAT TERDAMPAK

Informan	
Biodata Singkat Informan	
Nama	: Nurma
Alamat	: Putat Jaya gg lebar V
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 19 tahun
Pekerjaan	: Penjaga Warkop
Tanggal	: 24 Juli 2017
Waktu	: 12.48 WIB

No	Pertanyaan	Hasil
A.	<b>Peluang Terjadinya Dampak</b>	
1.	Pekerjaan utama?	Cuma penjaga warkop aja mbak
2.	Gimana pendapat mbak mengenai tempat ini dulu, dimana dulu setiap hari banyak orang menjajakan diri untuk di jual? (prostitusi)	Ya, gimana mbak. Lah wong aku udah lama tinggal disini jadi ya biasa aja. Banyak yang mabuk-mabukan, banyak yang nggodang-goda, banyak tengkar kalo lagi ada judi. Wes banyaklah mbak. Tapi ya sudah biasa.
3.	Apakah mbak setuju dengan kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya tersebut, terkait kebijakan penutupan dolly	Di bilang setuju tapi kok ya kasihan pedagang-pedagang yang bangkrut, di bilang nggak setuju tapi kok ya kalo makin memprihatinkan. Serba salah mbak. Pokoknya ya setuju apa nggak setuju, kudu menerima mbak. Mau gimana lagi
4.	Bagaimana proses negosiasi dari Pemerintah terkait dengan masyarakat terdampak pada proses pelaksanaan kebijakan tersebut?	<i>"Pekot kui hanya memperhatikan PSK mbe mucikari mbak. Wong biasa kene nggak di peduli ne. Masyarakat ki kudu nriman mbak"</i> (pekot itu hanya memperhatikan PSK dan muckarnya saja mbak. Orang biasa seperti saya ini kurang

		dipedulikan. Masyarakat sekitar sini harus menerima keputusan mbak)
5.	Berapa lama proses penutupan dolly ini mbak?	“Nek gencar-gencar e ki taun 2014 mbak. Tapi bu Risma wes ngadakno pelatihan ngunu ki teko taun 2010 sak ngertiku” (Kalau penutupan besar-besaran itu tahun 2014. Tetapi Bu Risma sudah mengadakan pelatihan dari tahun 2010)
6.	Sebelum penutupan, apakah dolly ini membawa dampak yang positif atau negatif bagi kehidupan mbak?	“Dampak negatif mbak. Tapi ya jenenge urip ya kudu abot.” (dampak negatif. Tapi yang namanya kehidupan itu pasti berat)
7.	Saat penutupan berlangsung, apakah ada pemberontakan yang terjadi?	Banyak mbak. Pas sudah ditutup itu warga asli semuanya berontak. Banyak yang tindak anarkis. Rumah sampe getar semua mbak. Orang-orang ngelempar gas elpigi, semua di bakar, pokoknya ngeri mbak. Kan sebenarnya ngga setuju orang-orang sini mbak. Karna semua orang disini pedagang semua
8.	Setelah penutupan, dampak apa yang terjadi bagi masyarakat terdampak?	Wah. Sebulan setelah penutupan itu malah bahaya mbak. Soalnya anak-anak kecil yang nggak tau apa-apa malah jadi pelecehan seksual. Dari orang luar, biasa yang konsumen tetap yang dulu. Jadi setiap perempuan yang ada di jalan entah itu mau kemana tapi jalan kaki, gitu di tawar mbak. Kadang pelecehan seksual. Ngeri mbak.
<b>B. Jumlah Orang yang Akan Terkena Dampak</b>		
1.	Tinggal di daerah lokalisasi berapa lama?	Wah udah lama mbak, dari lahir bahkan. Tapi ibu udah 30 tahun tinggal di dolly
2.	Berapa bersaudara?	6 bersaudara, saya ragil
3.	Ibu kerja apa?	Jualan nasi mbak. Tapi didepan rumah. Itu it ya B sekarang sepi. Makanya saya juga kerja mbak meski Cuma jaga toko
4.	Dalam penutupan lokalisasi dolly, siapa saja yang terkena dampak?	Pelaku usaha prostitusi, pedagang, tukang parkir, salon, catering bahkan anak-anak kecil selalu jadi korban mbak.

<b>C. Untung Derita yang di Derita Subyek Dampak</b>		
1.	Apakah lokalisasi dolly sangat berpengaruh terhadap penghasilan mbak?	Sangat mbak
2.	Berapa penghasilan sebelum dolly ditutup?	Warkop gini, sehari bisa nyampe 1.500.000 mbak Buka dari jam 12.00-04.00 WIB. Kadang buka jam 6 sore, jam 9 malem sudah habis.
3.	Lalu berapa penghasilan sesudah dolly ditutup?	Sehari cuma dapet 200.000 maksimal
4.	Kerugian berbentuk apa yang mbak rasakan pasca penutupan dolly?	Hanya pendapatan aja mbak yang kurang. Biasanya masak nasi 10kg sekarang Cuma 2kg aja
5.	Keuntungan apa yang mbak rasakan pasca penutupan dolly?	Keuntungannya ya udah lebih aman sekarang mbak, terus banyak orang yang dateng ke dolly ini udah bukan karena memuaskan hasrat saja, melainkan wisata kampung mbak.
6.	Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari sebelum maupun sesudah adanya dolly?	Lebih aman mbak
7.	Adakah bantuan sosial dari Pemerintah maupun lembaga lain ataupun swasta bagi masyarakat terdampak penutupan lokalisasi?	Nggak ada mbak. Bantuan Cuma untuk PSK dan mucikari
8.	Bantuan apa yang di berikan ?	Untuk PSK diberi kompensasi Rp. 5.050.000,- dan mucikari Rp. 5.000.000,- dan memberi pelatihan saja sebelum ditutup.
<b>D. Relevansi Terhadap Kebijakan</b>		
1.	Apakah mbak mengetahui sebelumnya jika ada kebijakan penutupan lokalisasi, dimana dolly sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu?	Sebelumnya ada mbak, Cuma isu-isu saja tapi belum ada tindakan. Mungkin belum ada yang berani menutup langsung.
2.	Apakah mbak mendukung adanya kebijakan penutupan dolly?	Sangat setuju mbak
3.	Bagaimana sikap mbak ketika mengetahui akan dilaksanakannya kebijakan penutupan dolly oleh pemkot?	Mendukung mbak

4.	Menurut mbak, sudah tepatkah kebijakan yang diambil oleh Pemkot untuk menutup dolly?	Tepat untuk menutup
5.	Apakah sebelum keberadaan lokalisasi sebelum penutupan mengganggu kehidupan mbak?	Mengganggu Cuma ya biasa aja mbak
6.	Bagaimana upaya Pemkot untuk menangani prostitusi pasca ditutupnya lokalisasi?	Cuma razia aja mbak.
7.	Apakah menurut mbak, dengan adanya kebijakan penutupan dolly ini, bisnis prostitusi sudah mati atau masih ada?	Masih ada mbak. Jelas masih ada. Tapi nggak se-fulgar dulu. Jam 21.30 sudah mulai banyak yang datang kesini mbak. Apalagi di makam kembang kuning, banyak sekali orang yang menjajakan dirinya mbak. Kalau nggak percaya, coba datang kesini jam 9 malam ke atas mbak, banyak tempat parkir yang penuh mobil-mobil itu ya konsumennya. Tapi kebanyakan mainnya di kos-kosan kalau nggak di hotel.
8.	Tindakan apa dari Pemkot menindaklanjuti prostitusi yang masih berjalan?	Cuma razia aja mbak tiap hari sabtu
E.	<b>Perhatian Publik Terhadap Dampak Tersebut</b>	
1.	Bagaimana respon mbak terhadap kebijakan penutupan dolly?	Setuju saya mbak
2.	Hingga 2016, apakah kebijakan dari pemkot terkait penutupan dolly sesuai dengan tujuan yang diharapkan?	Sesuai tujuan sih sudah mbak. Membersihkan nama Surabaya dari nama lokalisasi terbesar. Namun, dengan adanya penutupan itu malah semakin membuat prostitusi itu semakin menyebar dan tersembunyi. Namanya juga penyakit sosial mbak.
3.	Apakah mbak mengikuti program-program pemberdayaan yang dilakukan Pemkot terhadap masyarakat terdampak?	Enggak mbak.
4.	Sudah maksimalkah upaya-upaya Pemerintah untuk	Menurut saya, belum mbak. Karena Pemkot hanya memberi pelatihan



melakukan	program	sebelum ditutup saja. Namun, pasca
pemberdayaan	bagi	penutupan ini tidak didampingi oleh
masyarakat terdampak?		Pemkot.

